

TUGAS AKHIR
ANALISIS PENANGANAN PERMUKIMAN KUMUH
(STUDI KASUS PROGRAM KOTAKU DI KELURAHAN 14
ULU KOTA PALEMBANG)



Disusun Oleh:

Heri Susanti

NPM. 2018.28.0013

PROGRAM STRATA 1
PROGRAM PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS INDO GLOBAL MANDIRI
PALEMBANG
2023

TUGAS AKHIR
ANALISIS PENANGANAN PERMUKIMAN KUMUH
(STUDI KASUS PROGRAM KOTAKU DI KELURAHAN 14
ULU KOTA PALEMBANG)



Disusun Untuk Memenuhi Syarat dalam
Penyelesaian Studi Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Perencanaan Wilayah dan Kota.

Disusun Oleh:

Heri Susanti

NPM. 2018.28.0013

PROGRAM STRATA 1
PROGRAM PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS INDO GLOBAL MANDIRI
PALEMBANG
2023

HALAMAN PERSETUJUAN
TUGAS AKHIR
ANALISIS PENANGANAN PERMUKIMAN KUMUH
(STUDI KASUS PROGRAM KOTAKU DI KELURAHAN 14
ULU KOTA PALEMBANG)

Heri Susanti
NPM : 2018.28.0013

Palembang, 21 Agustus 2023
Menyetujui

Dekan Fakultas Teknik




Anta Sastika, S.T.,M.T
NIDN: 0214047401

Ketua Program Studi
Perencanaan Wilayah dan Kota



Dr. Endy Agustian, S.T.,M.Eng
NIDN: 0218089301

HALAMAN PENGESAHAN

TUGAS AKHIR

**ANALISIS PENANGANAN PERMUKIMAN KUMUH
(STUDI KASUS PROGRAM KOTAKU DI KELURAHAN 14
ULU KOTA PALEMBANG)**

Heri Susanti

NPM: 2018.28.0013

Palembang, 21 Agustus 2023

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Endy Agustian, S.T.,M.Eng
NIDN: 0218089301



Hala Haidir, S.T., M.P.W.K
NIDN: 0225129401

**Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota
Universitas Indo Global Mandiri
Ketua Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota**



Dr. Endy Agustian, S.T.,M.Eng
NIDN : 0218089301

**ANALISIS PENANGANAN PERMUKIMAN KUMUH
(STUDI KASUS PROGRAM KOTAKU DI KELURAHAN I4 ULU KOTA
PALEMBANG)**

**Tugas Akhir diajukan kepada
Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota
Fakultas Teknik Universitas Indo Global Mandiri**

**Oleh :
HERI SUSANTI 2018.28.0013**

Dinyatakan Lulus

Sebagai Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Perencanaan Wilayah dan Kota

Palembang, 04 Agustus 2023

Tim Penguji :

Dosen Penguji I : Hala Haidir, S.T.,M.P.W.K

NIDN: 0225129401

Dosen Penguji II : Zenal Mutaqin, S.T.,M.Si

NIDN : 0224027501

Dosen Penguji III : Herda Sabriyah Dara Kospa, S.P.,M.IL.,M.Sc

NIDN : 0205068901

Mengetahui

Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota
Universitas Indo Global Mandiri
Ketua Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota



Dr. Endy Agustian, S.T.,M.Eng

NIDN : 0218089301

LEMBAR PERSETUJUAN REVISI

Kami yang bertanda tangan di bawah ini, menerangkan bahwa :

Nama : Heri Susanti

NPM : 2018280013

Prodi : Perencanaan Wilayah dan Kota

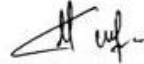
Judul : ANALISIS PENANGANAN PERMUKIMAN KUMUH (STUDI KASUS PROGRAM KOTAKU DI KELURAHAN 14 ULU KOTA PALEMBANG)

Dikeluarkan: Palembang

Pada Tanggal, 18 Agustus 2023

Penguji Tugas Akhir

Tanggal ²¹..... Ketua Penguji



.....
Hala Haidir, S.T.,M.P.W.K
NIDN : 0225129401

Tanggal ¹⁸..... Penguji II



.....
Zenal Mutaqin, S.T.,M.Si
NIDN : 0224027501

Tanggal ²¹..... Penguji III



.....
Herda Sabriyah Dara Kospa, S.P.,M.I.L.,M.Sc
NIDN : 0205068901

Dekan Fakultas Teknik

FARUKSAS 111111



.....
Anta Sustika, S.T.,M.T
NIDN : 0214047401

**Ketua Program Studi
Perencanaan Wilayah dan Kota**



.....
Dr. Endy Agustian, S.T.,M.Eng
NIDN : 0218089301



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya menyatakan dalam seminar proposal skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya / pendapat yang pernah ditulis orang lain, kecuali yang tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam Daftar Acuan/ Daftar Pustaka.

Apabila ditemukan suatu jiplakan/ plagiat, maka saya bersedia menerima akibat berupa sanksi akademis dan sanksi lain yang diberikan oleh yang berwenang sesuai ketentuan, peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Palembang, Agustus 2023
Yang membuat pernyataan



Heri Susanti
NPM : 2018280013

“Analysis Of Slum Handling (Case Study Of Kotaku Program In Kelurahan 14 Ulu, Palembang City)”

***Arranged By : HERI SUSANTI
Student ID Number : 2018.28.0013***

ABSTRACT

Slums are a condition of a housing environment with very uninhabitable quality with characteristics including very high building density in a limited area, prone to social and environmental diseases, and very low quality of buildings, inadequate and dangerous environmental infrastructure. . survival and livelihood of its inhabitants.

Based on the 2019 RPLP, one of the government's steps in tackling the problem of slum settlements is the KOTAKU Program, namely the City Without Slums program. The KOTAKU program is an urban slum management program carried out by the community and the local government as the skipper in reducing the slums in the sub-district environment, especially the 14 ulu sub-district. used to get the NUSP program and only in 2019 the KOTAKU program was implemented in the district.

According to public perceptions, the handling of slum settlements in the 14 Ulu sub-district is still classified as a mild slum, slums can occur because the people are irresponsible and there is no awareness of the community itself and the surrounding environment, and many people still throw garbage out of place, therefore return to slum settlements.

Keywords : Slum Settlement, Kotaku’s Program, public perception.

**“ Analisis Penanganan Permukiman Kumuh (Studi Kasus Program
KOTAKU di Kelurahan 14 Ulu Kota Palembang)”**

Oleh : Heri Susanti

NPM : 2018.28.0013

ABSTRAK

Permukiman kumuh merupakan keadaan lingkungan hunian dengan kualitas yang sangat tidak layak huni dengan ciri-ciri antara lain kepadatan bangunan sangat tinggi dalam luasan yang terbatas, rawan penyakit sosial dan penyakit lingkungan, serta kualitas bangunan yang sangat rendah, tidak terlayannya prasarana lingkungan yang memadai dan membahayakan keberlangsungan kehidupan dan penghidupan penghuninya

Berdasarkan RPLP tahun 2019 Salah satu langkah pemerintah dalam menanggulangi masalah permukiman kumuh adalah dengan Program KOTAKU yaitu program Kota Tanpa Kumuh. Program KOTAKU ini merupakan program penanganan lingkungan kumuh perkotaan yang dilaksanakan oleh masyarakat dan Pemerintah setempat selaku nakhoda dalam mengurangi kekumuhan yang ada pada lingkungan kelurahan khususnya kelurahan 14 ulu, Program ini telah terlaksana mulai dari tahun 2015 sampai dengan sekarang, akan tetapi kelurahan 14 ulu ini lebih dulu mendapatkan program NUSP dan baru ditahun 2019 ini program KOTAKU terlaksana di kelurahan tersebut.

Menurut persepsi masyarakat penanganan permukiman kumuh di kelurahan 14 ulu masih termasuk kedalam kumuh ringan, bisa terjadinya kekumuhan karena disebabkan oleh masyarakatnya yang tidak bertanggung jawab dan tidak ada kesadaran masyarakatnya itu sendiri dengan lingkungan sekitar bahkan masih banyaknya masyarakat membuang sampah tidak pada tempatnya, maka dari itu terjadinya permukiman kumuh kembali.

Kata Kunci : Permukiman Kumuh, Program KOTAKU, Persepsi Masyarakat.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum wr.wb.

Dengan mengucapkan Alhamdulillah penulis ucapkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas rahmat-Nya yang selama ini kita dapatkan, yang memberi hikmah dan yang paling bermanfaat bagi seluruh umat manusia. Sehingga penulis dapat menyusun Laporan Proposal Tugas Akhir ini yang berjudul **“ANALISIS PENANGANAN PERMUKIMAN KUMUH (STUDI KASUS PROGRAM KOTAKU DI KELURAHAN 14 ULU KOTA PALEMBANG)”**

Dari penyusunan Laporan Tugas Akhir ini diharapkan memperoleh tambahan pengetahuan dan pengalaman terutama dalam penerapan ilmu di bidang perencanaan. Dalam penyusunan proposal tugas akhir ini tidak luput dari kekurangan-kekurangan, hal ini karena dipengaruhi dengan pengalaman serta ilmu yang penulis miliki. Dengan selesainya Laporan Tugas Akhir ini, penulis juga sangat mengucapkan terima kasih banyak kepada :

1. Kepada kedua orang tua, saudara, dan keluarga saya yang selalu mendoakan, memberikan dukungan semangat dan motivasi sehingga tugas akhir ini dapat terselesaikan dengan baik.
2. Bapak Dr. H. Marzuki Alie, S.E.,M.M selaku Rektor Universitas Indo Global Mandiri Palembang.
3. Bapak Anta Sastika, S.T.,M.T selaku Dekan Fakultas Teknik Universitas Indo Global Mandiri.
4. Bapak Endy Agustian, S.T., M.Eng selaku dosen pembimbing pertama yang telah memberikan kritik dan saran bimbingan maupun arahan yang sangat berguna dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir ini.
5. Ibu Hala Haidir, S.T.,M.P.W.K selaku dosen pembimbing kedua telah memberikan kritik dan saran bimbingan maupun arahan yang sangat berguna dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir ini.
6. Teman-teman seperjuangan Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Angkatan 2018.

7. Kepada *my one and only* Liansyah Fanny, Amd.t yang selalu dukung kapanpun dimanapun dalam kelancaran skripsi ini, terimakasih atas dukungannya dan mencari jalan keluar untuk skripsi ini serta ketulusan dan support yang tak terlupakan.
8. Kepada lili indah pratiwi, S.PWK terima kasih sudah banyak membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwan banyak kekurangan dalam Laporan Tugas Akhir ini makan sangat perlunya saran dan kritik dari berbagai pihak agar Laporan Tugas Akhir ini mendekati kata sempurna.

Palembang, 21 Agustus 2023

Heri Susanti

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERSETUJUAN DEWAN PENGUJI.....	iv
PERSETUJUAN REVISI DEWAN PENGUJI	v
PERNYATAAN KEASLIAN	vi
ABSTRAK	vii
ABSCRACK.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Sasaran Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian	5
1.4.1 Manfaat Teori.....	5
1.4.2 Manfaat praktis.....	5
1.5 Ruang Lingkup.....	6
1.5.1 Ruang Lingkup Subtansi	6
1.5.2 Ruang Lingkup Wilayah	6

1.6 Keaslian Penelitian.....	8
1.7 Kerangka Berpikir.....	18
1.8 Sistematika Penulisan.....	19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	20
2.1. Perumahan dan Permukiman Kumuh.....	20
2.1.1 Pengertian Permukiman dan Kawasan Permukiman	20
2.1.2 Permukiman Kumuh	21
2.2 Persepsi	23
2.2.1 Faktor Internal.....	23
2.2.2 Faktor Eksternal	24
2.3 Pengertian Masyarakat	25
2.4 Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh).....	26
2.4.1 Tujuan Program KOTAKU	27
2.4.2 Strategis Operasional	28
2.4.3 Prinsip Pelaksanaan	29
2.4.4 Pola Penanganan	30
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	31
3.1 Metode Penelitian.....	31
3.2 Populasi Dan Sampel	31
3.2.1 Teknik Sampel	31
3.2.2 Teknik Sampling	32
3.3 Teknik Pengumpulan Data.....	33
3.3.1 Teknik Pengumpulan Data Primer	33
3.3.2 Teknik Pengumpulan Data Sekunder.....	35
3.4 Teknik Analisis Data.....	36

3.5 Variabel Penelitian	37
3.6 Deskripsi Data.....	38
3.6.1 Karakteristik Responden	39
BAB IV GAMBARAN UMUM WILAYAH STUDI.....	42
4.1 Kondisi Geografis dan Administrasi	42
4.2 Gambaran Umum Kecamatan Seberang Ulu II	44
4.2.1 Jumlah, Kepadatan penduduk kecamatan seberang ulu II	46
4.2.2 Kondisi Agama dan Sosial Ekonomi di Kecamatan seberang ulu II	47
4.2.2.1 Agama	47
4.2.2.2 Kondisi Sosial Ekonomi	48
4.3 Gambaran Umum Kelurahan 14 Ulu	48
4.3.1 Kondisi Sosial Ekonomi Wilayah	51
4.3.1.1 Kondisi Sarana Pendidikan	51
4.3.1.2 Kondisi Sarana Peribadatan	53
4.3.2.3 Kondisi Sarana Kesehatan	53
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN	55
5.1 Identifikasi Kondisi Kelurahan 14 Ulu Kota Palembang Sesudah dilaksanakan Program Kotaku Pada Tahun 2016-2022	55
5.1.1 Bangunan Hunian / Gedung	55
5.1.2 Jalan Lingkungan	59
5.1.3 Penyediaan Air Bersih.....	63
5.1.4 Drainase Lingkungan	66
5.1.5 Pengelolaan Air Limbah	69
5.1.6 Pengelolaan Persampahan.....	71
5.1.7 Pengaman Kebakaran.....	74

5.2 Penilaian Program Kotaku di Kelurahan 14 Ulu Kota Palembang	77
5.2.1.1 Penilaian Kondisi Hunian Bangunan / Gedung	77
5.2.1.2 Penilaian Kondisi Jalan.....	77
5.2.1.3 Penilaian Kondisi Penyediaan Air Bersih.....	78
5.2.1.4 Penilaian Kondisi Drainase Lingkungan.....	79
5.2.1.5 Penilaian Kondisi Air Limbah	80
5.2.1.6 Penilaian Kondisi Pengelolaan Persampahan	80
5.2.1.7 Penilaian Kondisi Proteksi Kebakaran.....	81
5.2.2 Penilaian Program KOTAKU berdasarkan Persepsi Masyarakat	82
5.2.2.1 Penilaian kondisi Hunian Bangunan/Gedung	82
5.2.2.2 Penilaian Kondisi Jalan Lingkungan	83
5.2.2.3 Penilaian Kondisi Penyediaan Air Bersih	84
5.2.2.4 Penilaian Kondisi Drainase Lingkungan	85
5.2.2.5 Penilaian Kondisi Air Limbah	86
5.2.2.6 Penilaian Kondisi Pengelolaan Persampahan	87
5.2.2.7 Penilaian Kondisi Proteksi Kebakaran	88
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN.....	96
5.1 Kesimpulan	96
5.2 Saran.....	97
DAFTAR PUSTAKA	99

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Keaslian Penelitian	7
Tabel 3.1 Pedoman Observasi	34
Tabel 3.2 Bobot Persepsi Setiap Atribut	35
Tabel 3.3 Kebutuhan Data penelitian	36
Tabel 3.4 Variabel dan indikator Penelitian	37
Tabel 3.5 Data Distribusi Kuesioner Penelitian	39
Tabel 3.6 Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Pekerjaan	39
Tabel 3.7 Distribusi Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir	40
Tabel 3.8 Distribusi Responden Berdasarkan Jumlah Anggota Keluarga	40
Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Kecamatan seberang ulu II menurut jenis kelamin.	46
Tabel 4.2 Agama Kecamatan Seberang Ulu II.....	47
Tabel 4.3 Jumlah Sarana perekonomian di kecamatan seberang ulu II	48
Tabel 4.4 Fasilitas Pendidikan kelurahan 14 ulu.....	51
Tabel 5.1 Kondisi Bangunan Gedung/Hunian.....	57
Tabel 5.2 Kondisi Jalan Lingkungan.....	59
Tabel 5.3 Kondisi Jalan Lingkungan.....	61
Tabel 5.4 Kondisi Penyediaan Air Bersih	63
Tabel 5.5 Kondisi Penyediaan Air Bersih	64
Tabel 5.6 Kondisi Drainase Lingkungan	66

Tabel 5.7 Kondisi Drainase Lingkungan	67
Tabel 5.8 Kondisi Pengelolaan Air Limbah.....	69
Tabel 5.9 Kondisi pengelolah persampahan	71
Tabel 5.10 Kondisi pengelolah persampahan	72
Tabel 5.11 Kondisi Proteksi Kebakaran	75
Tabel 5.12 Penilaian Kondisi Bangunan Gedung setelah program KOTAKU	77
Tabel 5.13 Penilaian Kondisi Jalan Lingkungan setelah program KOTAKU	78
Tabel 5.14 Penilaian Kondisi penyediaan air bersih setelah program KOTAKU	79
Tabel 5.15 Penilaian Kondisi drainase lingkungan setelah program KOTAKU .	79
Tabel 5.16 Penilaian Kondisi air limbah setelah program KOTAKU.....	80
Tabel 5.17 Penilaian Kondisi persampahan setelah program KOTAKU.....	81
Tabel 5.18 Penilaian Kondisi Proteksi Kebakaran setelah program KOTAKU .	82
Tabel 5.19 Evaluasi Kondisi Bangunan Gedung kelurahan 14 ulu.....	82
Tabel 5.20 Evaluasi Kondisi Jalan Lingkungan kelurahan 14 ulu	83
Tabel 5.21 Evaluasi Kondisi penyediaan air bersih kelurahan 14 ulu	84
Tabel 5.22 Evaluasi Kondisi drainase lingkungan kelurahan 14 ulu	85
Tabel 5.23 Evaluasi Kondisi air limbah kelurahan 14 ulu	86
Tabel 5.24 Evaluasi Kondisi pengelolah persampahan kelurahan 14 ulu.....	87
Tabel 5.25 Evaluasi Kondisi Proteksi Kebakaran kelurahan 14 ulu	88
Tabel 5.26 Penilaian Keseluruhan Penanganan Permukiman Kumuh	91

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Permukiman Kelurahan 14 Ulu di Kota Palembang.....	4
Gambar 1.2 Peta Administrasi Kelurahan 14 Ulu Kota Palembang.....	7
Gambar 1.3 Kerangka Berfikir Penelitian	18
Gambar 4.1 Peta Administrasi Kota Palembang	43
Gambar 4.2 Peta Admistrasi Kelurahan 14 Ulu	50
Gambar 4.3 Fasilitas Pendidikan di Kelurahan 14 Ulu	52
Gambar 4.4 Tempat Peribadatan Kelurahan 14 ulu	53
Gambar 4.5 Tempat pelayanan kesehatan kelurahan 14 ulu	54
Gambar 5.1 Kondisi Bangunan Hunian/Gedung Warga 14 Ulu	58
Gambar 5.2 Kondisi Jalan Lingkungan	62
Gambar 5.3 Kondisi Penyediaan Air Bersih	65
Gambar 5.4 Kondisi Drainase Lingkungan	68
Gambar 5.5 Kondisi Air Limbah	70
Gambar 5.6 Kondisi Pengelolaan Persampahan.....	73
Gambar 5.7 Kondisi Proteksi Kebakaran	76

DARTAR LAMPIRAN

Lampiran I Kuisisioner	102
Lampiran II Surat Izin Penelitian	112
Lampiran III Dokumentasi Lapangan	114
Lampiran IV Form Bimbingan	116

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 mengamanatkan pembangunan dan pengembangan kawasan perkotaan melalui penanganan kualitas lingkungan permukiman yaitu untuk peningkatan kualitas permukiman kumuh, pencegahan tumbuh kembangnya permukiman kumuh yang baru, dan penghidupan berkelanjutan. Pada tahun 2022 masih terdapat 35.291 Ha permukiman kumuh perkotaan yang tersebar di hampir seluruh wilayah Indonesia sesuai hasil perhitungan pengurangan luasan permukiman kumuh perkotaan yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya. Kondisi tersebut diperkirakan akan terus mengalami penambahan apabila tidak ada bentuk penanganan yang inovatif, menyeluruh, dan tepat sasaran.

Permukiman kumuh merupakan keadaan lingkungan hunian dengan kualitas yang sangat tidak layak huni dengan ciri-ciri antara lain kepadatan bangunan sangat tinggi dalam luasan yang terbatas, rawan penyakit sosial dan penyakit lingkungan, serta kualitas bangunan yang sangat rendah, tidak terlayannya prasarana lingkungan yang memadai dan membahayakan keberlangsungan kehidupan dan penghidupan penghuninya. Kawasan permukiman kumuh seringkali identik dengan keberadaan penduduk miskin hal ini ditandai dengan kondisi rumah dan fasilitas yang mereka miliki dikawasan permukiman kumuh tersebut. Ada dua hal yang mencirikan kawasan tersebut dikatakan kumuh yaitu, pertama; kawasan tersebut tidak atau kurang terlayani dengan infrastruktur pendukung kawasan seperti jaringan jalan, drainase, saluran limbah dan lain-lain, sehingga kawasan tersebut cenderung mengalami degradasi. Kedua; hunian di kawasan tersebut secara kasat mata terlihat tidak layak huni yang ditandai dengan kurangnya ventilasi maupun pencahayaan, disamping mutu

material bangunannya yang tidak layak dijadikan sebagai bahan bangunan untuk sebuah hunian (Budiharjo,1997).

Berdasarkan RPLP tahun 2019 Salah satu langkah pemerintah dalam menanggulangi masalah permukiman kumuh adalah dengan Program KOTAKU yaitu program Kota Tanpa Kumuh. Program KOTAKU ini merupakan program penanganan lingkungan kumuh perkotaan yang dilaksanakan oleh masyarakat dan Pemerintah setempat selaku nakhoda dalam mengurangi kekumuhan yang ada pada lingkungan kelurahan khususnya kelurahan 14 ulu, Program ini telah terlaksana mulai dari tahun 2015 sampai dengan sekarang, akan tetapi kelurahan 14 ulu ini lebih dulu mendapatkan program NUSP dan baru ditahun 2019 ini program KOTAKU terlaksana di kelurahan tersebut.

“Kota layak huni, produktif dan berkelanjutan” merupakan tujuan yang akan dicapai melalui Program KOTAKU (Program Kota Tanpa Kumuh). Dalam rangka pencapaian tujuan tersebut kelurahan 14 ulu merumuskan capaian Program KOTAKU ke dalam dua kegiatan yaitu peningkatan kualitas permukiman dan pencegahan permukiman kumuh yang dilakukan melalui pendekatan partisipatif. Pendekatan tersebut mempertemukan perencanaan makro (*top-down*) dengan perencanaan mikro (*bottom-up*). (RPLP, 2019)

Di tingkat kelurahan, masyarakat bekerja bersama dengan pemerintahan kelurahan dan kelompok peduli lainnya berpartisipasi aktif dan turut serta dalam seluruh proses pengambilan keputusan untuk penanganan permukiman kumuh di kelurahan 14 Ulu Penanganan permukiman kumuh ini membutuhkankolaborasi banyak sektor danbanyak pihak untuk dapat mengerahkan beragam sumber daya dan dana dari tingkat pusat, provinsi, kota, kecamatan, kelurahan, termasuk pihak swasta, perguruan tinggi dan kelompok peduli lainnya melalui keterpaduan program. (RPLP, 2019)

Sebagai satu kesatuan sub-sistem wilayah kota, maka pemerintah kelurahan bersama Lembaga Keswadaayaan Masyarakat (LKM) dirasa perlu melakukan hal yang sama secara sinergi dan berkolaborasi untuk merumuskan program pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman diwilayah kelurahan 14 Ulu Dengan merumuskan sebuah dokumen perencanaan yang termuat dalam

dokumen Rencana Penataan Lingkungan Permukiman atau disebut juga dengan RPLP, dimana dokumen ini diharapkan agar program / rencana kegiatan di yang direncanakan di tingkat masyarakat dapat terintegrasi dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah/Rencana Kerja Pembangunan (RPJM/RKP) Desa atau Rencana Strategis/Rencana Kerja (Renstra/Renja) Kecamatan. Dengan adanya integrasi tersebut, kolaborasi yang diharapkan dapat berjalan dengan saling mendukung antara pemerintah, masyarakat dan kelompok peduli dalam menyelesaikan permasalahan permukiman kumuh di lingkungan perkotaan. (RPLP, 2019)

Pelaksanaan Program KOTAKU menggunakan pendekatan pemberdayaan masyarakat dan partisipasi yang melibatkan masyarakat dan para pemangku kepentingan di tingkat kota. Konsep pemberdayaan masyarakat amat erat kaitannya dengan pembangunan yang berkelanjutan, karena didalamnya terkandung upaya-upaya peningkatan kemampuan masyarakat untuk merencanakan, mengembangkan, serta mengoperasikan dan memelihara hasil-hasil pembangunan ke arah yang lebih baik secara berkelanjutan. (RPLP, 2019)

Kota Palembang berdasarkan SK Walikota No.488 Tahun 2018 memiliki 2.581,84 Ha kawasan kumuh dengan 34.809 rumah tidak layak huni, yang tersebar di 59 kelurahan dan 13 kecamatan. Diharapkan dengan adanya Program Kota Tanpa Kumuh dan peran serta masyarakat tersebut timbul rasa memiliki terhadap hasil-hasil pembangunan sehingga keberlanjutan dari program dapat tercapai. Perlu memastikan dan mengendalikan tercapainya tujuan dan sasaran penanganan kawasan permukiman kumuh yaitu untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, memberikan dampak positif lainnya seperti capaian yang layak huni dari pembangunan yang dilakukan demi berkelanjutan Kelurahan 14 Ulu.

Problematika yang dihadapi masyarakat di Kelurahan 14 ulu Kota Palembang ini pada umumnya adalah masalah lapangan pekerjaan, kemiskinan, kerawanan sosial yang meningkat angka kejahatan, pelayanan kesehatan yang rendah, kurangnya area penghijauan, menurunnya kualitas infrastruktur jalan, drainase yang buruk akibat genangan pasang surut air sungai setiap bulannya, kurangnya pengelolaan dan pemeliharaan terhadap infrastruktur yang terbangun

memperburuk kondisi yang sudah ada, dan tingginya kepadatan penduduk yang tidak sebanding dengan lahan yang tersedia untuk permukiman mengakibatkan ketidakteraturan dalam penataan tempat tinggal dan penyediaan sarana dan prasarana dasar permukiman. Kondisi di Wilayah Kelurahan Empat Belas Ulu untuk permukiman kumuh bisa diketahui pada Gambar 1.1 bagian (a) dan (b) sebagai berikut:



(a) Permukiman kumuh tampak depan

(b) Permukiman kumuh tampak belakang

Sumber : Data Olahan Penelitian,2023

Gambar 1.1

Permukiman Kelurahan 14 Ulu di Kota Palembang

Berdasarkan uraian tersebut serta melihat dari kondisi permukiman tersebut, tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis konteks dari hasil studi lapangan untuk (Analisis Penanganan Permukiman Kumuh (Studi Kasus Program Kotaku di Kelurahan 14 Ulu Kota Palembang)).

1.2 Rumusan Masalah

Permasalahan di Kelurahan 14 Ulu Kota Palembang yaitu kepadatan dan ketidakberaturan bangunan yang mengakibatkan lahan semakin terbatas dan menciptakan kekumuhan. Sarana jalan lingkungan yang mengalami rusak, berlubang dan lebar jalan yang tidak memadai (kurang dari 1,5 meter), dan pembuangan sampah yang sembarangan. Untuk pengelolaan air limbah di Kelurahan 14 Ulu Kota Palembang belum memenuhi persyaratan teknis baik pengelolaan limbah setempat secara individual maupun komunal.

Sebagian besar masyarakat yang tinggal di Kelurahan 14 Ulu Kota Palembang masih ada yang membuang limbah ke sungai atau ke selokan setempat, dan untuk sarana MCK sebagian besar masih belum tersedia sehingga mereka seringkali kesulitan jika akan melakukan aktivitas mandi dan cuci. Untuk drainase di Kelurahan 14 Ulu Kota Palembang kurang berfungsi dengan maksimal karena belum memadai terhadap luas area dan sebagian besar lokasi belum terlayani jaringan drainase yang baik. Berdasarkan identifikasi masalah tersebut maka penulisan penelitian ini memiliki rumusan penelitian yaitu “ **Apakah Penanganan Permukiman Kumuh studi kasus Program KOTAKU sudah memenuhi Standar PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) No.2 Tahun 2016.**”

1.3 Sasaran Penelitian

Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah, dan rumusan masalah yang telah dijabarkan sebelumnya, maka sasaran penelitian ini :

1. Mengidentifikasi kondisi eksisting Kelurahan 14 Ulu Kota Palembang setelah dilaksanakan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU).
2. Menilai pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kelurahan 14 ulu berdasarkan standar PUPR dan Persepsi Masyarakat.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teori

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan ilmu teknik khususnya di bidang perencanaan wilayah dan kota yang mengkaji hal yang serupa disamping itu, diharapkan pula dapat memberikan kontribusi pemikiran berupa konsep pemahaman mengenai Analisis Penanganan Permukiman Kumuh (Studi Kasus Program Kotaku di Kelurahan 14 Ulu Kota Palembang).

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk semua yang membacanya dan semua pihak yang terkait dalam penelitian ini, bagi akademik sebagai

pengembangan ilmu pendidikan, bagi peneliti pribadi untuk menambah pengetahuan ilmu teknik khususnya di bidang perencanaan wilayah dan kota.

1.5 Ruang Lingkup

Ruang lingkup yang dibahas dalam laporan ini terdiri atas ruang lingkup substansi yang membahas batas dari isi penelitian yang dilandaskan pada sasaran dan ruang lingkup wilayah yang membahas mengenai batasan wilayah serta justifikasi pemilihan wilayah.

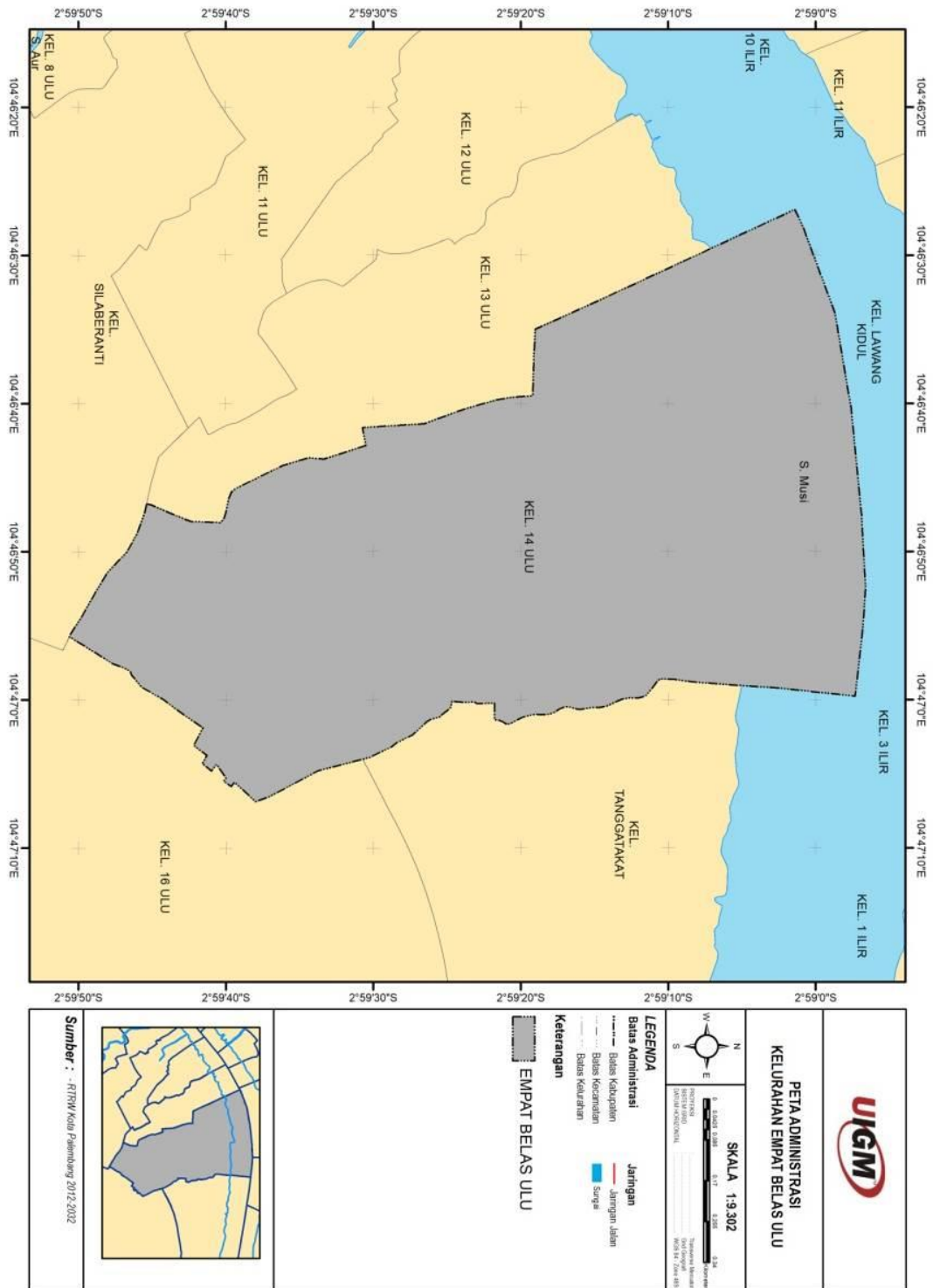
1.5.1 Ruang Lingkup Subtansi

Ruang lingkup substansi dalam penelitian ini yaitu membahas Analisis Penanganan Permukiman Kumuh (Studi Kasus Program Kotaku di Kelurahan 14 Ulu Kota Palembang). Agar kedepannya, dari mengidentifikasi ini pada keseimbangan berdampak pada permukiman kumuh di Kelurahan 14 Ulu.

1.5.2 Ruang Lingkup Wilayah

Kelurahan 14 Ulu Kecamatan Seberang Ulu II Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan merupakan salah satu kelurahan/desa di wilayah Kota Palembang. Luas wilayah administratif Kelurahan 14 Ulu Kecamatan Seberang Ulu II Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan sekitar 131 hektar, yang terbagi dalam 7 RW dan 33 RT. Secara umum kelurahan 14 Ulu bisa diketahui pada Gambar 1.2 sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Sungai Musi
- Sebelah Timur : Kelurahan Tangga Takat
- Sebelah Selatan : Kelurahan 16 ulu
- Sebelah Barat : Kelurahan 13 ulu



Sumber : Data Olah Penelitian,2023

Gambar 1.2

Peta Administrasi Kelurahan 14 Ulu Kota Palembang

1.6 Keaslian Penelitian

Sejauh pengetahuan penelitian terdapat beberapa penelitian yang berhubungan dengan penelitian, yaitu :

Tabel 1.1
Keaslian Peneliti

No	Nama, Tahun/ Judul Peneliti	Metode Penelitian	Lokasi	Fokus	Hasil Penelitian
1	Evaluasi Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) Di Kota Sukabumi Sumber : (Saleh, 2021)	Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif Kualitatif	Sukabumi	Evaluasi Program KOTAKU di Kota Sukabumi	Penelitian ini menjelaskan bahwa pelaksanaan program kota tanpa kumuh di Kota Sukabumi sudah dilaksanakan secara terukur, dinamis dan bertahap. Pelaksanaannya sesuai dengan rencana, karena ada dokumen perencanaan permukiman kumuh yaitu SIAP (Slum Improvement Action Plan) atau biasa disebut dengan RP2KPKP (Rencana Perbaikan Kawasan Permukiman) sehingga penanganan Kawasan kumuh di Kota Sukabumi sesuai dengan yang direncanakan. Selain itu pelaksanaannya sesuai dengan hasil survey dan kebutuhan masyarakat Kota Sukabumi yang tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Walikota Sukabumi.

No	Nama, Tahun/ Judul Peneliti	Metode Penelitian	Lokasi	Fokus	Hasil Penelitian
2	Evaluasi Penanganan Permukiman Kumuh: Studi Pada Penanganan Program Kotaku Kelurahan Banggae Kabupaten Majene Sumber : (Syamsiar et al., 2020)	Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif Kualitatif	Majene	Evaluasi penanganan permukiman kumuh studi pada program KOTAKU di kelurahan Majene.	Penelitian ini menunjukkan bahwa pasca pelaksanaan program Kotaku di Kelurahan Banggae, memerlukan evaluasi yang terpadu dan menyeluruh atau komprehensif atas kondisi permukimannya saat ini. Hal ini sesuai pendapat Wang (2014) mengenai tujuan evaluasi yang ingin mengetahui sesuatu kondisi sehingga evaluasi program menjadi salah satu bentuk penelitian evaluatif. Dalam evaluasi program, pelaksana berpikir serta menentukan langkah bagaimana melaksanakan penelitian. Hal ini sesuai pendapat Issac dan Michael dalam Muchsin dan Putra (2002:5) bahwa program harus diakhiri dengan evaluasi, guna memastikan apakah program tersebut berhasil menjalankan fungsi sebagaimana yang telah ditetapkan
3	Evaluasi Program Kotaku (Kota Tanpa Kumuh) Kelurahan Lebakgede Kecamatan Coblong Kota Bandung Sumber : (Liandri, 2019)	Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif Kualitatif	Bandung	Evaluasi penanganan permukiman kumuh pada Program KOTAKU di kelurahan lebak gede.	Kondisi Pengolahan Sampah di permukiman kelurahan 24 Ilir 39% Sampah domestik rumah tangga pada kawasan permukiman terangkut ke TPS/TPA kurang dari 2 kali seminggu, Pengelolaan Persampahan, dari semua RW yang menjadi lokasi pelaksanaan program, untuk pengelolaan sampah di permukiman dari kelima RW semuanya tidak tercapai,

No	Nama, Tahun/ Judul Peneliti	Metode Penelitian	Lokasi	Fokus	Hasil Penelitian
					dan kurang tercapai.
4	Implementasi Program Kotaku dalam Upaya Mengatasi Permasalahan Kumuh di Kabupaten Lima Puluh Kota Sumber : (Handika & Yusran, 2020)	Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif Kualitatif	Padang	Implementasi Program KOTAKU upaya mengatasi permasalahan kumuh di kabupaten limapuluh kota.	Penelitian ini Implementasi program kotaku di Nagari Piobang dalam aspek tertentu telah dilaksanakan tetapi, pada aspek lainnya belum optimal. Misalnya, akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar pada kawasan kumuh belum terbangun sebagaimana mestinya. Hal ini, karena masih terbatasnya sarana dan prasarana pengolahan persampahan. Belum tersedianya tempat sampah dengan pemilihan sampah pada skala domestik rumah tangga, serta bak pembuangan sampah. Kemudian, drainase lingkungan masih berupa galian tanah. Akibatnya, drainase tersebut tidak mampu mengalirkan limbah air hujan sehingga menimbulkan genangan
5	Penanganan Kawasan Permasalahan Kumuh di Kota Cilegon Sumber (Ridwan et al., 2019)	Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif Kualitatif	Cilegon	Penanganan kawasan permasalahan kumuh yang terletak di kota cilegon.	Penelitian ini Menyikapi permasalahan permasalahan kumuh di Kota Cilegon, Pemerintah Daerah Kota Cilegon sejauh ini tengah berupaya melakukan penanganan kawasan permasalahan kumuh melalui Dinas Perumahan dan Permukiman Rakyat (Perkim) Cilegon. Upaya penanganan berupa perbaikan jalan

No	Nama, Tahun/ Judul Peneliti	Metode Penelitian	Lokasi	Fokus	Hasil Penelitian
					lingkungan, Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), Saluran Lingkungan dan Air bersih. Penanganan Kawasan pemukiman kumuh sangat kompleks, terdapat beberapa permasalahan kawasan pemukiman kumuh yang tidak dapat ditangani oleh Dinas Pekuminan dan Perumahan Rakyat (Perkim) Kota Cilegon seperti masalah kesehatan penduduk, Sanitasi MCK, Air bersih perpipaan, pendidikan, persampahan serta kelengkapan faslitas sosial lainnya (Dinas Pemukiman dan Perumahan Rakyat (Perkim) Kota Cilegon (2017).
6	Evaluasi Pelaksanaan Program Kotaku (Kota Tanpa Kumuh) Di Kota Pekanbaru (Studi Kasus: Kelurahan Pesisir Kecamatan Limapuluh Kota Pekanbaru) Sumber (Joni, 2019)	peneliti menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif	Kecamatan lima puluh kota pekanbaru	Mengevaluasi pogrsm kotaku di kelurahan pesisir kota pekanbaru	Program KOTAKU (Kota tanpa kumuh di Kelurahan peisisir telah dibuat rencana pembangunan infrastruktur untuk MCK adalah 5 umit, sedangkan pada rencana tersebut pembangunan MCK yang terlaksana hanya dibangun 2 unit

No	Nama, Tahun/ Judul Peneliti	Metode Penelitian	Lokasi	Fokus	Hasil Penelitian
7	Implementasi Program Kotaku (Kota Tanpa Kumuh) Sebagai Model Pembangunan Infrastruktur Berbasis Masyarakat Di Kelurahan Negeri Olok Gading Kecamatan Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung Sumber : (Zulyanti, 2017)	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif.	Kelurahan negeri olok gading kecamatan teluk betung barat kota bandar lampung.	Mengimplementasi program kotaku sebagai model pembangunan berbasis masyarakat.	Hasil dari penelitian ini disimpulkan bahwa implementasi program KOTAKU telah melalui 4 tahap utama yaitu persiapan, perencanaan, pelaksanaan, dan tahap evaluasi. dari tiap-tiap tahap pelaksanaan program KOTAKU tidak seluruh masyarakat ikut terlibat didalamnya, masih terlalu dominan peran masyarakat dalam segala bentuk pelaksanaannya.
8	Evaluasi Tata Kelola Program Kota Tanpa Kumuh "Kotaku" Di Kota Makassar (Studi Kasus Kelurahan Parang Tambung) Sumber : (Irma, 2019)	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif	Kelurahan parang tabung kota Makassar	Mengevaluasi tata kelola program KOTAKU di kelurahan parang tambung.	Untuk masyarakat di kelurahan parang tambung masih kurangnya berpartisipasi, jadi Bagi masyarakat Kelurahan Parang Tambung diharapkan dapat berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan untuk mensukseskan program KOTAKU dalam mencapai sasaran dan tujuan. Sehingga manfaat dari program KOTAKU dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat bersama-sama

No	Nama, Tahun/ Judul Peneliti	Metode Penelitian	Lokasi	Fokus	Hasil Penelitian
9	Pengelolaan permukiman kumuh berkelanjutan di perkotaan Sumber : (Ervianto & Felasari, 2019)	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif.	Kota Yogyakarta	Mengelola permukiman kumuh berkelanjutan diperkotaan.	dari penelitian ini dapat dirumuskan karakteristik perumahan kumuh dan permukiman kumuh dari aspek fisik adalah sebagai berikut: (a) Merupakan satuan entitas perumahan dan permukiman. (b) Kondisi bangunan tidak memenuhi syarat, tidak teratur dan memiliki kepadatan tinggi. (c) Kondisi sarana dan prasarana tidak memenuhi syarat.
10	Faktor Prioritas Penyebab Kumuh Kawasan Permukiman Kumuh Di Kelurahan Belitung Selatan Kota Banjarmasin Sumber : (Wimardana, 2016)	Penelitian menggunakan penelitian kualitatif	Kelurahan belitung selatan kota banjarmasin.	Faktor prioritas penyebab kumuh dikawasan permukiman kumuh	Kawasan permukiman kumuh Kelurahan Belitung Selatan memiliki tingkat kepadatan bangunan yang merata pada seluruh kawasan permukiman kumuh. Tingkat kepadatan tertinggi terdapat di RT.06 sebesar 10.26 Unit/Ha, sedangkan tingkat kepadatan rata-rata bangunan di perkampungan Kelurahan Belitung Selatan sebesar 72.84 unit/Ha. Angka tersebut memiliki arti bahwa secara umum, Kelurahan Belitung Selatan memiliki tingkat kepadatan bangunan yang sedang. Meningkatnya kebutuhan penduduk terhadap kepemilikan rumah tidak sejalan dengan ketersediaan lahan yang diperuntukkan bagi permukiman masyarakat. Hal itu ditambah pula dengan semakin mahalnya harga lahan di wilayah perkotaan Kota Banjarmasin.
11	Penataan Permukiman	Penelitian menggunakan	Kelurahan Talang	Penataan permukiman	bangunan tidak tentu satu

No	Nama, Tahun/ Judul Peneliti	Metode Penelitian	Lokasi	Fokus	Hasil Penelitian
	n Kumuh di Kelurahan Talang Putri Palembang Sumber : (Asnani et al., 2018)	n penelitian kuantitatif	Putri Kota Palembang	kumuh di Kelurahan Talang Putri	sama lain disebabkan masih adanya lahan kosong, rawa yang berada di daerah kelurahan Talang Putri tersebut. Tata letak bangunan yang tidak teratur dan tidak memperhatikan estetika yang ada serta tidak adanya pengelolaan sampah yang baik, hal ini terlihat dari banyaknya tumpukan sampah pada jalan lingkungan, menyebabkan kondisi permukiman menjadi terlihat kumuh.
12	Implementasi Program Kota tanpa Kumuh (Kotaku) di Kelurahan Kemang Agung Kecamatan Kertapati Kota Palembang Tahun 2017 Sumber : (Jannah & Mardiyanto, 2019)	Penelitian ini menggunakan metode campuran	Kelurahan Kemang Agung Kecamatan Kertapati Kota Palembang.	Mengimplementasikan program KOTAKU di Kelurahan Kemang Agung.	Program kotaku bagi masyarakat Kelurahan Kemang Agung ini memiliki perubahan, karena 89% masyarakat menjawab perubahan yang dirasakan masyarakat melalui perbaikan infrastruktur dalam Program NUSP-2 berubah, yang artinya pembangunan infrastruktur benar-benar dilaksanakan sesuai dengan RKM yang ada sehingga perubahan dari setiap infrastruktur yang dibangun benar-benar dirasakan masyarakat Kelurahan Kemang Agung yaitu sebagai upaya peningkatan kualitas kawasan atau lingkungan permukiman kumuh melalui pembangunan infrastruktur.

No	Nama, Tahun/ Judul Peneliti	Metode Penelitian	Lokasi	Fokus	Hasil Penelitian
13	Implementasi Strategi Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh Kota Palembang Di Kecamatan Seberang Ulu I Sumber : (Violeta, 2019)	Penelitian Ini Menggunakan Metode Kualitatif	Kecamatan Seberang Ulu 1 Kota Palembang	Mengimplementasi strategi permukiman kumuh di seberang Ulu 1.	Dalam mengatasi permasalahan kumuh, dinas PRKP tidak hanya melakukan upaya penanganan sendiri. Pemukiman kumuh sendiri memiliki kerjasama linier di bidang lain misalnya kesehatan lingkungan, tata ruang, peningkatan keswadayaan dan penelitian dari bidang akademisi dan lainnya.
14	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Terciptanya Kawasan Permukiman Kumuh Di Kawasan Pusat Kota (Studi Kasus: Kawasan Pancuran, Salatiga) Sumber : (Surtiani, 2006)	Penelitian Ini Menggunakan Metode Kualitatif	Kawasan Pancuran, Salatiga Kota Semarang,	Faktor-faktor mempengaruhi terciptanya kawasan permukiman kumuh.	Kebanyakan kaum urbanis yang datang adalah mereka yang ingin berjualan di pasar dan sebagian besar mereka dari golongan ekonomi menengah ke bawah. Mereka mencari tempat tinggal di sekitar kawasan pusat perdagangan ini. Permukiman yang paling dekat dengan pusat perdagangan ini yaitu kawasan permukiman Pancuran. Selain itu perkembangan jumlah hunian di kawasan Pancuran ini kurang diimbangi oleh ketersediaan lahan, sehingga untuk menambah jumlah hunian mereka cenderung mengabaikan aturan-aturan dasar tentang pengadaan bangunan rumah. Bahkan mereka menggunakan sebagian badan jalan untuk didirikan bangunan untuk 3 pengembangan tempat tinggal maupun usahanya yang menyebabkan

No	Nama, Tahun/ Judul Peneliti	Metode Penelitian	Lokasi	Fokus	Hasil Penelitian
					permukiman tersebut menjadi kumuh .
15	Perencanaan Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh (Studi Penentuan Kawasan Prioritas untuk Peningkatan Kualitas Infrastruktur pada Kawasan Pemukiman Kumuh di Kota Malang) Sumber : (Wijaya, 2016)	Penelitian Ini Menggunakan Metode Kualitatif	Kota Malang	Perencanaan penanganan kawasan permukiman kumuh di Kota Malang.	Identifikasi kondisikekumuhan pada kawasan permukiman kumuh di kelurahan-kelurahan yang menjadi objek penelitian dilakukan dengan memberikan penilaian (scoring) pada variabel, indikator dan item yang telah ditentukan sebelumnya, yaitu pada Infrastruktur yang meliputi: (1) kondisi Jalan Lingkungan; (2) kondisi Penyediaan Air Minum; (3) kondisi Drainase Lingkungan;(4) kondisi Pengelolaan Air Limbah; (5) Kondisi Pengelolaan Sampah; dan (6)Kondisi Proteksi Kebakaran. Sedangkan variabel Status Lahan dan variabel Kepadatan Penduduk.

Sumber : Olah data Peneliti, 2023

Dari tabel diatas adalah penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini. Dari penelitian terhadulu diatas yang berkaitan dengan Evaluasi Penanganan Permukiman kumuh studi kasus program KOTAKU yang telah dilaksanakan di Indonesia dengan lokus penelitian dan metode penelitian yang bervariasi, supaya dapat mengetahui celah yang terdapat pada penelitian terdahulu dapat dijabarkan pada uraian dibawah, sebagai berikut:

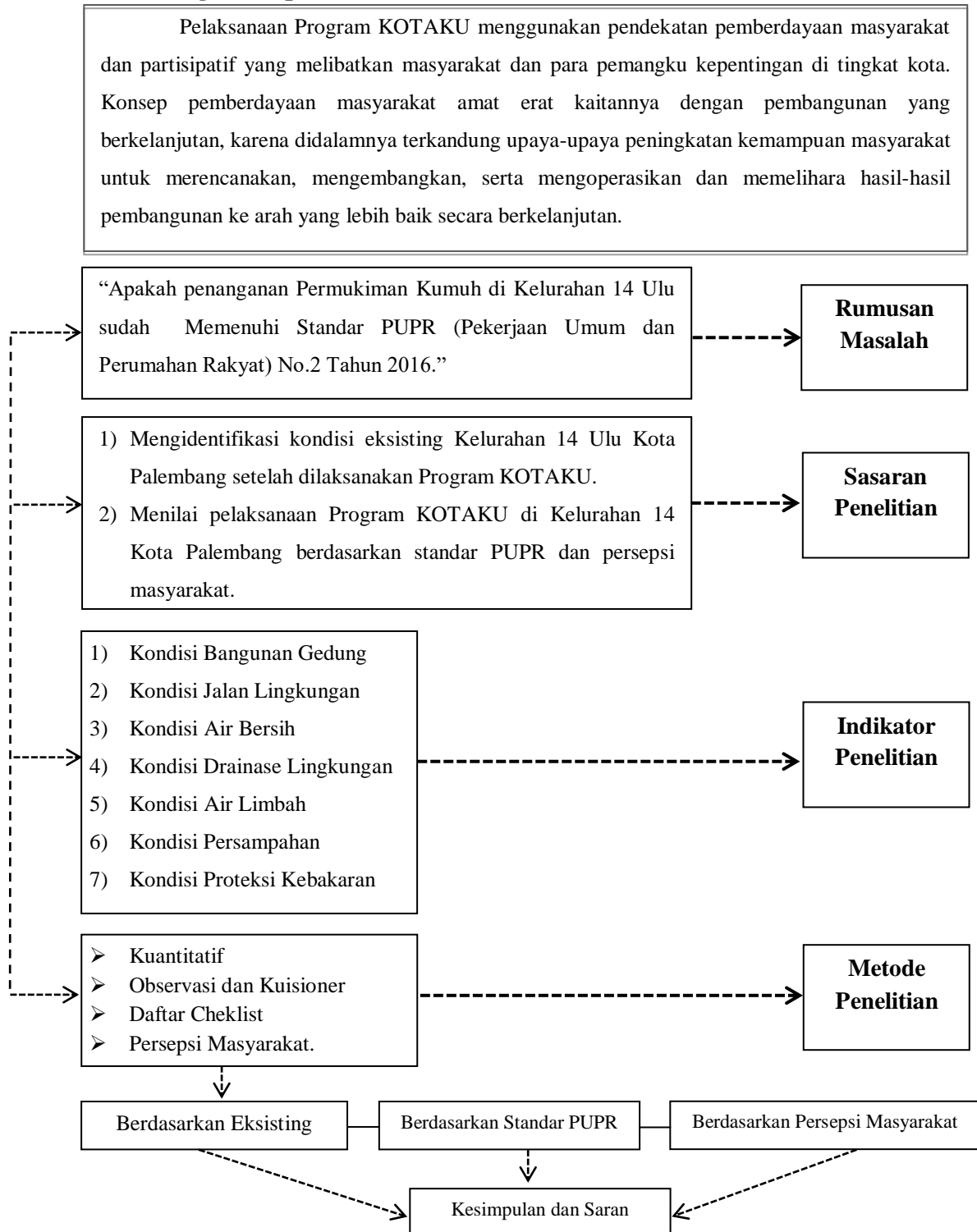
- a. Untuk lokasi penelitian pada penelitian terdahulu didominasi oleh permukiman skala kelurahan maupun kecamatan, ada juga beberapa yang skala kota. untuk beberapa perbedaan dari penelitian ini ialah penelitian hanya berfokus pada skala kelurahan tidak seperti penelitian sebelumnya yang berskala kecamatan maupun kota.

- b. Untuk fokus penelitian, penelitian terdahulu ada yang memfokuskan kepada penanganan permukiman kumuh studi kasus program KOTAKU dengan berbagai fokus seperti implementasi, pengelolaan, penataan, dan lain sebagainya. Dan untuk perbedaan dari penelitian terdahulu yaitu implementasi program KOTAKU upaya mengatasi permukiman kumuh di kabupaten lima puluh. Yang mana lokasi di dua penelitian tersebut sebagai perbandingan permukiman kumuh.
- c. Untuk keaslian penelitian diatas, bahwa banyak sekali metode yang digunakan seperti metode kualitatif, metode kuantitatif, dan metode campuran dengan berbagai pendekatan. Ada beberapa perbedaan dari jurnal keaslian penelitian terdahulu yang menggunakan metode kuantitatif dan metode campuran karena penelitian ini menggunakan hanya metode kualitatif yang hanya menggunakan observasi lapangan, wawancara, dan dokumentasi yang mana akan sangat tidak bila relevan jika menggunakan metode campuran.

Berdasarkan penjelasan di atas, bisa disimpulkan bahwa dari perbedaan atau celah yang berkaitan dengan evaluasi penanganan permukiman kumuh studi kasus program KOTAKU. Hal ini bisa ditinjau dari lokasi penelitian, fokus penelitian dan metode penelitian yang dilakukan penelitian ini, pada hasil penelitian Evaluasi Penanganan Permukiman Kumuh Kasus Program KOTAKU di Kelurahan 14 ulu Kota Palembang secara tidak langsung menjawab atas permasalahan yang terjadi bahwasanya Program KOTAKU sudah menangani 100% permukiman kumuh di Kota Palembang yang dengan standar yang ditentukan.

Secara tidak langsung penelitian ini memperkaya pikiran baik secara hasil penelitian teori, dan konsep yang bisa diambil melalui studi kasus pada jurnal terdahulu baik itu dari lokasi penelitian, fokus penelitian dan metode penelitian. Dengan demikian, bahwa dari penelitian untuk lokasi penelitian, fokus penelitian dan metode penelitian ini belum banyak dilakukan pada penelitian-penelitian sebelumnya.

1.7 Kerangka Berpikir



Sumber : Olah data Peneliti, 2023

Gambar 1.3
Kerangka Berfikir Penelitian

1.8 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan yang digunakan dalam tugas akhir (TA) ini sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisikan tentang latar belakang, rumusan masalah, sasaran penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup wilayah dan substansi penelitian, keaslian penelitian, kerangka berfikir, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini tinjauan pustaka ini berisikan tentang literature yang digunakan dalam penyusunan tugas akhir, yang mana isinya berbagai bentuk teori yang berkaitan dengan tema atau judul yang diangkat yaitu mengidentifikasi wilayah permukiman kumuh dan analisis persepsi masyarakat.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang metodologi penelitian yang terdiri dari pendekatan penelitian, teknik sampel dan populasi, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, metode analisis serta desain survey lapangan.

BAB IV GAMBAR UMUM WILAYAH

Pada bab ini menjelaskan tentang gambaran umum wilayah yang berisi letak geografis, batas wilayah, kependudukan masyarakat kelurahan 14 ulu, serta gambaran umum wilayah objek penelitian.

BAB V PEMBAHASAN

Pada bab ini hasil memuat pembahasan mengenai kegiatan penelitian yang meliputi proses penelitian, identifikasi dan analisis yang kemudian diakhiri dengan hasil temuan dari penelitian yang telah dilakukan.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini menjelaskan mengenai kesimpulan dan saran dari hasil keseluruhan pembahasan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Perumahan dan Permukiman Kumuh

2.1.1 Pengertian Permukiman dan Kawasan Permukiman

Pembangunan di bidang yang berhubungan dengan tempat tinggal beserta sarana dan prasarannya memang perlu mendapatkan prioritas mengingat tempat tinggal merupakan salah satu kebutuhan dasar (*basic need*) manusia. Sudah selayaknya apabila untuk membangun perumahan dan permukiman itu pemerintah mengeluarkan peraturan perundang-undangan tentang perumahan dan permukiman dimaksudkan untuk memberikan arahan (*guide line*) bagi pembangunan sektor perumahan dan permukiman. Undang-undang No.4 Tahun 1992 tentang perumahan dan permukiman adalah salah satu landasan yang digunakan oleh pemerintah yaitu untuk meningkatkan peran kelembagaan dalam pembangunan perumahan dan permukiman. Undang-undang ini menyebutkan bahwa perumahan berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana lingkungan, sedangkan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan hutan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun kawasan pedesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dijelaskan bahwa Permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat, sedangkan Perumahan Kumuh adalah perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian. Menurut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 membuat target nasional pada Sektor Perumahan dan Permukiman yang dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN

tahun 2015-2019 yaitu: Pengentasan Permukiman Kumuh Perkotaan menjadi 0 ha. Tercapainya 100% pelayanan air minum bagi seluruh penduduk Indonesia dan meningkatnya akses penduduk terhadap sanitasi layak menjadi 100% pada tingkat kebutuhan dasar hingga tahun 2019 (Kamil, 2018).

Sesuai dengan Permen PUPR No. 14 tahun 2018 Tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, yang terdiri dari 7 aspek yaitu: Kondisi Bangunan Gedung, Kondisi Jalan Lingkungan, Penyediaan Air Minum, Drainase Lingkungan, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan Persampahan, dan Keamanan (Protektif) Kebakaran.

2.1.2 Permukiman Kumuh

Kumuh adalah kesan atau gambaran secara umum tentang sikap dan tingkah laku yang rendah dilihat dari standar hidup dan penghasilan kelas menengah. Dengan kata lain, kumuh dapat diartikan sebagai tanda atau cap yang diberikan golongan atas yang sudah mapan kepada golongan bawah yang belum mapan. Kumuh dapat ditempatkan sebagai sebab dan dapat pula ditempatkan sebagai akibat. Ditempatkan di mana pun juga, kata kumuh tetap menjurus pada suatu hal yang bersifat negatif menurut Clinard dalam (Budihardjo, 1997) perumahan kumuh dapat dapat ditinjau dari:

a) Sebab Kumuh

Menurut Budiaharjo (1984) dimana kumuh adalah kemunduran atau kerusakan lingkungan hidup dilihat dari:

1. Segi fisik yaitu gangguan yang yang timbul oleh unsur-unsur alam seperti air dan udara.
2. Segi masyarakat/sosial, yaitu gangguan yang ditimbulkan oleh manusia sendiri seperti kepadatan lalu lintas, sampah.

b) Akibat Kumuh

Menurut (Budihardjo, 1997) Kumuh adalah akibat perkembangan dari gejala-gejala antara lain yaitu:

1. Kondisi perumahan yang buruk,
2. Penduduk yang terlalu padat,

3. Fasilitas lingkungan yang kurang memadai,
4. Tingkah laku menyimpang,
5. Budaya kumuh,
6. Apati dan isolasi,

Menurut (Putro, 2011) Kawasan kumuh adalah kawasan dimana rumah dan kondisi hunian masyarakat di kawasan tersebut sangat buruk. Rumah maupun sarana dan prasarana tidak sesuai dengan standar yang berlaku, baik standar kebutuhan, kepadatan bangunan, persyaratan rumah sehat, kebutuhan sarana air bersih, sanitasi maupun persyaratan kelengkapan prasarana jalan, ruang terbuka serta, kelengkapan fasilitas sosial lainnya. Menurut (Putro, 2011) Adapun ciri-ciri kumuh, adalah:

- a) Fasilitas umum yang kondisinya kurang atau tidak memadai.
- b) Kondisi hunian rumah dan permukiman serta penggunaan ruang-ruangnya mencerminkan penghuninya yang kurang mampu atau miskin.
- c) Adanya tingkat frekuensi dan kepadatan volume yang tinggi dalam penggunaan ruang-ruang yang ada di permukiman kumuh sehingga mencerminkan adanya kesemrawutan tata ruang dan ketidak berdayaan ekonomi penghuninya
- d) Permukiman kumuh merupakan suatu satuan-satuan komunitas yang hidup secara tersendiri dengan batas-batas kebudayaan dan sosial yang jelas, yaitu terwujud sebagai: sebuah komunitas tunggal, berada di tanah milik negara, dan karena itu dapat digolongkan sebagai hunian liar, satuan komunitas tunggal yang merupakan bagian dari sebuah RT atau sebuah RW, sebuah satuan komunitas tunggal yang terwujud sebagai sebuah Kelurahan, dan bukan hunian liar.
- e) Penghuni permukiman kumuh secara sosial dan ekonomi tidak homogen, warganya mempunyai mata pencaharian dan tingkat kepadatan beranekaragam, begitu juga asal muasalnya. Dalam masyarakat permukiman kumuh juga dikenal adanya pelapisan sosial berdasarkan atas kemampuan ekonomi mereka yang berbeda-beda tersebut.

- f) Sebagian besar penghuni permukiman kumuh adalah mereka yang bekerja di sektor informal atau mempunyai mata pencaharian tambahan di sektor informal.

2.2 Persepsi

Thoha (Rakhmat, 2009:140) berpendapat bahwa persepsi adalah proses dimana seseorang menerima, menguji dan merespon panca indera untuk mempelajari tentang objek yang ingin diketahui bisa berarti bayangan. Persepsi meliputi perasaan, suatu sifat adalah kemampuan untuk berpikir dan kemudian mengalami persepsi individu, meskipun kemampuan masing-masing individu tidak sama memungkinkan untuk mendiskusikan hasil dan menginterpretasikan informasi pesannya juga beda.

Persepsi adalah proses yang melibatkan manusia mengatur dan menafsirkan kesan sensorik mereka memberikan arti bagi lingkungannya. Proses identifikasi sedang berlangsung setiap saat, yaitu pada saat seseorang menerima rangsangan sendiri melalui indra. Organ indera adalah penghubungnya antara individu dan dunia luar. Pemahaman ini penting dalam pengajaran perilaku organisasi karena perilaku orang didasarkan pada persepsi mereka yang berbicara tentang realitas dan mereka yang tidak realitas itu sendiri (Walgito, 2010:99).

Berdasarkan beberapa definisi pengamatan para ahli tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa persepsi adalah sesuatu yang bisa mempengaruhi perkembangan penglihatan orang yang baik sadar atau tidak sadar. Jadi ada kalanya sulit bagi seseorang dalam pembentukan posisi yang dipengaruhi olehnya berdasarkan pengalaman, diri sendiri dan faktor eksternal dan internal, serta media massa.

2.2.1 Faktor Internal

Faktor internal yang mampu mempengaruhi persepsi seseorang, yakni faktor-faktor yang terdapat dalam diri individu itu sendiri, yang akan mencakup beberapa hal antara lain (Walgito, 2004:101):

- a) Fisiologis, di mana informasi yang masuk melalui alat indera dalam diri manusia, dan selanjutnya informasi yang diterima mampu mempengaruhi serta melengkapi usaha-usaha untuk memberikan suatu arti terhadap lingkungan sekitarnya. Dengan kapasitas indera dalam mempersepsi pada setiap orang pun berbeda-beda sehingga dapat diinterpretasikan terhadap lingkungan pun dapat berbeda.
- b) Perhatian, di mana individu yang memerlukan sejumlah energi untuk dikeluarkan dengan memperhatikan atau memfokuskan dalam bentuk fisik dan fasilitas mental yang ada dalam suatu obyek. Karena energi yang dimiliki setiap orang berbeda-beda sehingga untuk memperhatikan seseorang terhadap obyek juga berbeda serta dalam hal ini dapat mempengaruhi persepsi terhadap suatu obyek yang akan diteliti.
- c) Minat persepsi terhadap suatu obyek bervariasi tergantung pada seberapa banyak energi atau perseptual *vigilance* yang digerakkan untuk mempersepsi. *Perseptual vigilance* merupakan kecenderungan seseorang untuk memperhatikan tipe tertentu dari stimulus atau dapat dikatakan sebagai minat.
- d) Suasana hati, di mana dengan sesuai keadaan emosi mempengaruhi perilaku seseorang, suasana hati ini menunjukkan bagaimana perasaan seseorang pada waktu yang dapat mempengaruhi bagaimana seseorang dalam menerima, bereaksi dan mengingat.

2.2.2 Faktor Eksternal

Faktor eksternal yang akan mempengaruhi persepsi seseorang, di mana dalam karakteristik serta lingkungannya dan obyek-obyek yang akan terlibat didalamnya. Sehingga elemen-elemen yang disampaikan tersebut dapat mengubah sudut pandang seseorang terhadap dunia maupun sekitarnya serta mampu mempengaruhi bagaimana seseorang merasakan ataupun menerimanya (Walgito, 2004:89):

- a) Ukuran dan penempatan dari obyek atau stimulus, dalam hal tersebut faktor ini menyebutkan bahwa semakin besarnya hubungan dalam suatu

obyek, maka akan semakin mudah untuk dipahami seseorang. Karena bentuk ini menandakan adanya pengaruh terhadap persepsi setiap individu serta dengan melihat bentuk dari ukuran suatu obyek individu yang mudah untuk diperhatikan pada setiap gilirannya untuk membentuk persepsi.

- b) Keunikan serta kekontrasan stimulus, di mana stimulus yang berada di luar akan menampilkan latar belakang serta sekelilingnya yang sama sekali di luar dugaan oleh setiap individu yang lain yang akan banyak menarik perhatian seseorang.
- c) Intensitas dan kekuatan dari stimulus itu, di mana stimulus dari luar akan memberi makna yang lebih bila sering diperhatikan dibandingkan dengan yang hanya sekali dilihat saja. Kekuatan yang berasal dari stimulus adalah daya tarik dari suatu obyek yang mampu mempengaruhi persepsi.

2.3 Pengertian Masyarakat

Masyarakat adalah menggunakan kata bahasa Inggris, masyarakat yang memiliki arti kata latin yaitu *socius* (teman). di dalam istilah komunitas berasal dari kata arab syaraka yang berarti adalah (partisipasi dan partisipasi). Masyarakat adalah sekelompok orang yang setuju secara ilmiah berkomunikasi satu sama lain. Dimana objeknya orang mendapatkan infrastruktur melalui warganya sehingga mereka bisa berkomunikasi satu sama lain (Koentjaraningrat, 2009: 115-118).

Masyarakat merupakan kesatuan hidup dalam kumpulan manusia yang saling berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu di mana masyarakat itu memiliki sifat yang terus berlanjut, serta yang terikat oleh suatu rasa identitas kebersamaan. Kontinuitas adalah kesatuan masyarakat yang memiliki empat ciri seperti: a) Interaksi antar warga masyarakat, b) Adat istiadatnya, c) Kontinuitas waktu yang berlanjut terus menerus, dan d) Rasa identitas yang kuat dalam mengikat semua warga.

Dalam masyarakat modern sekarang ini, dapat dibedakan antara masyarakat pedesaan maupun masyarakat perkotaan, pada hakikatnya hal tersebut bersifat gradual artinya bertahap. Dimana masyarakat pedesaan yang mempunyai kedekatan yang lebih erat dan lebih mendalam dengan masyarakat yang lain

dibandingkan dengan masyarakat perkotaan yang lebih cenderung memikirkan kepentingan secara individu. Biasanya masyarakat pedesaan hidup berkelompok atas dasar dari sistem kekeluargaan. Dengan mata pencaharian pada umumnya ialah petani ataupun buruh. Masyarakat perkotaan merupakan masyarakat yang tidak tertentu dalam jumlah penduduknya. Dalam masyarakat pedesaan ataupun perkotaan perlu dalam perhatian yang khusus terhadap kebutuhan hidupnya. Dari segi mana pun gaya hidup antara masyarakat-masyarakat pedesaan ataupun perkotaan berbeda dengan segala penampilan ataupun penyajian penyajian lainnya (Soekanto, 2012: 132-136).

Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa masyarakat merupakan suatu kesatuan ataupun kumpulan dalam suatu kehidupan untuk mencapai kepentingan bersama. Sehingga, akan terjalinnya suatu bentuk interaksi dengan adanya perilaku yang secara berkelanjutan.

2.4 Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh)

Program penanggulangan kemiskinan telah berjalan sejak tahun 1999 dengan nama Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) yang bertujuan untuk mengatasi krisis ekonomi dengan meningkatkan kapasitas masyarakat untuk menjadi pelaku pembangunan melalui pembentukan kelembagaan masyarakat yang representatif, mengakar dan akuntabel. Pada tahun 2007, program tersebut berkembang menjadi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP) yang mengacu kepada tridaya yaitu sosial, ekonomi dan infrastruktur (Program KOTAKU,2021).

Dalam RPJMN 2015-2019 disebutkan bahwa salah satu sasaran pembangunan kawasan permukiman adalah tercapainya pengentasan permukiman kumuh perkotaan menjadi 0 (nol) hektar melalui penanganan kawasan permukiman kumuh. Untuk itu, seluruh program yang menjadi tugas pokok dan fungsi Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya (DJCK) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen. PUPR) saat ini tengah difokuskan untuk mewujudkan permukiman yang layak huni tanpa mengusur (Program KOTAKU,2021).

Program KOTAKU adalah program yang dilaksanakan secara nasional di 271 kota/kabupaten di 34 provinsi yang diselenggarakan dengan mengintegrasikan berbagai sumber daya dan sumber pendanaan, termasuk dari pemerintah pusat, provinsi, kota/kabupaten, pihak donor, swasta, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya. Program KOTAKU bermaksud untuk membangun sistem yang terpadu dalam penanganan kawasan kumuh, dimana pemerintah daerah memimpin dan berkolaborasi dengan para pemangku kepentingan dalam perencanaan maupun implementasinya dengan mengedepankan partisipasi masyarakat. Program ini diharapkan menjadi “*platform kolaborasi*” yang mendukung penanganan kawasan permukiman kumuh seluas 35.291 Ha yang dilakukan secara bertahap di seluruh Indonesia melalui pengembangan kapasitas pemerintah daerah dan masyarakat, penguatan kelembagaan, perencanaan perbaikan infrastruktur dan pelayanan dasar di tingkat kota maupun masyarakat, serta pendampingan teknis (Program KOTAKU,2021).

Kegiatan yang dilakukan dalam program KOTAKU terkait dengan pembangunan sarana dan prasarana lingkungan/infrastruktur dalam pembangunan tersebut harus bermanfaat langsung dalam penanggulangan lingkungan kumuh yang ada pada daerah-daerah kota. Dalam pelaksanaan kegiatan lingkungan ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Selain memanfaatkan dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) sebagai dana stimulan, kegiatan lingkungan perlu didukung dengan swadaya masyarakat dan APBD (Program KOTAKU,2021).

Swadaya yang diberikan tidak hanya berbentuk dana. Tenaga, konsumsi, lahan atau bahan bangunan juga merupakan bentuk swadaya yang bisa diberikan masyarakat. Partisipasi aktif masyarakat ini harus sudah ada sejak proses persiapan, pelaksanaan, pemanfaatan serta pemeliharaan. Keswadayaan mutlak dibutuhkan dalam proses pembangunan lingkungan agar rasa memiliki masyarakat menjadi tinggi (Program KOTAKU,2021).

2.4.1 Tujuan Program KOTAKU

Tujuan program KOTAKU adalah untuk meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di kawasan kumuh perkotaan dalam rangka

mendukung terwujudnya permukiman perkotaan yang layak huni, produktif dan berkelanjutan, dengan indikator sebagai berikut (Program KOTAKU, 2021):

1. Menurunnya luas kawasan permukiman kumuh menjadi 0 Ha.
2. Terbentuknya Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (Pokja PKP) di tingkat kabupaten/kota dalam penanganan kumuh yang berfungsi dengan baik.
3. Tersusunnya rencana penanganan kumuh tingkat kota/kabupaten dan tingkat masyarakat yang terlembagakan melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
4. Meningkatnya penghasilan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) melalui penyediaan infrastruktur dan kegiatan peningkatan penghidupan masyarakat untuk mendukung pencegahan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh.
5. Terlaksananya aturan bersama sebagai upaya perubahan perilaku hidup bersih dan sehat masyarakat dan pencegahan kumuh

2.4.2 Strategi Operasional

Strategi operasional dalam penyelenggaraan program KOTAKU adalah sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan penanganan kumuh melalui pencegahan kumuh dan peningkatan kualitas kumuh.
2. Meningkatkan kapasitas dan mengembangkan kelembagaan yang mampu berkolaborasi dan membangun jejaring penanganan kumuh mulai dari tingkat pusat sampai ke tingkat masyarakat.
3. Menerapkan perencanaan partisipatif dan penganggaran yang terintegrasi dengan multi-sektor dan multi-aktor.
4. Memastikan rencana penanganan kumuh dimasukkan dalam agenda RPJM Daerah dan perencanaan formal lainnya.
5. Memfasilitasi kolaborasi dalam pemanfaatan produk data dan rencana yang sudah ada, termasuk dalam penyepakatan data dasar (*baseline*)

permukiman yang akan dijadikan pegangan bersama dalam perencanaan dan pengendalian.

6. Meningkatkan akses terhadap pelayanan dasar lingkungan yang terpadu dengan sistem kota, mengembangkan perekonomian lokal sebagai sarana peningkatan penghidupan berkelanjutan
7. Advokasi kepastian bermukim bagi masyarakat berpenghasilan rendah kepada semua pelaku kunci.
8. Memfasilitasi perubahan sikap dan perilaku pemangku kepentingan dalam menjaga lingkungan permukiman agar layak huni dan berkelanjutan.

Pemberdayaan masyarakat melalui program KOTAKU yang diberikan oleh pemerintah berupa pembangunan infrastruktur berbasis masyarakat, untuk itu masyarakat dilibatkan secara aktif melihat permasalahan yang sedang terjadi. Keterlibatan masyarakat dalam program KOTAKU sangat penting dalam menunjang kelancaran pembangunan, masyarakat di libatkan secara aktif dimulai dari tahap persiapan, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi serta sampai pemanfaatan dan pemeliharaan pembangunan (Program KOTAKU,2021).

2.4.3 Prinsip Pelaksanaan

Prinsip dasar yang diterapkan dalam pelaksanaan Program KOTAKU adalah :

1. Pemerintah daerah sebagai nahkoda, dalam artian memimpin dan menggerakkan kegiatan penanganan permukiman kumuh.
2. Perencanaan komprehensif dan berorientasi *outcome* (pencapaian tujuan program) terciptanya permukiman layak huni sesuai visi kabupaten/kota
3. Sinkronisasi perencanaan dan penganggaran yang tercermin dalam RPJMD
4. Pembangunan partisipatif dengan memadukan perencanaan dari atas (*topdown*) dan dari bawah (*bottom-up*).
5. Prinsip kreatif dan inovatif dalam penanganan permukiman kumuh adalah upaya untuk selalu mengembangkan ide-ide dan cara-cara baru dalam melihat masalah dan peluang, yang sangat dibutuhkan dalam penanganan kumuh

2.4.4 Pola Penanganan

Sesuai dengan tujuan program, penanganan permukiman kumuh yang dimaksud dalam Program KOTAKU tidak hanya mengatasi kekumuhan yang sudah ada, namun juga untuk mencegah tumbuhnya kekumuhan baru. Cakupan kerja penanganan kumuh dalam Program KOTAKU berdasarkan kondisi kualitas permukiman yang ada dapat dibedakan menjadi tiga pola penanganan, yang mengacu kepada Undang-Undang Nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, yaitu:

1. Pencegahan, meliputi pengelolaan dan pemeliharaan kualitas perumahan dan permukiman, serta dengan pencegahan tumbuh dan berkembangnya perumahan dan permukiman kumuh baru.
2. Peningkatan kualitas, yang dilaksanakan melalui pola-pola penanganan antara lain pemugaran, peremajaan, dan permukiman kembali.
3. Pengelolaan, yang dilakukan untuk mempertahankan dan menjaga kualitas perumahan dan permukiman secara berkelanjutan oleh masyarakat secara swadaya dan dengan difasilitasi oleh pemerintah daerah baik dukungan pendanaan untuk pemeliharaan maupun penguatan kapasitas masyarakat untuk melaksanakan pengelolaan.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Metode yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah metode penelitian kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif merupakan salah satu jenis penelitian yang spesifikasinya adalah sistematis, terencana dan terstruktur dengan jelas sejak awal hingga pembuatan desain penelitiannya. Metode penelitian kuantitatif, sebagaimana dikemukakan oleh Sugiyono (2011: 8) yaitu : “Metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *positivisme*, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan”

Pengumpulan data yang dilakukan peneliti lebih menekankan kepada situasi guna menemukan, memahami, menjelaskan dan memperoleh gambaran tentang bagaimana Mengidentifikasi wilayah permukiman kumuh dan Analisis persepsi masyarakat diKelurahan 14 Ulu. Data yang dikumpulkan adalah ada identifikasi wilayah permukiman kumuh dan Analisis persepsi masyarakat diKelurahan 14 Ulu sudah sesuai dengan standar PUPR No.2 Tahun 2016.

3.2 Populasi Dan Sampel

3.2.1 Teknik Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2017). Untuk menyimpulkan atau menggambarkan populasi, pemilihan sampel dengan metode yang tepat dapat menggambarkan kondisi populasi yang akurat, dan dapat menghemat biaya penelitian secara efektif. Dalam penelitian ini menggunakan rumus Slovin sebagai berikut :

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2}$$

Keterangan :

n : Jumlah Sampel

N : Jumlah Populasi

e^2 : persen kelonggaran ketidakteelitian karena kesalahan pengambilan sampel yang masih dapat ditolelir atau diinginkan adalah (10%).

Mengutip jurnal Universitas Muhammadiyah surakarta, dalam rumus slovin ada ketentuan, bisa dilihat sebagai berikut :

Nilai $e = 0,1$ (10%) untuk populasi dalam jumlah besar, sedangkan

Nilai $e = 0,2$ (20%) untuk populasi dalam jumlah kecil.

Jika dilihat nilai Nilai $e = 0,1$ (10%) untuk populasi dalam jumlah besar. Dan dilihat jumlah populasi dalam penelitian ini adalah 11798 warga kelurahan 14 Ulu Palembang dan itu termasuk kedalam populasi jumlah besar sehingga persentase kelonggaran yang digunakan adalah 10% dan hasil perhitungan dapat dibulatkan untuk mencapai kesesuaian. Maka untuk mengetahui sampel penelitian, dengan perhitungan sebagai berikut:

$$n = \frac{11798}{1 + 11798 \cdot 0,1^2} = 99,16 = 100$$

Berdasarkan perhitungan menggunakan rumus slovin diketahui bahwa dengan jumlah populasi 11798 warga di 14 Ulu sampel yang diperoleh adalah 99,16 dengan tingkat persisi (10%) dan dibulatkan menjadi 100 sampel penelitian.

3.2.2 Teknik Sampling

Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Non-probability* sampling adalah teknik pengambilan sampel dengan cara sampel diambil tidak secara acak. Unsur populasi yang terpilih menjadi sampel dapat diperoleh karena kebetulan atau karena ada faktor lain yang sebelumnya sudah direncanakan. Pengambilan sampel dengan cara *non-probability* sampling tidak dapat dilanjutkan sampai membuat suatu kesimpulan tentang populasi. Hal ini disebabkan pengambilan sampelnya tidak dilakukan secara acak. Beberapa

macam cara pengambilan sampel yang dilakukan berdasarkan *non-probability* sampling antara lain:

- a) *Purposive Sampling*,
- b) *Accidental Sampling*,
- c) *Quota Sampling*,
- d) *Saturation Sampling*,
- e) *Snowball Sampling*.

Berdasarkan teknik sampling diatas peneliti memilih teknik sampling *accidental sampling* yaitu teknik pengambilan sampel dengan cara memilih siapa yang kebetulan dijumpai. Dengan demikian *accidental sampling* berdasar pada faktor spontanitas, artinya siapa saja yang tidak sengaja bertemu dengan peneliti dan sesuai dengan karakteristik maka orang tersebut dapat dijadikan sebagai sampel (responden). Pengambilan sampel dengan teknik *accidental sampling* disebut juga dengan istilah *convenience sampling* atau *incidental sampling*. *Convenience* mengandung arti mudah atau nyaman atau tidak memberikan kesulitan. Dengan demikian *convenience sampling* mengandung arti pengambilan sampel dapat dilakukan dengan mudah dan nyaman tanpa mendapatkan kesulitan. Sehingga peneliti tidak meneliti secara keseluruhan dari warga kelurahan 14 Ulu melainkan cukup berdasarkan banyaknya sampel dari warga setiap RT dan RW di Kelurahan 14 Ulu Palembang.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini mengidentifikasi wilayah permukiman kumuh dan Analisis persepsi masyarakat di Kelurahan 14 Ulu Kota Palembang, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut.

3.3.1 Teknik Pengumpulan Data Primer

Data primer yang dibutuhkan dalam penelitian ini yang Mengidentifikasi wilayah permukiman kumuh dan Analisis persepsi masyarakat di Kelurahan 14 Ulu. Dalam hal ini teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara :

a. Observasi

Observasi yaitu suatu cara pengumpulan data dengan mengadakan pengamatan dan pencatatan terhadap penghambat yang terkait dalam penelitian mengidentifikasi wilayah permukiman kumuh dan analisis persepsi masyarakat di Kelurahan 14 Ulu dengan melihat langsung kelapangan untuk dispasialkan guna membuktikan situasi nyata dengan sekunder yang diperoleh. Melalui tahap observasi ini peneliti ingin menggali lebih dalam data yang mengenai permukiman kumuh di Kelurahan 14 Ulu Kota Palembang.

Tabel 3.1
Pedoman Observasi

NO.	Sasaran	Pedoman Observasi
1.	Identifikasi kondisi wilayah permukiman kumuh di kelurahan 14 ulu Kota Palembang.	1. Bangunan gedung di Kelurahan 14 ulu 2. Jalan lingkungan. 3. Penyediaan air bersih 4. Drainase lingkungan
2.	Mengidentifikasi wilayah di Kelurahan 14 Kota Palembang berdasarkan standar PUPR dan persepsi masyarakat.	5. Pengelolaan air limbah 6. Pengelolahan persampahan atau TPA/TPS. 7. Proteksi kebakaran.

Sumber : olah data, 2023

b. Kuisisioner

Peneliti menggunakan salah satu teknik pengumpulan data berupa kuisisioner. Menurut Sugiyono, (2017) berpendapat bahwa kuisisioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. Dalam penelitian ini kuisisioner dibagikan kepada masyarakat sebagai respon di Kelurahan 14 Ulu Kota Palembang. Desain kuisisioner dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 3.2
Bobot Persepsi Setiap Atribut

Persepsi	Bobot
Sangat Baik (SB)	5
Baik (B)	4
Cukup (C)	3
Buruk (BR)	2
Sangat Buruk (SBR)	1

Sumber : olah data, 2023

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu metode yang mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, buku, transkrip, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda, dan sebagainya (Arikunto, 2002:149). Metode dokumentasi ini digunakan untuk mendapatkan data guna melengkapi dan memperkuat data yang telah diperoleh oleh peneliti bahwa peneliti telah melakukan penelitian.

3.3.2 Teknik Pengumpulan Data Sekunder

Data sekunder merupakan data diperoleh melalui literatur atau studi pustaka yang dokumentasi berkaitan dengan wilayah penelitian. Data sekunder juga dapat diperoleh dari instansi-instansi terkait berupa *hardcopy* maupun *softcopy*. Adapun instansi – instansi terkait yang dapat memberikan data sekunder yaitu:

Tabel 3.3
Kebutuhan Data Penelitian

No	Sasaran	Sumber Data	Teknik Pengumpulan Data	Output
1.	Identifikasi wilayah permukiman kumuh di kelurahan 14 ulu Kota Palembang.	PUPR dan Fasilitator kelurahan 14 Ulu	Observasi	Kondisi wilayah permukiman kumuh kelurahan 14 Ulu
2.	Mengidentifikasi wilayah permukiman kumuh di Kelurahan 14 Kota Palembang.	Masyarakat	Kuesioner dan Dokumentasi	Standar PUPR dan Persepsi masyarakat

Sumber : Olah Data,2023

3.4 Teknik Analisis Data

Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Analisis Kuantitatif

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan kuantitatif. Penelitian kuantitatif merupakan penelitian yang bermula dari suatu teori menuju bentuk perolehan suatu data numerik di lapangan. Menurut Sugiyono (2019) mengemukakan “pendekatan kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, Teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random, pengumpulan dan data menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan”.

2. Metode Evaluasi *Checklist* (Daftar Periksa)

Menurut Sugiyono, (2017) Metode Checklist atau Metode Daftar Periksa adalah metode penilaian kinerja yang terdiri dari serangkaian standar kerja yang berbentuk pernyataan dengan pertanyaan dan jawaban “ya” atau “tidak” yang telah disiapkan oleh peneliti. Jika indikator yang bersangkutan memenuhi standar yang ditentukan pertanyaan Checklist, maka akan diberikan tanda centang (√) atau tanda kali (x) pada kolom “ya”. Sebaliknya jika indikator yang bersangkutan tidak memenuhi standar yang dimaksud, maka tanda centang (√) atau tanda kali (x) akan diberikan pada kolom “tidak”.

3. Analisis persepsi Masyarakat

Tahap ini dilakukan untuk mendapatkan persepsi masyarakat dan analisis dari persepsi tersebut sebagai dasar evaluasi penelitian ini. Persepsi masyarakat didapatkan dari survey primer kepada masyarakat kelurahan 14 Ulu dengan bantuan kuesioner. Analisis persepsi dilakukan untuk mendapatkan pencapaian indikator program PUPR.

3.5 Variabel Penelitian

Variabel yang digunakan dalam proses mengidentifikasi akan ditentukan berdasarkan kajian teori yang digunakan, semakin sederhana suatu rancangan penelitian semakin sedikit variabel penelitian yang digunakan. Adapun variabel dan indikator yang digunakan dalam penelitian ini yang berdasarkan standar PUPR bisa dilihat sebagai berikut :

Tabel 3.4

Variabel dan indikator Penelitian

No	Kriteria	Variabel	Indikator Pemenuhan Variabel
1.	Kondisi Bangunan gedung	Kondisi bangunan gedung sesuai dengan standar PUPR.	Tata bangunan sudah tertata dengan teratur.
		Bangunan gedung sudah tertata rapi.	Tingkat kepadatan penduduk.
2.	Jalan Lingkungan (Aksesibilitas)	Jalan Lingkungan Sesuai dengan standar PUPR	Memiliki lebar jalan lebih dari 1,5 meter
			Memiliki Saluran air di tepi jalan (drainase jalan)

	Lingkungan)	Permukaan Jalan Lingkungan	Tidak terdapat kerusakan pada permukaan jalan
3.	Penyediaan Air Bersih	Akses Aman Air	Masyarakat pada lokasi dapat mengakses air minum yang memiliki kualitas tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa
		Terpenuhinya Kebutuhan Air	Kebutuhan air minum masyarakat pada lokasi mencapai minimal sebanyak 60 liter/orang/hari
4.	Drainase Lingkungan	Prasarana drainase	Mampu mengalirkan limpasan air tidak menimbulkan genangan air
		Sarana drainase	Tersedianya fasilitas untuk pelengkap prasarana drainase
		Pemeliharaan saluran drainase	Adanya pemeliharaan rutin atau berkala
5.	Pengolahan Saluran Pembuangan Air Limbah	Pengolahan Air Limbah Sesuai Standar Teknis	Memiliki sistem yang memadai, yaitu kakus/kloset yang terhubung dengan tangki septitank individual/domestik, komunal maupun terpusat.
		Sarapra SPAL Sesuai dengan persyaratan teknis	Tersedianya sistem pengolahan limbah setempat atau terpusat
6.	Pengelolaan Persampahan	Prasarana dan Sarana Persampahan Sesuai dengan Persyaratan Teknis	Tersedianya gerobak sampah dan/atau truk sampah pada skala lingkungan
			Tersedianya tempat sampah dengan pemilahan sampah pada skala RT
			Tersedianya tempat penampungan sementara (TPS) dikelurahan
			Pengumpulan skala lingkungan
			Tersedianya bank sampah tempat pewadahan
			Pengangkutan skala lingkungan
			Pengolahan skala lingkungan
7.	Proteksi Kebakaran	Ketersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran	Pasokan air (Hydrant)
			Akses Jalan Lingkungan
			Bangunan pos kebakaran
		Ketersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	Alat Pemadam Api Ringan (APAR);
			Mobil pompa
			Mobil tangga sesuai kebutuhan

Sumber : PUPR, 2016

3.6 Deskripsi Data

Penelitian menggunakan instrumen observasi, dan angket atau kuesioner yang telah disebar, dengan objek penelitian kepala keluarga tentang (Identifikasi wilayah permukiman kumuh dan Analisis Persepsi Masyarakat di Kelurahan 14 Ulu Kota Palembang). Metode pengambilan data sampel dalam penelitian ini adalah *non probability sampling*. Teknik *non probability sampling* yang

digunakan yaitu *purposive sampling*. Penyebaran kuesioner dilakukan mulai dari 1 Januari 2023 sampai 31 Februari 2023. Data distribusi kuesioner penelitian dapat dilihat dalam tabel 3.5 sebagai berikut:

Tabel 3.5
Data Distribusi Kuesioner Penelitian

No.	Keterangan	Total
1	Kuesioner yang disebar	100
2	Kuesioner yang kembali	100
3	Kuesioner yang dapat diolah	100
4	Kuisisioner yang tidak dapat diolah	0

Sumber :olah data,2023

Data distribusi kuesioner penelitian dapat diketahui berdasarkan dari hasil angket yang telah disebar dengan jumlah 100 kuisisioner hanya 100 yang kembali dan yang bisa diolah datanya sebesar 100 angket hal ini disebabkan dari 0 kuisisioner tidak bersedia menjawab pertanyaan tentang Identifikasi wilayah permukiman kumuh dan Analisis Persepsi Masyarakat di Kelurahan 14 Ulu Kota Palembang maupun serta tidak mau menuliskan besaran gajinya perbulannya.

3.6.1 Karakteristik Responden

Responden dalam penelitian ini merupakan Kepala Keluarga yang bertempat tinggal di rumah susun Kelurahan 14 Ulu, Berdasarkan data yang diperoleh dari penelitian lapangan maka dapat dilihat gambaran tentang usia dari masing-masing diketahui usia terbanyak Kepala Keluarga yang bermukim di rumah susun kawasan 14 Ulu yakni berusia 30-47 tahun.

Tabel 3.6
Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Pekerjaan

No.	Pekerjaan	Frekuensi	Persentase (%)
1	Buruh Tetap	47	47.00
2	Pedagang	34	34.00
3	Buruh Lepas	19	19.00
Jumlah		100	100.00

Sumber :Olah Penelitian,2023

Berdasarkan data pada tabel 3.6 diketahui bahwa sebagian besar responden yakni 47 orang (47%) bekerja sebagai buruh tetap, 34 orang (34%) bekerja sebagai pedagang, dan 19 orang (19%) bekerja sebagai buruh lepas. Berdasarkan hasil penelitian dan data lapangan, maka responden diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) bagian berdasarkan pendidikan formal terakhir yang ditempuh oleh masing-masing responden yang dikelompokkan menjadi 3 yakni; 1 : pendidikan rendah < SMP; 2 : Pendidikan Menengah SMP; 3 : Pendidikan Tinggi \geq SMA pada tabel 3.8 sebagai berikut.

Tabel 3.7
Distribusi Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

No.	Pendidikan Terakhir	Frekuensi	Persentase (%)
1	Rendah (\leq SMP)	16	16.00
2	Menengah (SMP)	57	57.00
3	Tinggi (\geq SMA)	27	27.00
Jumlah		100	100.00

Sumber : Olah Penelitian, 2023

Berdasarkan data dari tabel 3.7 diketahui bahwa sebagian besar responden yakni 57 orang (57%) tergolong berpendidikan menengah (tamat SMP), 27 orang (27%) tergolong berpendidikan tinggi (\geq SMA), dan 16 orang (16%) tergolong berpendidikan rendah. Hasil ini sejalan dengan teori yang mengatakan bahwa pengetahuan / pendidikan terakhir memiliki nilai yang penting dalam konteks pemberdayaan sumber daya manusia. Selanjutnya disajikan distribusi frekuensi berdasarkan jumlah anggota keluarga. Jumlah anggota keluarga dikelompokkan menjadi 3, 1 : sedikit (< 3 orang); 2 : sedang (3-5 orang) dan 3 : banyak (> 5 orang).

Tabel 3.8
Distribusi Responden Berdasarkan Jumlah Anggota Keluarga

No.	Anggota Keluarga	Frekuensi	Persentase (%)
1	Sedikit (\leq 3 orang)	16	16.00
2	Sedang (3-5 orang)	57	57.00
3	Banyak (\geq 5 orang)	27	27.00
Jumlah		100	100

Sumber : Olah data Penelitian, 2023

Berdasarkan data pada tabel 3.8 diketahui bahwa sebagian besar responden yakni 57 orang (59%) memiliki jumlah anggota keluarga > 5 orang, 27 orang (35%) memiliki anggota keluarga (3-5 orang), dan 13 orang (13%) memiliki anggota keluarga (< 3 orang). Hasil ini sesuai dengan hasil penelitian menurut (Aulia, 2019) bahwa jumlah anggota keluarga sangat menentukan jumlah kebutuhan keluarga. Semakin banyak anggota keluarga berarti semakin banyak pula jumlah kebutuhan anggota keluarga begitu juga sebaliknya. Sehingga dalam keluarga yang jumlahnya anggota keluarganya banyak akan diikuti oleh banyaknya kebutuhan yang harus dipenuhi kepala keluarga tersebut.

BAB IV

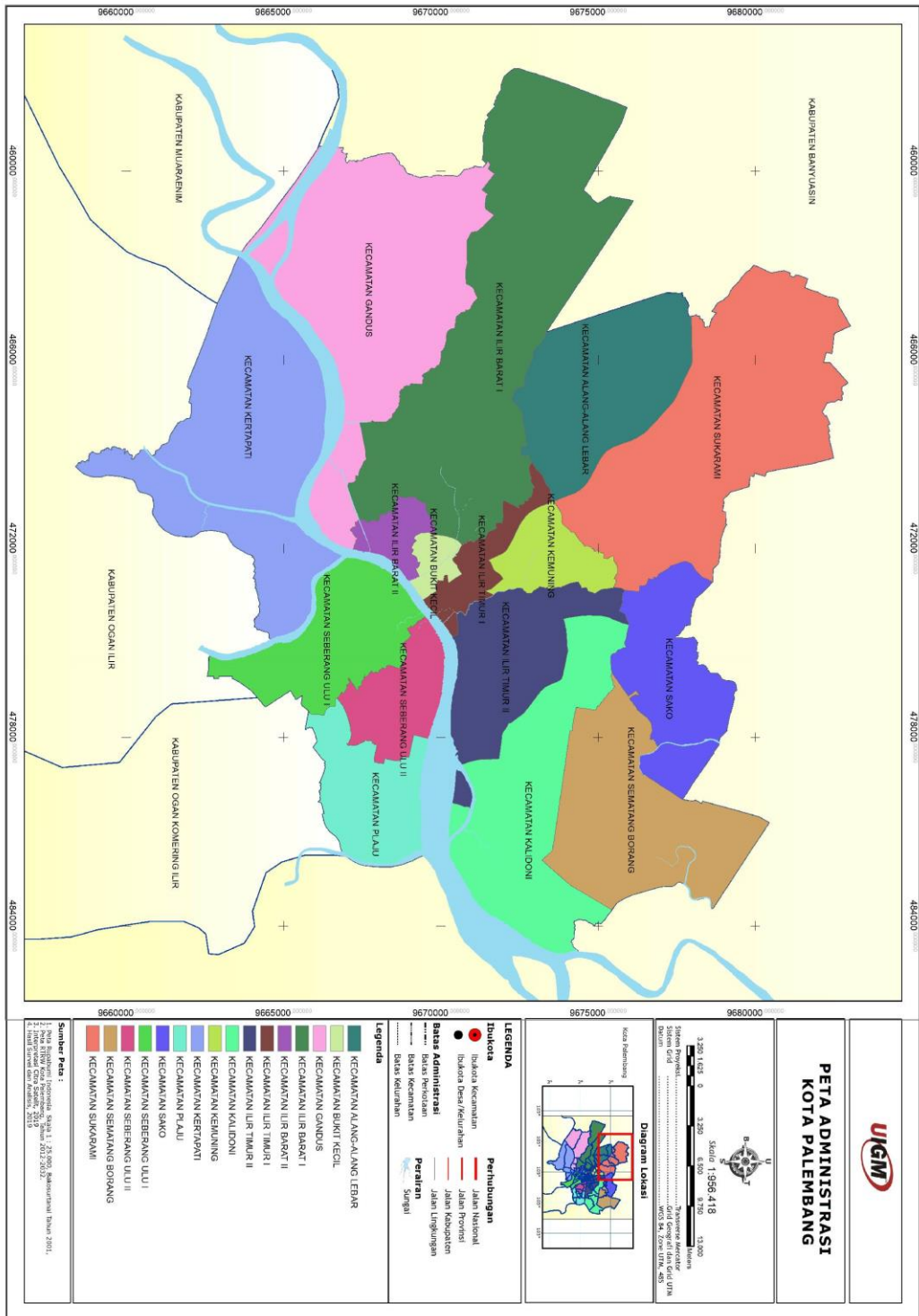
GAMBARAN UMUM WILAYAH STUDI

4.1 Kondisi Geografis dan Administrasi

Kota Palembang merupakan ibukota dari Provinsi Sumatera Selatan yang terdiri dari enam belas kecamatan, yaitu Ilir Timur I, Ilir Timur II, Ilir Barat I, Ilir Barat II, Seberang Ulu I, Seberang Ulu II, Sukarame, Sako, Bukit Kecil, Gandus, Kemuning, Kalidoni, Plaju, Kertapati, Alang-Alang Lebar dan Sematang Borang. Secara geografis Kota Palembang terletak antara 2°52' - 3°5' Lintang Selatan dan 104°37' - 104°52' Bujur Timur dengan ketinggian rata-rata 8 m (delapan meter) dari permukaan laut. Batas-batas wilayah sebagai berikut :

- Batas Utara : Kabupaten Banyuasin
- Batas Selatan : Kabupaten Ogan Komering Ilir dan Muara Enim
- Batas Timur : Kabupaten Banyuasin
- Batas Barat : Kabupaten Banyuasin

Secara administrasi luas wilayah kota Palembang sebesar 400,61 km² atau 40.061 Ha berbatasan dengan 3 kabupaten yaitu kabupaten Banyuasin, Selatan kabupaten Muara Enim dan Kabupaten Ogan Ilir. Berdasarkan peraturan daerah kota Palembang Tahun 2018, wilayah administrasi kota Palembang mengalami pemekaran wilayah, dengan indikator pemekaran diantaranya adalah luas wilayah, banyaknya jumlah penduduk sehingga kota Palembang memiliki 18 kecamatan, yaitu Ilir Barat I, Ilir Barat II, Gandus, Seberang Ulu I, Seberang Ulu II, Kertapati, Jakabaring, Plaju, Bukit Kecil, Ilir Timur I, Ilir Timur II, Ilir Timur III, Kemuning, Kalidoni, Sako, Sematang Borang, Sukarame dan Alang-alang Lebar.



Sumber: Olah Peneliti, 2023

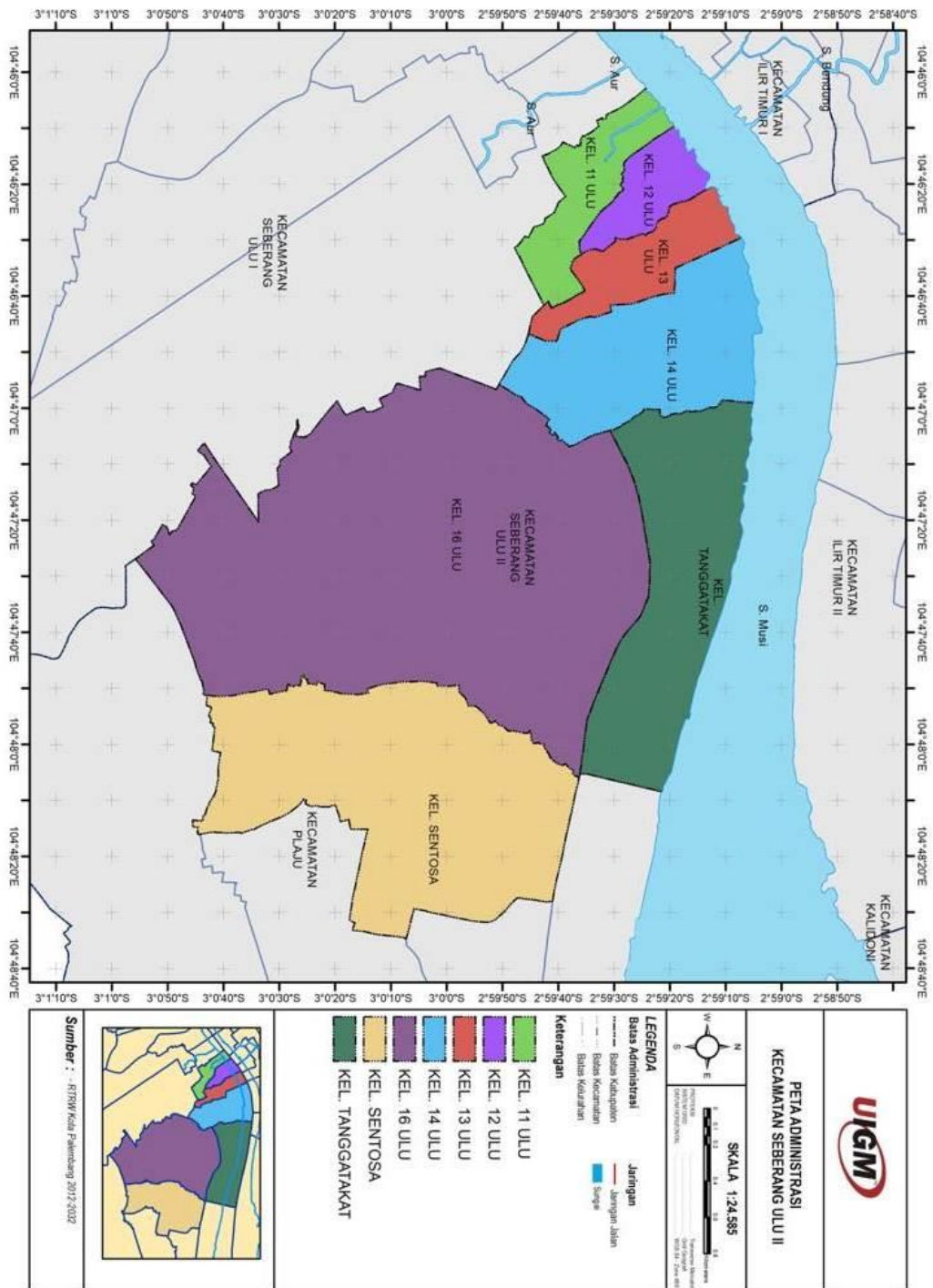
Gambar 4.1

Peta Administrasi Kota Palembang

4.2 Gambaran Umum Kecamatan Seberang Ulu II

Kecamatan Seberang Ulu (SU) II Palembang salah satunya yang memiliki wilayah cukup luas, yakni mencapai 10,69 km². Penduduk Kecamatan Seberang Ulu II penduduk tahun 2021 sebanyak 103.760 jiwa yang terdiri atas 52.291 jiwa penduduk laki-laki dan 51.469 jiwa penduduk perempuan sementara itu besarnya angka rasio jenis kelamin tahun 2021 penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan sebesar 101,60 persen yang berarti bahwa jumlah penduduk laki-laki lebih besar dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan. Kepadatan penduduk di Kecamatan Seberang Ulu Dua tahun 2021 mencapai 9.697 jiwa/km². Kepadatan Penduduk di 7 kelurahan cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di Kelurahan 12 Ulu dengan kepadatan sebesar 33.697 jiwa/km² dan terendah di Kelurahan 16 Ulu sebesar 7.695 jiwa/km². Yang berbatasan dengan :

- Sebelah Utara : Sungai Musi,
- Sebelah Timur : Kecamatan Plaju.
- Sebelah Selatan : Kecamatan Seberang Ulu I
- Sebelah Barat : Kecamatan Seberang Ulu



Sumber : Olah data peneliti, 2023

Gambar 4.2

Peta Administrasi Kecamatan Seberang Ulu II

4.2.1 Jumlah, Kepadatan Penduduk Kecamatan Seberang Ulu II

Kecamatan Seberang Ulu II memiliki daerah yang luas, telah dijadikan sasaran objek pembangunan sehingga penduduk merupakan unsur yang penting dalam membangun ekonomi, baik sebagai objek perekonomian maupun subjek perekonomian itu sendiri. Sebagaimana yang telah diprioritaskan oleh pemerintah bahwa faktor penduduk merupakan modal dasar dalam pelaksanaan perekonomian.

Untuk ketetapan tersebut berarti bahwa aspek penduduk akan memberikan harapan sebagai salah satu sumber potensial yang menggerakkan dan digerakan dalam proses perekonomian. Penduduk di Kecamatan Seberang Ulu II berjumlah sekitar 102.530 jiwa, yang terdiri dari 52.243 penduduk laki-laki dan 51.966 penduduk perempuan. Dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 4.1
Jumlah Penduduk Kecamatan Seberang Ulu II Menurut Jenis Kelamin

No.	Kelurahan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	11 Ulu	8.054	7.710	15.764
2.	12 Ulu	12.830	12.514	25.344
3.	13 Ulu	9353	9.339	18.692
4.	14 Ulu	7.234	7.028	14.262
5.	Tangga Takat	7.039	8.098	15.317
6.	16 Ulu	3.318	3.173	6.491
7.	Sentosa	4.415	4.104	8.519
Jumlah		52.243	51.966	104.209

Sumber: Dokumen Kecamatan SU II, Tahun 2022

Dilihat dari komposisi penduduk per jenis kelamin, penduduk laki-laki di Kecamatan Seberang Ulu II lebih banyak dibandingkan penduduk perempuan dengan beda penduduk laki-laki dan perempuan sebanyak 277 orang. Sedangkan dilihat dari komposisi penduduk berdasarkan pendidikan, penduduk di Kecamatan Seberang Ulu II lebih banyak yang berpendidikan SMA, baik yang sedang duduk di bangku SMA maupun yang berpendidikan terakhir SMA, yaitu berjumlah jiwa. Penduduk yang terbanyak kedua adalah berpendidikan dan sedang duduk di

bangku SMP yang berjumlah 2.291 jiwa.²

4.2.2 Kondisi Agama dan Sosial Ekonomi di Kelurahan 14 Ulu

4.2.2.1 Agama

Dalam menjalani kehidupan, agama merupakan hal yang sangat penting bagi manusia, karena tanpa agama manusia tidak akan mengetahui arah hidupnya dan akan terasa terombang ambing dalam menjalani hidupnya dan tidak mengetahui arah tujuan, jadi dengan adanya agama maka setiap manusia akan mengetahui arah hidupnya dengan baik. Konstitusi Indonesia menjamin kebebasan beragama kepada semua orang, masing-masing menurut agama atau keyakinan sendiri. Kecamatan Seberang Ulu II didominasi oleh penduduk beragama Islam yang mencapai 98 persen dari jumlah seluruh penduduk, sedangkan sisanya merupakan penduduk yang beragama protestan, katolik, hindu dan budha.

Tabel 4.2
Agama di Kecamatan Seberang Ulu II

No.	Agama	Laki-laki	Perempuan
1	Islam	50.488	47.280
2	Khatolik	157	141
3	Protestan	163	160
4	Hindu	-	-
5	Budha	609	571
Jumlah		51.417	48.152

Sumber: BPS 2022

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa mayoritas agama di Kecamatan Seberang Ulu II beragama Islam sebanyak 97.768 orang. Masyarakat yang beragama Budha sebanyak 1.180 orang yang paling banyak berdomisili di kelurahan 14 Ulu, selanjutnya masyarakat beragama Khatolik dan Protestan sebanyak 298 dan 323 orang baik laki-laki maupun perempuan. Jumlah keseluruhan masyarakat yang beragama Islam, Khatolik, Protestas, Hindu, Budha sebanyak 51.417 untuk laki-laki dan 48.152 untuk perempuan.

4.2.2.2 Kondisi Sosial Ekonomi

Sosial ekonomi mengandung segala sesuatu hal yang berhubungan dengan tindakan ekonomi dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat seperti sandang, pangan dan papan. Guna kebijakan pembangunan diberbagai bidang, terutama yang menyangkut bidang kesejahteraan masyarakat diperlukan indikator dan informasi mengenai keadaan sosial ekonomi penduduk itu sendiri. Dengan adanya berbagai informasi ini, perencanaan kebijakan pembangunan akan lebih terarah.

Kegiatan perekonomian di wilayah Kecamatan Seberang Ulu II secara keseluruhan ditopang oleh, 2 pasar darurat, 35 supermarket/swalayan, 161 restoran/rumah makan, 1.523 toko/ warung kelontong. Selain itu juga terdapat 102 pedagang kaki lima di Kecamatan Seberang Ulu II dan 2 pasar masing-masing di Kelurahan 14 Ulu dan Sentosa.

Tabel 4.3
Jumlah Sarana Perekonomian Di Kecamatan Seberang Ulu II

No	Kelurahan	Pasar Permanen	Pasar Darurat	Super Market	Restoran	Warung Kelontong
1	11 Ulu	-	-	-	5	182
2	12 Ulu	-	-	1	7	163
3	13 Ulu	-	-	1	25	242
4	14 Ulu	-	1	4	32	197
5	Tangga Takat	-	-	21	47	237
6	16 Ulu	-	-	6	40	285
7	Sentosa	-	1	2	6	217
Jumlah		-	2	35	161	1523

Sumber: BPS 2023

4.3 Gambaran Umum Kawasan 14 Ulu

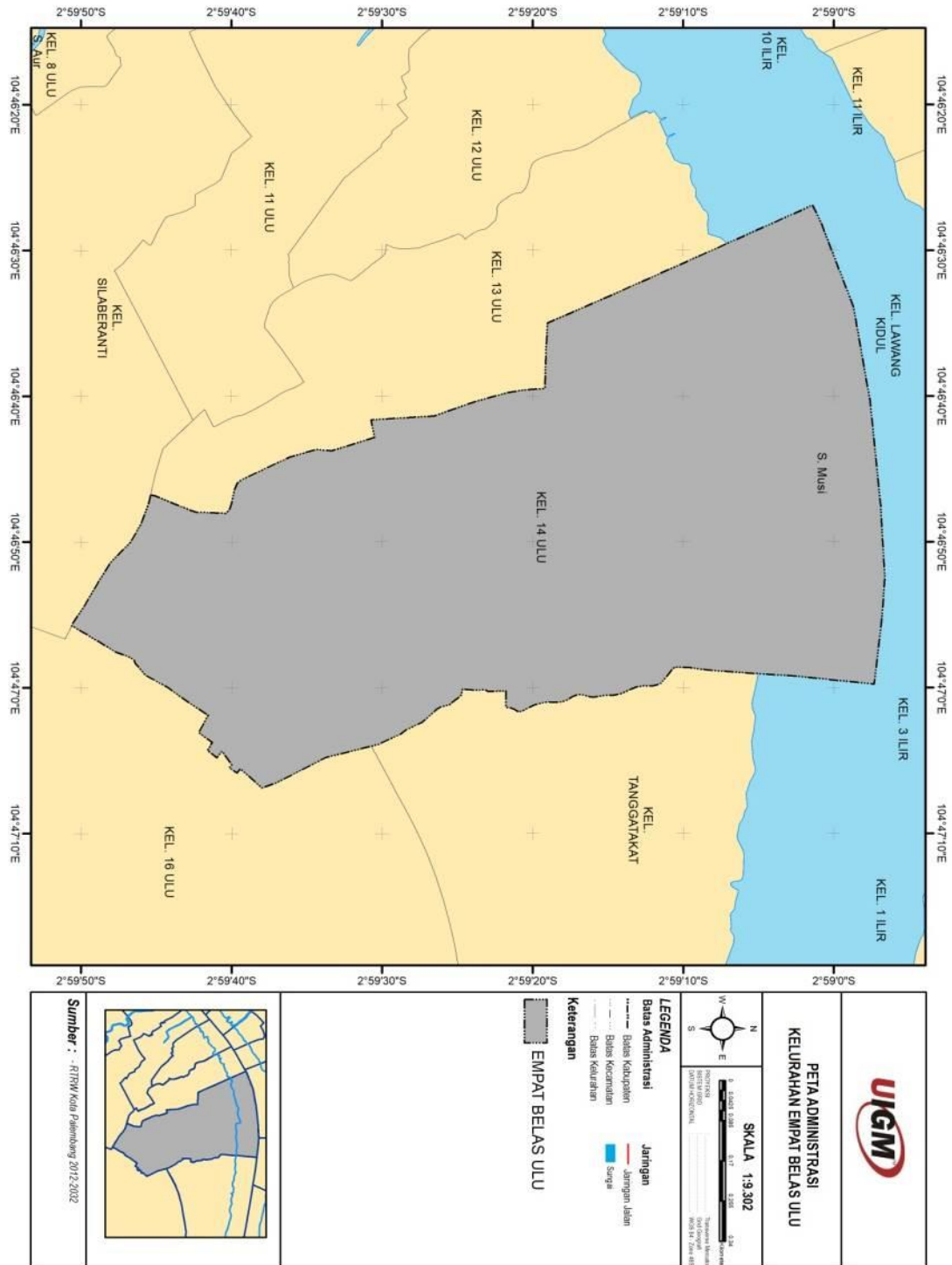
Kelurahan 14 Ulu Kecamatan Seberang Ulu II Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan merupakan salah satu kelurahan/desa di wilayah Kota Palembang. Luas wilayah administratif Kelurahan 14 Ulu Kecamatan Seberang Ulu II Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan sekitar 131 hektar, yang terbagi

dalam 7 RW dan 33 RT. Selain itu untuk batas wilayah bisa diketahui sebagai berikut :

Batas Wilayah Kelurahan 14 Ulu :

- Batas Utara : Sungai Musi
- Batas Timur : Kelurahan Tangga Takat
- Batas Selatan : Kelurahan 16 Ulu
- Batas Barat : Kelurahan 13 Ulu

Jumlah penduduk di Kelurahan 14 Ulu sebanyak 12619 jiwa dan 2350 KK dan terdapat 1.904 KK dengan katagori miskin untuk peta wilayah 14 ulu bisa diketahui pada gambar 4.2 sebagai berikut.



Sumber: Olah Peneliti,2023

Gambar 4.2
Peta Admistrasi Kelurahan 14 Ulu Kota Palembang

4.3.1 Kondisi Sosial Ekonomi Wilayah

Sebagian besar masyarakat di Kelurahan 14 Ulu Kecamatan Seberang Ulu II Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan berasal dari etnis/suku Jawa dan Sumatera. Dengan agama mayoritas adalah Islam dan mata pencaharian utama penduduk di Kelurahan 14 Ulu sebagian besar adalah buruh dan sebagian kecil diantaranya sebagai pedagang, petani, nelayan dan pegawai negeri dan swasta. Sarana sosial ekonomi yang memiliki fungsi sebagai tempat aktivitas sosial ekonomi masyarakat dalam wilayah perumahan dan permukiman yang terdapat di Kelurahan 14 Ulu antara lain berupa sarana pendidikan, sarana kesehatan, sarana perdagangan, sarana ibadah, dan ruang terbuka atau taman, serta balai pertemuan warga. Di Kelurahan 14 Ulu terdapat sarana ibadah berupa 6 unit mesjid, sarana pendidikan berupa gedung SD 5 unit, SMP 2 unit dan SMA 2 unit. Sarana layanan kesehatan berupa Puskesmas sebanyak 1 unit.

4.3.1.1 Kondisi Sarana Pendidikan

Fasilitas pendidikan yang ada di Kelurahan 14 Ulu berdasarkan data baseline tahun 2016, dibagi ke dalam beberapa jenjang pendidikan, diantaranya : PAUD, Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, SLPT dan SMU. Seluruhnya fasilitas pendidikan yang terdapat di Kelurahan 14 Ulu dari bentuk kepemilikan adalah negeri dan swasta.

Tabel 4.4
Fasilitas Pendidikan Kelurahan 14 Ulu

No.	Jenis sarana	Lokasi	Kriteria
1	PAUD	Rt.22	Akses mudah, kondisi baik dan permanen
2	SD	Rt.20	
3	SMP	Rt.33	
4	SMA	Rt.33	

Sumber: RPLP, 2022



PAUD



Sekolah Dasar



Sekolah Menengah Pertama



Sekolah Menengah Atas

Sumber: RPLP 2022

Gambar 4.3

Gambar Fasilitas Pendidikan di Kelurahan 14 Ulu

4.3.1.2 Kondisi Sarana Peribadatan

Penduduk Kelurahan 14 Ulu mayoritas penduduknya beragama islam dan sebagian kecilnya beragama Budha dan kristen. Tempat ibadah yang ada terdiri dari 1 Masjid dan Sebagian Musholla. Kondisi dari semua tempat ibadah tersebut adalah baik, dan ini tersebar secara merata di Kelurahan 14 Ulu.



Sumber :RPLP 2022

Gambar 4.4

Gambar Tempat Peribadatan Kelurahan 14 Ulu

4.3.1.3 Kondisi Sarana Kesehatan

Fasilitas kesehatan di Kelurahan 14 Ulu meliputi praktek dokter dan Posyandu. Fasilitas kesehatan dibangun dengan tujuan agar memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat secara optimal.



Sumber : RPLP 2022

Gambar 4.5

Tempat Pelayanan Kesehatan Kelurahan 14 Ulu

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN



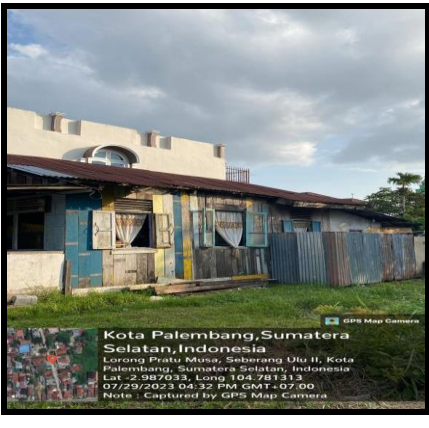
Pada bab ini dibahas mengenai sasaran dalam Identifikasi wilayah permukiman kumuh dan Analisis Persepsi Masyarakat di Kelurahan 14 Ulu Kota Palembang, adapun sasarannya yaitu yang pertama adalah mengidentifikasi wilayah permukiman kumuh, dan yang kedua menganalisis persepsi masyarakat. Adapun identifikasi pelaksanaan kegiatan - kegiatan sebagai berikut.

5.1 Identifikasi Kondisi Kelurahan 14 Ulu Kota Palembang Sesudah dilaksanakan Program Kotaku pada Tahun (2016 - 2022)

5.1.1 Bangunan Hunian / Gedung

Kriteria kekumuhan ditinjau dari Bangunan Hunian / Gedung sebagaimana dimaksud dalam dalam peraturan menteri PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) nomor 02 tahun 2016 mencakup kualitas dari hunian bangunan tersebut.

Kepadatan bangunan yang tinggi terlihat dari kondisi bangunan dengan jumlah jumlah yang banyak sehingga tampak padat dan sesak. Faktor pemicu kondisi kepadatan bangunan yaitu pertumbuhan populasi per hektar di wilayah tersebut dan adanya peningkatan jumlah penduduk menyebabkan semakin meningkatnya jumlah kebutuhan ruang untuk bermukim masyarakat. Namun, dengan jumlah lahan yang terbatas apabila jumlah penduduk yang semakin padat berdampak pada kondisi ruang permukiman, berdasarkan eksisting di Kelurahan 14 ulu terdapat bangunan tidak layak huni seperti rumah masih papan dan geribik, adapun yang permanen dinding yang belum diplester dan lantai sudah bagus semua menggunakan keramik , jarak antar rumah kerumah lainnya sangat rapat akibat dari bangunan-bangunan tersebut dibangun secara berdekatan dan tidak teratur.

No.	Kondisi Bangunan/hunian	Foto-foto dilapangan
1	Bangunan yang Berdekatan	 <p data-bbox="938 719 1193 801"> <small>GPS Map Camera</small> Kota Palembang, Sumatera Selatan, Indonesia Lorong Pratu Musa, Seberang Ulu II, Kota Palembang, Sumatera Selatan, Indonesia Lat: -2.986731, Long 104.781338 07/29/2023 04:33 PM GMT+07:00 Note: Captured by GPS Map Camera </p>
2	Lantai Bangunan	 <p data-bbox="938 1167 1193 1249"> <small>GPS Map Camera</small> Kota Palembang, Sumatera Selatan, Indonesia Jalan K.H. Achari, Seberang Ulu II, Kota Palembang, Sumatera Selatan, Indonesia Lat: -2.988412, Long 104.773443 07/29/2023 04:37 PM GMT+07:00 Note: Captured by GPS Map Camera </p>
3	Bangunan tidak Permanen	 <p data-bbox="938 1621 1193 1704"> <small>GPS Map Camera</small> Kota Palembang, Sumatera Selatan, Indonesia Lorong Pratu Musa, Seberang Ulu II, Kota Palembang, Sumatera Selatan, Indonesia Lat: -2.987033, Long 104.781313 07/29/2023 04:32 PM GMT+07:00 Note: Captured by GPS Map Camera </p>

<p>4</p>	<p>Bangunan Permanen</p>	
-----------------	---------------------------------	--

Sumber : dokumentasi lapangan, 2023

Tabel 5.1

Kondisi Bangunan Gedung/Hunian Dikelurahan 14 Ulu



Sumber : Olah data peneliti, 2023

Gambar 5.1

Peta Bangunan Gedung di Kelurahan 14 Ulu

5.1.2 Jalan Lingkungan

Kriteria kekumuhan ditinjau dari jalan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam dalam peraturan menteri PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) nomor 02 tahun 2016 mencakup jaringan jalan lingkungan tidak melayani seluruh lingkungan perumahan atau permukiman dan/atau kualitas permukaan jalan lingkungan buruk.

Jalan lingkungan merupakan prasarana yang memiliki fungsi penting yaitu sebagai mobilitas transportasi manusia. Jaringan yang tidak bisa melayani skala perumahan dan permukiman berarti bahwa kondisi jalan tersebut tidak terhubung antar dan atau dalam suatu lingkungan perumahan dan permukiman. Disamping sistem jaringan jalan lingkungan tersebut, pada kawasan/lingkungan permukiman juga terdapat jaringan jalan setapak yang berfungsi untuk memberikan pelayanan sebagai jalan pintas.


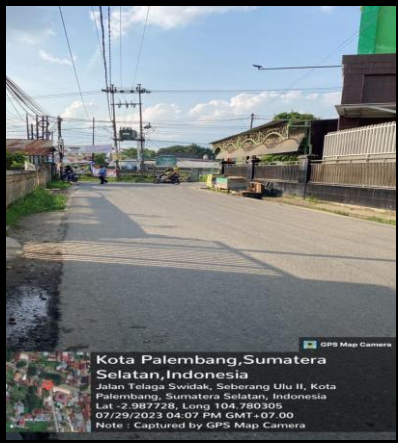

Sistem jaringan jalan pada kawasan/lingkungan perumahan dan permukiman terdiri dari: (a) jalan lokal sekunder I (LS-I) yang merupakan jalan poros perumahan/permukiman yang menghubungkan antara jalan kolektor dan atau pusat aktivitas di perumahan/permukiman; (b) jalan lokal sekunder II (LS-II) yang menghubungkan akses menuju jalan lokal sekunder III dan menghubungkan aktivitas atau menuju jalan yang lebih tinggi hirarkinya; dan (c) jalan lokal sekunder III (LS-III) yang memiliki.


Tabel 5.2

Kondisi Lingkungan Jalan di kelurahan 14 Ulu

Jenis Infrastruktur	Pengelola Izin Lingkungan	Perizinan Lahan	Potensi Dampak Yang timbul
Jalan	SPPL	Hibah	Dampak kebisingan, getaran, emisi yang tinggi.
			Gangguan visual (khusus pada saat konstruksi)
			Bangkitan lalu lintas
			Gangguan jaringan prasarana sosial seperti gas, listrik, air minum, telekomunikasi (khusus pada saat konstruksi).

Sumber: RPLP, 2023

No.	Kondisi jalan lingkungan	Foto hasil dilapangan
1	Kondisi Jalan Lingkungan	 <p data-bbox="879 779 1278 875"> <small>GPS Map Camera</small> Kota Palembang, Sumatera Selatan, Indonesia Jalan K.H. Azhari, Seberang Ulu II, Kota Palembang, Sumatera Selatan, Indonesia Lat: -2.987006, Long: 104.788874 07/29/2023 04:10 PM GMT+07.00 Note: Captured by GPS Map Camera </p>
2	Kondisi Jalan Utama	 <p data-bbox="879 1256 1278 1361"> <small>GPS Map Camera</small> Kota Palembang, Sumatera Selatan, Indonesia Jalan Telaga Swidak, Seberang Ulu II, Kota Palembang, Sumatera Selatan, Indonesia Lat: -2.987238, Long: 104.780305 07/29/2023 04:07 PM GMT+07.00 Note: Captured by GPS Map Camera </p>
3	Kondisi Jalan Berlubang	 <p data-bbox="879 1749 1278 1854"> <small>GPS Map Camera</small> Kota Palembang, Sumatera Selatan, Indonesia Jalan K.H. Azhari, Seberang Ulu II, Kota Palembang, Sumatera Selatan, Indonesia Lat: -2.987408, Long: 104.780078 07/29/2023 04:08 PM GMT+07.00 Note: Captured by GPS Map Camera </p>

<p style="text-align: center;">4</p>	<p style="text-align: center;">Kondisi Jalan Sempit/Pintas</p>	 <p style="text-align: center;"> <small>GPS Map Camera</small> Kota Palembang, Sumatera Selatan, Indonesia Jalan K. H. Achari, Seberang Ulu II, Kota Palembang, Sumatera Selatan, Indonesia Lat: -2.986791, Long: 104.777497 07/29/2023 04:14 PM GMT+07:00 <small>Note: Captured by GPS Map Camera</small> </p>
---	---	---

Sumber : Dokumentasi lapangan, 2023

Tabel 5.3
Kondisi Jalan Lingkungan di Kelurahan 14 Ulu



Sumber: Olah data Peneliti, 2023

Gambar 5.2
Peta Jalan Lingkungan kelurahan 14 Ulu

5.1.3 Penyediaan Air Bersih

Kriteria kekumuhan ditinjau dari penyediaan air bersih sebagaimana dimaksud dalam dalam peraturan menteri PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) nomor 02 tahun 2016 mencakup aspek terhadap air aman (tidak berasa, tidak berwarna, dan tidak berbau) serta pemenuhannya yang mencukupi 60 liter/hari/orang.




Program penyediaan air bersih adalah sebuah program yang bertujuan untuk memastikan masyarakat memiliki akses terhadap air bersih yang aman dan sehat untuk dikonsumsi. Evaluasi mengenai pelaksanaan program KOTAKU pada kegiatan penyediaan air bersih meliputi beberapa variabel diantaranya memiliki Mampu memenuhi kebutuhan air bersih dengan aman dan mampu mencukupi kebutuhan perorang minimal 60 liter dalam sehari dan Pembangunan infrastruktur air bersih seperti sumur, pompa, pipa, dan tangki air.

Gambaran tentang sistem penyediaan air bersih pada kawasan/lingkungan permukiman di Kelurahan 14 Ulu Kecamatan Seberang Ulu II Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan meliputi jumlah rumah tangga yang telah dilayani melalui sistem penyediaan air bersih perpipaan PDAM sebanyak 80% dari total KK yang ada di kelurahan 14 Ulu Kecamatan Seberang Ulu II Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan yaitu sekitar 1925 KK telah menggunakan PDAM. Sebanyak 53 KK di kelurahan 14 Ulu menggunakan sungai sebagai sumber air bersih sedangkan sumur bor hanya di gunakan oleh 1 KK.

Tabel 5.4
Kondisi Lingkungan Air Bersih di kelurahan 14 Ulu

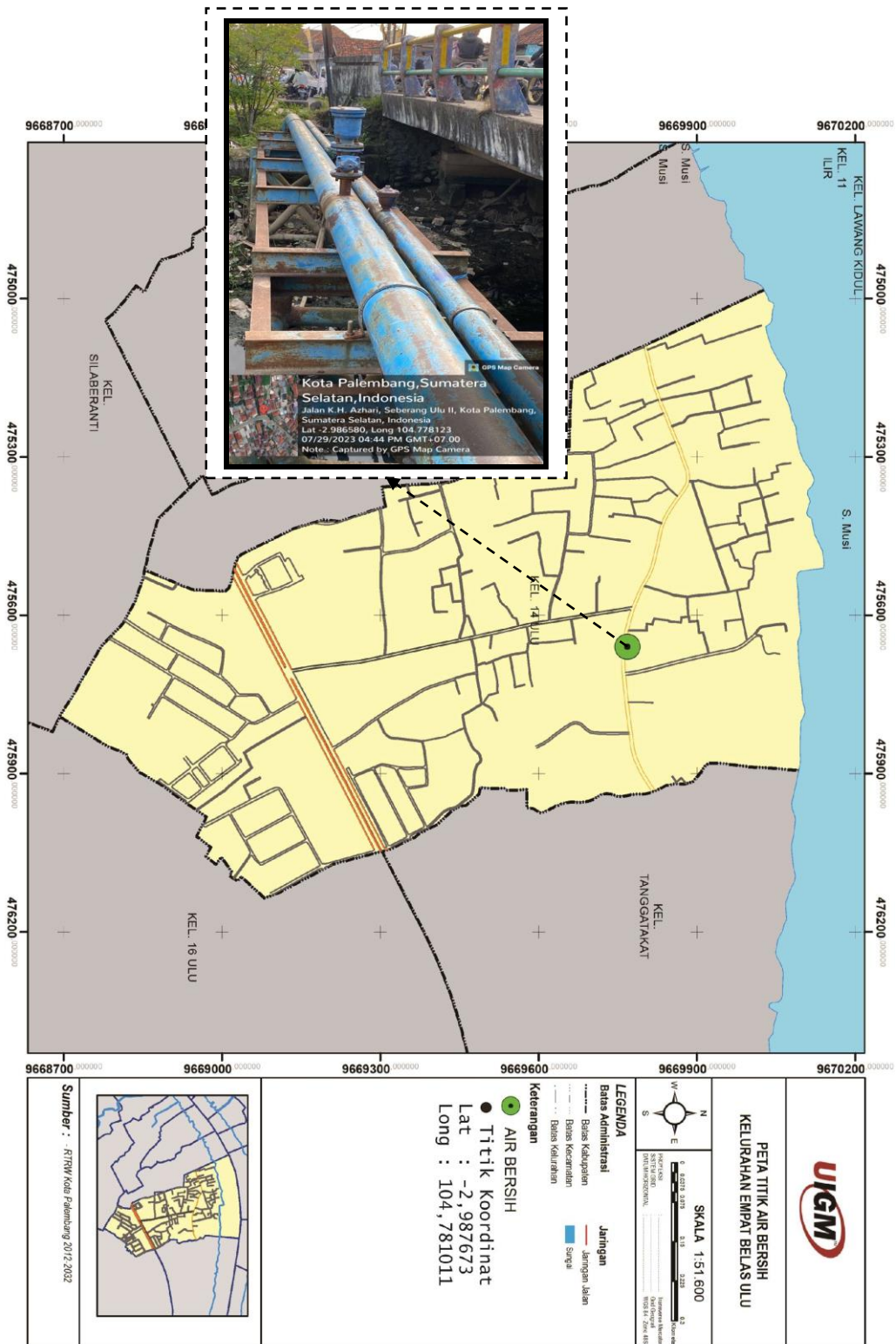
Jenis Infrastruktur	Pengelola Izin Lingkungan	Perizinan Lahan	Potensi Dampak Yang timbul
Air Bersih	SPPL	Hibah	Terjadi pengotoran sumber air pada tahap konstruksi .
			Dampak pada kesehatan masyarakat atau pemakai bila sumber air tidak memenuhi persyaratan kualitas air bersih.
			Muka air tanah semakin rendah
			Intrusi air permukaan ke dalam air tanah.

Sumber: RPLP, 2023

No.	Kondisi Air bersih	Foto hasil lapangan
1	Pipa pompa Air Bersih	 <p>Kota Palembang, Sumatera Selatan, Indonesia Jalan K.H. Azhari, Seberang Ulu II, Kota Palembang, Sumatera Selatan, Indonesia Lat: -2.986580, Long 104.778123 07/29/2023 04:44 PM GMT+07:00 Note: Captured by GPS Map Camera</p>
2	PDAM	 <p>Kota Palembang, Sumatera Selatan, Indonesia Jalan K.H. Azhari, Seberang Ulu II, Kota Palembang, Sumatera Selatan, Indonesia Lat: -2.987673, Long 104.781011 07/29/2023 04:30 PM GMT+07:00 Note: Captured by GPS Map Camera</p>
3	Tangki Air	 <p>Kota Palembang, Sumatera Selatan, Indonesia Lorong Pratu Musa, Seberang Ulu II, Kota Palembang, Sumatera Selatan, Indonesia Lat: -2.986509, Long 104.781227 07/29/2023 04:36 PM GMT+07:00 Note: Captured by GPS Map Camera</p>

Sumber: Dokumentasi Lapangan, 2023

Tabel 5.5
Kondisi Air Bersih di Kelurahan 14 Ulu



Sumber : Olah data Peneliti, 2023

Gambar 5.3

Peta Penyediaan Air Bersih Kelurahan 14 ulu

5.1.4 Drainase Lingkungan

Kriteria kekumuhan ditinjau dari drainase lingkungan sebagaimana dimaksud dalam dalam peraturan menteri PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) nomor 02 tahun 2016 kemampuan mengalirkan limpasan air ketika hujan dan kualitas drainasenya dilihat juga dari pemeliharaan drainasenya.

Sistem Drainase harus dilihat sebagai suatu bagian intergrasi dan proses perencanaan kawasan. Perencanaan sistem drainase memperhatikan beban atau debit banjir dimana cenderung meningkat dipengaruhi koefisien limpasan air, intensitas hujan dan luas daerah tangkapan air. Kapasitas saluran drainase akan mengalami penurunan dimana hal ini penting untuk menghindari terjadinya luapan air di daerah permukiman. Hal tersebut dapat terwujud apabila di titik-titik genangan dibuat lubang biopori yang berfungsi untuk mempercepat penyerapan air ke dalam tanah sehingga ketersediaan air tanah terjamin.

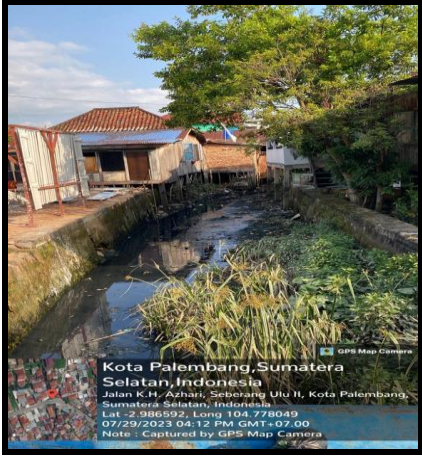

Tabel 5.6
Kondisi Lingkungan Drainase di kelurahan 14 Ulu

Jenis Infrastruktur	Pengelola Izin Lingkungan	Perizinan Lahan	Potensi Dampak Yang timbul
Drainase& MCK	SPPL	Hibah	Timbulnya gangguan lalu lintas.
			kerusakan prasarana dan sarana umum.
			pencemaran di daerah hilir.
			perubahan tata air di sekitar jaringan.
			bertambahnya aliran puncak genangan air

Sumber: RPLP, 2023

Berdasarkan Tabel 5.3 tersebut untuk merencanakan sistem pelayanan air bersih ini tentunya akan didasarkan pada beberapa pertimbangan baik menyangkut ketersediaan sumber air, kondisi wilayah perencanaan, kemudahan pembangunan serta dana yang dibutuhkan. Rencana air bersih di wilayah perencanaan memadukan antara sungai kelingi dengan sistem PDAM Tirta. Dengan adanya pembangunan drainase tersebut dapat meningkatkan akses infrastruktur tersebut seperti, dapat mengalirkan limpahan air hujan yang berlebihan dengan aman sehingga drainase ini berfungsi sebagai pengendali

kebutuhan air permukaan untuk memperbaiki dan mengurangi kebecakan, genangan air dan banjir. Tetapi pembangunan drainase di Kelurahan 14 Ulu ini belum memadai, dari hasil survei banyak yang menyarankan agar pembangunan drainase bisa lebih di tingkatkan lagi di setiap jalan yang ada di Kelurahan 14 Ulu.

No.	Kondisi Drainase Lingkungan	Foto Hasil Lapangan
1	<p style="text-align: center;">Kondisi Drainase Samping Rumah</p>	
2	<p style="text-align: center;">Kondisi Drainase Jalan</p>	

Sumber : Dokumentasi lapangan, 2023

Tabel 5.7

Kondisi Drainase Lingkungan di Kelurahan 14 Ulu



Sumber : Olah data peneliti 2023

Gambar 5.4

Peta Kondisi Drainase Lingkungan kelurahan 14 Ulu

5.1.5 Pengelolaan Air Limbah

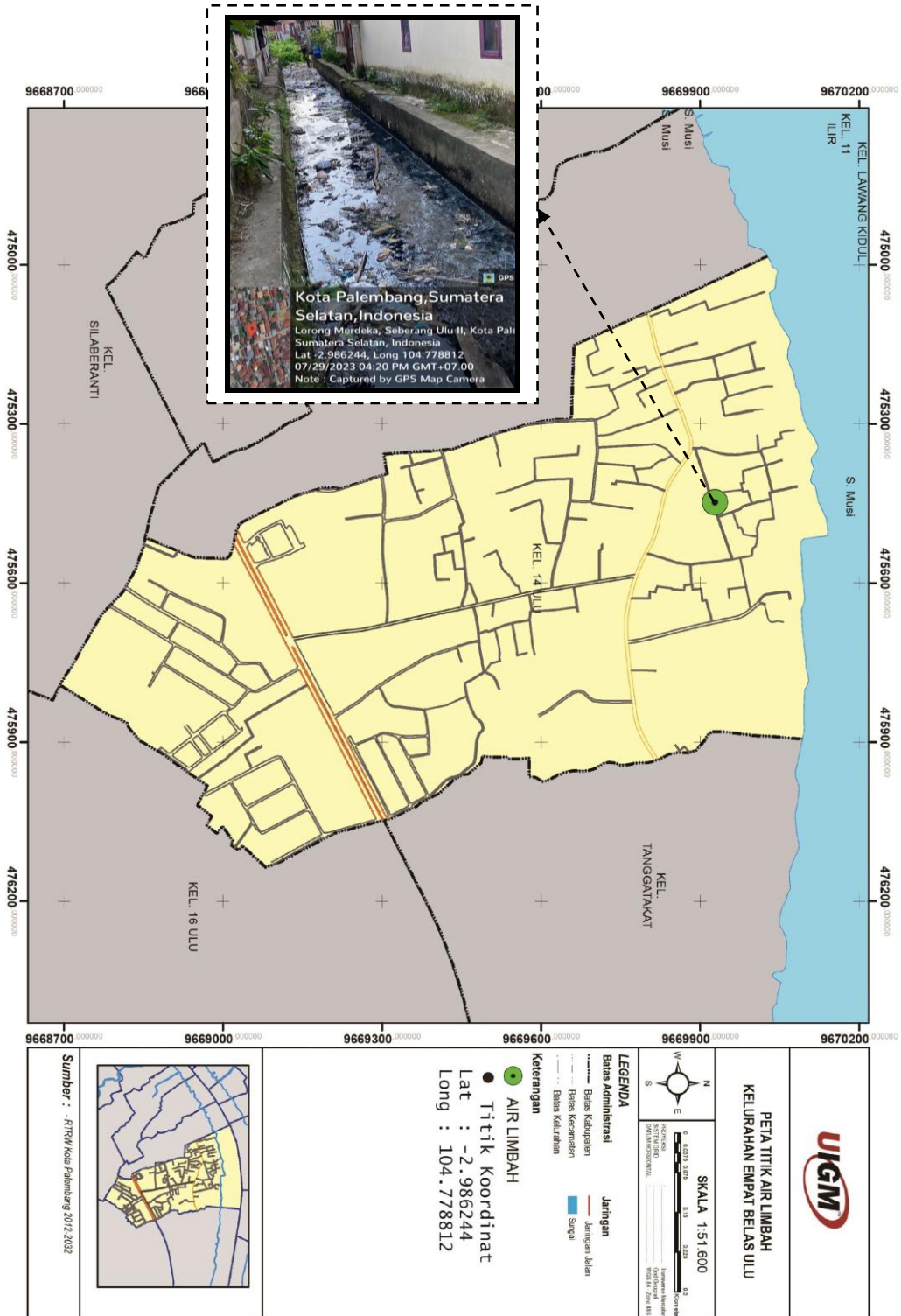
Kriteria kekumuhan ditinjau dari penyediaan air bersih sebagaimana dimaksud dalam dalam peraturan menteri PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) nomor 02 tahun 2016 mencakup aspek terhadap air aman (tidak berasa, tidak berwarna, dan tidak berbau) serta pemenuhannya yang mencukup 60 liter/hari/orang.

Pengolahan Air Limbah merupakan kebutuhan mendasar yang harus dimiliki pada kawasan permukiman untuk mengelola air limbah dari rumah tangga/domestik di permukiman. Dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 2 tahun 2022 tentang Peningkatan Terhadap Kualitas Perumahan dan Permukiman Kumuh dijelaskan bahwa air bersih yang dimaksud adalah pengelolaan air limbah pada lingkungan perumahan atau permukiman tidak memiliki sistem yang memadai, yaitu terdiri dari kakus/kloset yang terhubung dengan tangki septik baik secara individual/domestik, komunal maupun terpusat Prasarana dan sarana pengelolaan air limbah memenuhi persyaratan teknis. Air limbah yang dimaksud adalah dari aktivitas rumah tangga.

No.	Kondisi Air Limbah	Foto Hasil Lapangan
1.	Kondisi Air Limbah Rumah Tangga	

Sumber : Dokumentasi lapangan, 2023

Tabel 5.8
Kondisi Air Limbah di Kelurahan 14 Ulu



Sumber : Olah Data Peneliti, 2023

Gambar 5.5
Peta Kondisi Air Limbah Kelurahan 14 Ulu

5.1.6 Pengelolaan Persampahan

Kriteria kekumuhan ditinjau dari pengelolaan persampahan sebagaimana dimaksud dalam dalam peraturan menteri PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) nomor 02 tahun 2016 mencakup prasarana dan sarana persampahan tidak sesuai dengan persyaratan teknis, sistem pengelolaan persampahan yang tidak sesuai standar teknis.

Masyarakat yang masih membuang sampah di mana saja dan sering pula di sungai yang mengalir dalam kota. Sehingga wajar saja sungai didalam kota serta tempat ditengah pemukiman menimbulkan bau tak sedap. Itu baru kekeliruan proses pembuangannya karena belum adanya kesadaran dan kejelasan pengaturannya, belum lagi kelemahan dari proses pengolahannya.

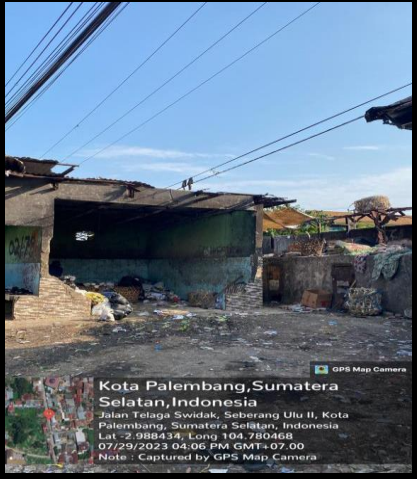

Adapun beberapa indikasi penyebab terjadinya masalah persampahan di kawasan adalah :

- a) Kurangnya kesadaran dari warga prioritas akan pentingnya kebersihan lingkungan.
- b) Sistem pengumpulan dan pembuangan sampah dan pengangkutan sampah yang sudah ada tidak efektif .
- c) Jumlah produksi sampah yang sangat tinggi pada area puncak kawasan ini di tunjang dengan semakin tingginya pertumbuhan penduduk kawasan.
- d) Faktor musim atau iklim akan mempengaruhi jumlah produksi sampah terutama sampah pada area sungai kali mandonga disebabkan sampah bawaan dari hulu sungai.

Tabel 5.9
Kondisi Persampahan di kelurahan 14 Ulu

Jenis Infrastruktur	Pengelola Izin Lingkungan	Perizinan Lahan	Potensi Dampak Yang timbul
Persampahan	SPPL	Hibah	Sumber berkembangbiaknya lalat dan serangga lain.
			Timbulnya bau dan pemandangan yang tidak sedap dipandang.
			Lingkungan area sekitar tergenang leachate

Sumber: RPLP, 2023

No.	Kondisi Persampahan	Foto Hasil Lapangan
1	TPS	 <p>Kota Palembang, Sumatera Selatan, Indonesia Jalan Telaga Swidak, Seberang Ulu II, Kota Palembang, Sumatera Selatan, Indonesia Lat +2.988434, Long 104.780468 07/29/2023 04:06 PM GMT+07.00 Note : Captured by GPS Map Camera</p>
2	Tempat Sampah lingkungan	 <p>Kota Palembang, Sumatera Selatan, Indonesia Lorong Pratu Musa, Seberang Ulu II, Kota Palembang, Sumatera Selatan, Indonesia Lat +2.986319, Long 104.781147 07/29/2023 04:37 PM GMT+07.00 Note : Captured by GPS Map Camera</p>

Sumber : Dokumentasi lapangan, 2023

Tabel 5.10
Kondisi Persampahan di Kelurahan 14 Ulu



Sumber: Olah data peneliti, 2023

Gambar 5.6

Peta Kondisi Pengelolaan Persampahan Kelurahan 14 Ulu

5.1.7 Pengaman Kebakaran

Kriteria kekumuhan ditinjau dari pengelolaan persampahan sebagaimana dimaksud dalam dalam peraturan menteri PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) nomor 02 tahun 2016 mencakup prasarana dan sarana persampahan tidak sesuai dengan persyaratan teknis, sistem pengelolaan persampahan yang tidak sesuai standar teknis.

Sarana penanggulangan kebakaran terdiri atas kendaraan operasional lapangan, peralatan teknik operasional dan kelengkapan perorangan. Kendaraan operasional lapangan yang digunakan untuk penanggulangan kebakaran antara lain:

- a) Mobil pompa pengangkut air dan foam berikut kelengkapannya, seperti selang, *kopling* dan *nozzle*,
- b) Mobil tangki berikut kelengkapannya,
- c) Mobil tangga,
- d) Snorkel,
- e) Mobil BA,
- f) Mobil komando,
- g) Mobil rescue,
- h) Mobil ambulans,
- i) Perahu karet,
- j) Mobil pendobrak,
- k) Mobil angkut pasukan pemadam kebakaran, dll.

Peralatan teknik operasional antara lain:

- a) Peralatan pendobrak antara lain: kapak, gergaji, dongkrak, linggis, spreader;
- b) Peralatan pemadam, antara lain: pompa jinjing (*portable pump*) dan kelengkapannya;
- c) Peralatan ventilasi, antara lain: blower jinjing (*portable blower*) dan kelengkapannya;
- d) Peralatan penyelamat (*rescue*), antara lain: sliding roll, *davy escape*, *fire blanket*, alat pernafasan buatan, usungan.

Berdasarkan keadaan eksisting di Kelurahan 14 Ulu belum terdapat infrastruktur untuk pengaman kebakaran, sedangkan dalam dokumen RPLP untuk tahun 2021 dan 2022 juga tidak terdapat rencana kegiatan pengadaan pengaman kebakaran. Sehingga tidak adanya peningkatan untuk pengamanan kebakaran di Kelurahan 14 Ulu Kota Palembang.

No.	Kondisi Proteksi Kebakaran	Foto Hasil Lapangan
1.	Kondisi Kantor Pos Kebakaran	

Sumber : Dokumentasi lapangan, 2023

Tabel 5.11
Kondisi Proteksi Kebakaran di Kelurahan 14 Ulu



Sumber : Olah data penelitian, 2023

Gambar 5.7
Peta Pos Kebakaran di Kelurahan 14 Ulu

5.2 Penilaian Program Kotaku di Kelurahan 14 Ulu Kota Palembang

5.2.1 Penilaian Kondisi Program Kotaku Berdasarkan Standar PUPR

5.2.1.1 Bangunan Hunian/Gedung

Berdasarkan standar PUPR No.2 Tahun 2016 menjelaskan bahwa ketidakberaturan bangunan merujuk pada persetujuan mendirikan bangunan untuk jangka waktu yang cukup panjang, untuk tingkat kepadatan bangunan yang tinggi tidak sesuai dengan ketentuan rencana tata ruang. Diketahui kondisi eksisting dilapangan bahwa bangunan belum sesuai dengan standar PUPR dan tidak beraturan dan untuk tingkat kepadatan bangunannya masih berdekatan, setelah dievaluasi untuk bangunan hunian/gedung di Kelurahan 14 ulu Kota Palembang belum dilakukannya perbaikan dikarenakan selain biaya ekonomi serta permasalahan seperti lahan dan sertifat rumah yang memuat pihak PUPR dan Kotaku ragu untuk melakukan tindakan lebih lanjut karna masih banyak tanah yang bermasalah atau sengketa dapat diketahui sebagai berikut:

Tabel 5.12

Kondisi Bangunan Gedung Setelah Program Kotaku

Standar	Kondisi Eksisting Kelurahan 14 Ulu Kota Palembang	Kondisi sesudah Kotaku	Hasil evaluasi	
			Sesuai	Tidak sesuai
Ketidakteraturan Bangunan: - Merujuk pada persetujuan mendirikan bangunan untuk jangka waktu	Diketahui bahwa kondisi perkumiman warga memiliki fisik bangunan yang belum sesuai standar PUPR dan tidak beraturan.	Belum dilakukan perbaikan karena selain biaya ekonomi yang tidak sedikit anggaran yang ada lebih fokus ke indikator lain serta permasalahan seperti lahan dan sertifat rumah.		√
Tingkat kepadataan bangunan: - Tingkat kepadatan bangunan yang tinggi yang tidak sesuai dengan ketentuan rencana tata ruang	Untuk tingkat kepadatan bangunan masih berdekatan.			

Sumber: Olah data peneliti, 2023

5.2.1.2 Jalan Lingkungan

Berdasarkan standar PUPR No.2 Tahun 2016 menyampaikan bahwa jalan lingkungan seharusnya memiliki lebar jalan 1,5 meter, memiliki saluran tepi jalan dan memiliki permukaan yang rata. Sedangkan kondisi eksisting dilapangan

semua jalan lingkungan di kelurahan 14 ulu sudah memiliki lebar jalan 1,5 meter, memiliki saluran tepi jalan dan permukaan jalan sudah rata semua.

Setelah dievaluasi Jalan lingkungan di Kelurahan 14 Ulu sudah memiliki lebar jalan lebih dari 1,5 meter terutama di RT.01, RT.02, RT.09, RT.25, RT.17, RT.20, semua jalan sudah memiliki saluran tepi jalan dan seluruh jalan lingkungan yang ada di kelurahan 14 Ulu memiliki permukaan yang rata. Adapun yang berlobang dikarenakan sudah lamanya jalan di bangun dan tergenang air seperti di RT.13/RW.02 dapat diketahui sebagai berikut :

Tabel 5.13
Kondisi Jalan Lingkungan Setelah Program Kotaku

Standar	Kondisi Eksisting Kelurahan 14 ulu Kota Palembang	Kondisi sesudah Kotaku	Hasil Akhir	
			Sesuai	Tidak sesuai
Memiliki lebar jalan 1,5 meter.	Kondisi semua jalan lingkungan di kelurahan 14 Ulu sudah memiliki lebar jalan 1,5 meter.	Jalan lingkungan di Kelurahan 14 Ulu sudah memiliki lebar jalan lebih dari 1,5 meter, sepanjang jalan dari RT.01, RT.02, RT.09, RT.25, RT.17, RT.20 .	√	
Memiliki saluran tepi jalan.	Untuk saluran tepi jalan ada.	Semua jalan lingkungan di RT/RW 14 Ulu memiliki aluran tepi jalan.	√	
Memiliki permukaan jalan yang rata.	Untuk permukaan jalan sudah sedmua rata.	Seluruh jalan lingkungan yang ada di kelurahan 14 Ulu memiliki permukaan yang rata. Adapun yang berlobang dikarenakan sudah lamanya jalan di bangun dan tergenang air seperti di RT.13/RW.02 .	√	

Sumber: olah data peneliti, 2023

5.2.1.3 Penyediaan Air Bersih

Menurut standard PUPR No.2 Tahun 2016 menyampaikan bahwa seharusnya air bersih itu yang tidak berasa, tidak berwarna dan tidak berbau dan juga mencakupi 60liter/hari/orang. Diketahui kondisi eksisting dilapangan bahwa penyediaan air bersih lokasi permukiman sudah terlayani jaringan Air Bersih/Baku perpipaan atau non perpipaan terlindungi dengan layak dan sudah terpenuhi kebutuhan minimal 60liter/org/hari (Mandi, Minum, Cuci).

Setelah dievaluasi untuk Penyediaan Air Bersih di Kelurahan 14 Ulu Kota Palembang sudah mampu memenuhi kebutuhan air bersih dengan aman dan mampu mencukupi kebutuhan perorang minimal 60 liter dalam sehari dan

Pembangunan infrastruktur air bersih seperti sumur, pompa, pipa, dan tangki air dapat diketahui sebagai berikut :

Tabel 5.14
Kondisi Penyediaan Air bersih Setelah Program Kotaku

Standar	Kondisi Eksisting Kelurahan 14 ulu Kota Palembang	Kondisi Sesudah Program Kotaku	Hasil Evaluasi	
			Sesuai	Tidak sesuai
Air tidak berasa, tidak berwarna, tidak berbau.	Penyediaan Air Bersih lokasi permukiman sudah terlayani jaringan Air Bersih/Baku perpipaan atau non perpipaan terlindungi dengan layak.	Ketersediaan air bersih untuk warga sudah sangat baik, warga menggunakan sumur pribadi. Sebagai contoh di kelurahan di RT.19/RW.04.	√	
Mencukupi minimal 60liter/hari/orang	sudah terpenuhi kebutuhan minimal 60liter/org/hari (Mandi, Minum, Cuci).	Kebutuhan Air bersih di RT.19 perhari 60 liter tercukupi dengan akses air dari sumur pribadi.	√	

Sumber: olah data peneliti, 2023

5.2.1.4 Drainase Lingkungan

Menurut standard PUPR No.2 Tahun 2016 menyatakan bahwa untuk drainase lingkungan seharusnya tidak terjadi genangan lebih dari 30 cm selama 2 jam, dan Adanya pelengkap prasarana drainase, misal gorong-gorong. Diketahui kondisi eksisting dilapangan bahwa ada beberapa titik aliran air yang masih tersumbat, itu dikarenakan mash banyak tumpukan sampah.

Setelah dievaluasi untuk kondisi drainase lingkungan di Kelurahan 14 Ulu Kota Palembang prasarana drainase lokal tersedia dibawah permukaan jalan, tidak memiliki sarana pelengkap drainse, serta pemeliharaan dilakukan oleh petugas dari RW dan juga swakelola warga yang tinggal dekat drainse tersebut, dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 5.15
Kondisi Drainase Lingkungan Setelah Program Kotaku

Standar	Kondisi Eksisting Kelurahan 14 ulu Kota Palembang	Kondisi Sesudah Program Kotaku	Hasil Evaluasi	
			Sesuai	Tidak sesuai
Tidak terjadi genangan lebih 30 cm selama 2 jam.	Kawasan permukiman sudah tidak ada genangan/banjir.	Prasarana drainase lokal tersedia di bawah permukaan jalan.	√	
Adanya pelengkap prasarana	Ada beberapa titik aliran air yang masih	Tidak memiliki sarana pelengkap drainase.		√

Standar	Kondisi Eksisting Kelurahan 14 ulu Kota Palembang	Kondisi Sesudah Program Kotaku	Hasil Evaluasi	
			Sesuai	Tidak sesuai
drainase, misal gorong-gorong.	tersumbat, itu dikarenakan masih banyak tumpukan sampah.			
Adanya pemeliharaan.		Pemeliharaan dilakukan oleh petugas dari RW dan juga swakelola warga RW yang tinggal dekat drainase.	√	

Sumber: Olah data peneliti, 2023

5.2.1.5 Pengelolaan Air Limbah

Menurut standard PUPR No.2 Tahun 2016 menyatakan bahwa seharusnya semua masyarakat memiliki kakus/kloset terhubung dengan septitank individu/komunal/terpusat. Diketahui kondisi eksisting dilapangan bahwa saluran drainase masih minim dan belum terkoneksi ke tempat pembuangan akhir dan belum tersedianya tempat pembuangan limbah rumah tangga.

Setelah dievaluasi untuk Pengelolaan Air Limbah di Kelurahan 14 Ulu Kota Palembang kakus/kloset warga RT/RW 14 ulu langsung terhubung ke sungai dan tidak memiliki SPAL dengan sistem setempat atau terpusat dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 5.16
Kondisi Pengelolaan Air Limbah Setelah Program Kotaku

Standar	Kondisi Eksisting Kelurahan 14 ulu Kota Palembang	Kondisi Sesudah Program Kotaku	Hasil Evaluasi	
			Sesuai	Tidak sesuai
Kakus/kloset terhubung dengan septitank individu/komunal/terpusat.	Saluran drainase masih minim dan belum terkoneksi ke tempat pembuangan akhir .	Kakus/kloset warga RT/RW 14 Ulu terhubung dengan sungai langsung.		√
Memiliki sistem setempat atau terpusat.	Belum tersedianya tempat pembuangan limbah rumah tangga.	Tidak memiliki SPAL dengan sistem setempat atau terpusat.		√

Sumber: Olah data peneliti, 2023

5.2.1.6 Pengelolaan Persampahan

Menurut standard PUPR No.2 Tahun 2016 menyatakan bahwa seharusnya disetiap kelurahan menyediakan tempat TPS, pemilahan sampah skala RT dan adanya pengumpulan sampah akhir (TPA). Diketahui kondisi eksisting bahwa belum adanya system pengolahan sampah terpadu, tidak adanya fasilitas

pembuangan sampah, dan belum ada kesadaran warga untuk membuang sampah pada tempatnya.

Setelah dievaluasi untuk Pengelolaan Persampahan di Kelurahan 14 Ulu Kota Palembang belum tersedianya tempat sampah dengan pemilahan sampah pada skala RT, tempat penampungan sementara (TPS) dikelurahan, bank sampah tempat pewadahan, pengumpulan skala lingkungan, pengangkutan skala lingkungan, pengolahan skala lingkungan dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 5.17
Kondisi Pengelolah persampahan Setelah Program Kotaku

Standar	Kondisi Eksisting Kelurahan 14 ulu Kota Palembang	Kondisi Sesudah Program Kotaku	Hasil evaluasi	
			Sesuai	Tidak sesuai
Tersedianya tempat pemilahan sampah skala RT	Belum ada sistem pengelolaan sampah terpadu.	Tidak tersedianya tempat pemilahan sampah skala RT		√
Tersedianya TPS	Tidak adanya fasilitas tempat sampah.	Tidak tersedianya TPS khusus 14 ulu		√
Adanya pengumpulan sampah	Belum ada kesadaran warga untuk membuang sampah pada tempatnya.	Tidak adanya tempat pengumpulan sampah berkonsep 3R		√

Sumber: Olah data peneliti, 2023

5.2.1.7 Proteksi Kebakaran

Menurut standard PUPR No.2 Tahun 2016 menyatakan bahwa kondisi keamanan kebakaran harusnya terdapat sarana dan prasarana proteksi kebakaran, diketahui kondisi eksisting kawasan permukiman tidak memiliki ketersediaan prasarana/sarana proteksi kebakaran.

Setelah dievaluasi Proteksi Kebakaran di Kelurahan 14 Ulu Kota Palembang belum terdapat infrastruktur untuk pengaman kebakaran, sedangkan dalam dokumen RPLP untuk tahun 2021 dan 2022 juga tidak terdapat rencana kegiatan pengadaan pengaman kebakaran. Sehingga tidak adanya peningkatan untuk pengamanan kebakaran di Kelurahan 14 Ulu dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 5.18
Kondisi Proteksi Kebakaran Setelah Program Kotaku

Standar	Kondisi Eksisting Kelurahan 14 ulu Kota Palembang	Evaluasi Sesudah Program Kotaku	Hasil Evluaasi	
			Sesuai	Tidak sesuai
Kondisi keamanan kebakaran. - prasarana proteksi kebakaran - sarana proteksi kebakaran	Untuk kawasan permukiman tidak memiliki ketersediaan prasarana/sarana proteksi kebakaran.	Belum ada infrastrukturnya dan tidak ada rencana untuk infrastruktur pengamanan kebakaran untuk jangka waktu dekat.		√

Sumber: olah data peneliti, 2023

5.2.2 Penilaian Program Kotaku Berdasarkan Persepsi Masyarakat

5.2.2.1 Penilaian Kondisi Hunian Bangunan / Gedung

Untuk mengetahui tanggapan responden mengenai kondisi kualitas Hunian bangunan/tempat tinggal di kelurahan 14 ulu Kota Palembang, dimana konsep penilaiannya berdasarkan 5 penilaian siap yakni 1; sangat baik, 2; baik, 3; cukup, 4; buruk, 5; sangat buruk dengan metode analisis distribusi frekuensi. Berikut sebaran distribusi jawaban responden berdasarkan hunian bangunan /tempat tinggal.

Tabel 5.19
Evaluasi Kondisi Bangunan/Gedung Kelurahan 14 Ulu

No.	Kategori	Frekuensi	Persentase (%)
1	Sangat Baik	0	00.00
2	Baik	0	00.00
3	Cukup	0	00.00
4	Buruk	0	00.00
5	Sangat Buruk	100	100.00
Jumlah		100	100

Sumber : Olah data Peneliti, 2023

Berdasarkan data pada tabel berikut dari 100 responden diketahui bahwa warga berpendapat untuk hunian bangunan sangat buruk karena tidak ada program atau perencanaan jangka pendek atau panjang perbaikan hunian bangunan / gedung 14 Ulu Kota Palembang.

Berdasarkan hasil tersebut diketahui bahwa persepsi warga tentang evaluasi bangunan hunian di 14 Ulu Kota Palembang hal umum yang mungkin dimiliki oleh masyarakat frustrasi dan keputusasaan dimana masyarakat yang tinggal dalam hunian kumuh tanpa perbaikan yang memadai mungkin merasa frustrasi dan putus asa karena merasa terjebak dalam kondisi yang sulit dan tidak ada perbaikan yang terlihat dalam jangka pendek maupun panjang serta ketidakpercayaan terhadap pemerintah dan otoritas.

Bila masyarakat telah lama tinggal dalam kondisi hunian yang tidak layak namun tidak ada upaya perbaikan yang signifikan dari pihak pemerintah atau otoritas terkait, mereka mungkin menjadi kurang percaya terhadap kemampuan atau niat pemerintah untuk memperbaiki situasi mereka.

5.2.2.2 Penilaian Kondisi Jalan Lingkungan

Untuk mengetahui tanggapan responden mengenai kondisi kualitas kondisi jalan lingkungan di kelurahan 14 ulu Kota Palembang, dimana konsep penilaiannya berdasarkan 5 penilaian siap yakni 1; sangat baik, 2; baik, 3; cukup, 4; buruk, 5; sangat buruk dengan metode analisis distribusi frekuensi. Berikut sebaran distribusi jawaban responden berdasarkan kondisi jalan lingkungan.

Tabel 5.20
Evaluasi Kondisi Jalan Kelurahan 14 Ulu

No.	Kategori	Frekuensi	Persentase (%)
1	Sangat Baik	0	00.00
2	Baik	0	00.00
3	Cukup	25	25.00
4	Buruk	75	75.00
5	Sangat Buruk	0	00.00
Jumlah		100	100

Sumber : Olah data Peneliti, 2023

Berdasarkan data pada tabel berikut dari 100 responden diketahui bahwa sebagian besar responden yakni 75 orang (75,0%) menyatakan keadaan jalan di adalah buruk, sedangkan 25 orang (25,0%) menyatakan keadaannya cukup. Berdasarkan hasil tersebut diketahui bahwa persepsi masyarakat tentang evaluasi jalan di 14 Ulu Kota Palembang. Pada umumnya masyarakat mungkin merasa kecewa terhadap pemerintah karena merasa bahwa upaya pembangunan jalan

tidak mencapai hasil yang diharapkan. jalan yang masih buruk setelah pembangunan dapat dianggap sebagai tanda ketidakefisienan atau kurangnya tanggung jawab dari pihak pemerintah. dan warga mengharapkan permintaan untuk perbaikan lanjutan masyarakat mungkin meminta perbaikan lanjutan atau pemeliharaan rutin untuk memastikan jalan tetap dalam kondisi yang baik setelah pembangunan awal. jika perbaikan tidak dilakukan secara berkala, kondisi jalan dapat memburuk seiring waktu.

Perlu dicatat bahwa persepsi masyarakat tentang perbaikan jalan yang masih buruk setelah adanya pembangunan dapat bervariasi tergantung pada tingkat keterlibatan dan pemahaman masyarakat tentang proses pembangunan infrastruktur. Selain itu, faktor-faktor seperti anggaran, teknisitas, dan sumber daya manusia yang terlibat dalam pembangunan jalan juga dapat mempengaruhi hasil akhir dari proyek tersebut. Penting bagi pemerintah dan otoritas terkait untuk mendengarkan dan merespons masukan dari masyarakat guna meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur yang lebih baik.

5.2.2.3 Penilaian Kondisi Penyediaan Air Bersih

Untuk mengetahui tanggapan responden mengenai kondisi kualitas kondisi penyediaan air bersih di kelurahan 14 ulu Kota Palembang, dimana konsep penilaiannya berdasarkan 5 penilaian siap yakni 1; sangat baik, 2; baik, 3; cukup, 4; buruk, 5; sangat buruk dengan metode analisis distribusi frekuensi. Berikut sebaran distribusi jawaban responden berdasarkan kondisi penyediaan air bersih.

Tabel 5.21
Evaluasi Kondisi Penyediaan Air Bersih Kelurahan 14 Ulu

No.	Kategori	Frekuensi	Persentase (%)
1	Sangat Baik	0	00.00
2	Baik	0	00.00
3	Cukup	15	15.00
4	Buruk	23	23.00
5	Sangat Buruk	62	62.00
Jumlah		100	100

Sumber : Olah data Peneliti, 2023

Berdasarkan data pada tabel berikut dari 100 responden diketahui bahwa sebagian besar responden yakni 62 orang (62,0%) menyatakan ketersediaan air

minum di rumah sangat buruk, 23 orang (23,0%) menyatakan buruk dan 15 orang (15,0%) menyatakan cukup. Berdasarkan hasil tersebut diketahui bahwa persepsi masyarakat tentang evaluasi air bersih di 14 Ulu Kota Palembang. Pada umumnya Masyarakat yang masih menghadapi masalah air bersih setelah adanya pembangunan infrastruktur mungkin merasa frustrasi dan kecewa. Mereka mungkin berharap bahwa pembangunan akan memperbaiki masalah akses terhadap air bersih, namun jika kondisi tetap buruk, mereka mungkin merasa bahwa usaha pemerintah tidak mencapai hasil yang diharapkan dan Ketidakberfungsian infrastruktur air bersih dapat menyebabkan gangguan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.

Masyarakat dapat menghadapi kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti air minum, mandi, dan memasak serta Akses terhadap air bersih yang buruk dapat menyebabkan masalah kesehatan dan kebersihan. Masyarakat mungkin harus bergantung pada sumber air yang tidak higienis, yang dapat menyebabkan penyebaran penyakit dan kondisi kesehatan yang buruk.

5.2.2.4 Penilaian Kondisi Drainase Lingkungan

Untuk mengetahui tanggapan responden mengenai kondisi kualitas drainase lingkungan di kelurahan 14 ulu Kota Palembang, dimana konsep penilaiannya berdasarkan 5 penilaian siap yakni 1; sangat baik, 2; baik, 3; cukup, 4; buruk, 5; sangat buruk dengan metode analisis distribusi frekuensi. Berikut sebaran distribusi jawaban responden berdasarkan kondisi drainase lingkungan.

Tabel 5.22
Evaluasi Kondisi Drainase Kelurahan 14 Ulu

No.	Kategori	Frekuensi	Persentase (%)
1	Sangat Baik	0	00.00
2	Baik	26	26.00
3	Cukup	51	51.00
4	Buruk	23	23.00
5	Sangat Buruk	0	00.00
Jumlah		100	100

Sumber : Olah data Peneliti, 2023

Berdasarkan data pada tabel berikut dari 100 responden diketahui bahwa sebagian besar responden yakni 26 orang (26%) menyatakan pengelolaan drainase baik, 51 orang (51%) menyatakan cukup dan 23 orang (23%) menyatakan buruk. Berdasarkan hasil tersebut diketahui bahwa persepsi masyarakat tentang evaluasi drainase di 14 Ulu Kota Palembang. Pada umumnya Drainase yang buruk dapat menyebabkan banjir atau genangan air, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi kualitas hidup masyarakat. Dampak ini bisa berupa kerusakan properti, gangguan transportasi, kesulitan dalam mobilitas, dan masalah kesehatan akibat paparan air yang tercemar.

Dalam menghadapi masalah infrastruktur drainase yang masih kurang memuaskan, penting bagi pemerintah dan otoritas terkait untuk mendengarkan pendapat dan masukan dari masyarakat. Transparansi, komunikasi yang baik, dan keterlibatan masyarakat dalam proses perbaikan dapat membantu menciptakan solusi yang lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu, evaluasi dan perbaikan terus-menerus atas infrastruktur drainase menjadi penting untuk mengatasi tantangan dalam menghadapi perubahan iklim dan pertumbuhan perkotaan yang berdampak pada sistem drainase.

5.2.2.5 Penilaian Kondisi Air Limbah

Untuk mengetahui tanggapan responden mengenai kondisi kualitas air limbah di kelurahan 14 ulu Kota Palembang, dimana konsep penilaiannya berdasarkan 5 penilaian siap yakni 1; sangat baik, 2; baik, 3; cukup, 4; buruk, 5; sangat buruk dengan metode analisis distribusi frekuensi. Berikut sebaran distribusi jawaban responden berdasarkan kondisi air limbah.

Tabel 5.23
Kondisi Pengelolaan Air Limbah

No.	Kategori	Frekuensi	Persentase (%)
1	Sangat Baik	0	00.00
2	Baik	0	00.00
3	Cukup	19	19.00
4	Buruk	26	26.00
5	Sangat Buruk	55	55.00
Jumlah		100	100

Sumber : Olah data Peneliti, 2023

Berdasarkan data pada tabel berikut dari 100 responden diketahui bahwa sebagian besar responden yakni 55 orang (55%) menyatakan pengelolaan air limbah di rumah sangat buruk, 26 orang (26%) menyatakan buruk dan 19 orang (19%) menyatakan cukup. Berdasarkan hasil tersebut diketahui bahwa persepsi warga tentang evaluasi air limbah di 14 Ulu Kota Palembang. Hasil yang masih buruk setelah pembangunan dapat menyebabkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap kualitas pekerjaan konstruksi dan teknologi yang digunakan dalam proyek air limbah.

Masyarakat mungkin meragukan apakah pembangunan dilakukan dengan standar yang sesuai dan Selama pembangunan atau perbaikan infrastruktur air limbah, masyarakat mungkin telah mengalami gangguan dan ketidaknyamanan, seperti pembatasan akses atau kemacetan lalu lintas. Jika hasilnya masih buruk, masyarakat akan merasa bahwa mereka telah menderita tanpa manfaat yang signifikan.

Penting bagi pemerintah dan otoritas terkait untuk mendengarkan pendapat masyarakat dan merespons masukan mereka dengan serius. Evaluasi terhadap perbaikan infrastruktur air limbah yang tidak memuaskan perlu dilakukan untuk mengidentifikasi masalah dan menemukan solusi yang lebih baik. Transparansi dalam proses pembangunan, keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan pemantauan proyek, serta tindakan nyata untuk meningkatkan infrastruktur air limbah adalah langkah-langkah yang diperlukan untuk mengatasi masalah ini dan memenuhi kebutuhan masyarakat.

5.2.2.6 Penilaian Kondisi Pengelolaan Persampahan

Untuk mengetahui tanggapan responden mengenai kondisi kualitas pengelolaan persampahan di kelurahan 14 ulu Kota Palembang, dimana konsep penilaiannya berdasarkan 5 penilaian siap yakni 1; sangat baik, 2; baik, 3; cukup, 4; buruk, 5; sangat buruk dengan metode analisis distribusi frekuensi. Berikut sebaran distribusi jawaban responden berdasarkan kondisi pengelolaan persampahan.

Tabel 5. 24
Evaluasi Kondisi Pengelolaan Persampahan Kelurahan 14 Ulu

No.	Kategori	Frekuensi	Persentase (%)
1	Sangat Baik	0	00.00
2	Baik	0	00.00
3	Cukup	23	23.00
4	Buruk	26	26.00
5	Sangat Buruk	51	51.00
Jumlah		100	100

Sumber : Olah data Peneliti, 2023

Berdasarkan data pada tabel berikut dari 100 responden diketahui bahwa sebagian besar responden yakni 51 orang (51%) menyatakan pengelolaan persampahan di rumah sangat buruk, 26 orang (26%) menyatakan buruk dan 23 orang (23%) menyatakan cukup. Berdasarkan hasil tersebut diketahui bahwa persepsi masyarakat tentang evaluasi pengelolaan persampahan di 14 Ulu Kota Palembang diketahui bahwa ketidakpuasan terhadap penggunaan dana publik jika perbaikan infrastruktur pengelolaan sampah tidak memberikan hasil yang memuaskan, masyarakat dapat merasa tidak puas dengan penggunaan dana publik untuk pembangunan tersebut. Mereka mungkin berpendapat bahwa dana tersebut sebaiknya digunakan untuk kebutuhan lain yang lebih mendesak atau efektif.

Penting bagi pemerintah dan otoritas terkait untuk mendengarkan pendapat masyarakat dan merespons masukan mereka dengan serius. Evaluasi terhadap perbaikan infrastruktur pengelolaan sampah yang tidak memuaskan perlu dilakukan untuk mengidentifikasi masalah dan menemukan solusi yang lebih baik. Transparansi dalam proses pembangunan, keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan pemantauan proyek, serta tindakan nyata untuk meningkatkan infrastruktur pengelolaan sampah adalah langkah-langkah yang diperlukan untuk mengatasi masalah ini dan memenuhi kebutuhan masyarakat.

5.2.2.7 Penilaian Kondisi Proteksi Kebakaran

Untuk mengetahui tanggapan responden mengenai kondisi kualitas proteksi kebakaran di kelurahan 14 ulu Kota Palembang, dimana konsep penilaiannya berdasarkan 5 penilaian siap yakni 1; sangat baik, 2; baik, 3; cukup,

4; buruk, 5; sangat buruk dengan metode analisis distribusi frekuensi. Berikut sebaran distribusi jawaban responden berdasarkan kondisi proteksi kebakaran.

Tabel 5.25
Evaluasi Kondisi Proteksi Kebakaran Kelurahan 14 Ulu

No.	Kategori	Frekuensi	Persentase (%)
1	Sangat Baik	0	00.00
2	Baik	0	00.00
3	Cukup	0	00.00
4	Buruk	0	00.00
5	Sangat Buruk	100	100.00
Jumlah		100	100

Sumber : Data Olah Penelitian,2023

Berdasarkan data pada tabel berikut dari 100 responden diketahui bahwa masyarakat berpendapat untuk proteksi kebakaran sangat buruk karena tidak ada mitigasi untuk mencegah hal tersebut dalam hal ini baik dari itu program maupun infrastruktur. Berdasarkan hasil tersebut diketahui bahwa persepsi warga tentang evaluasi proteksi kebakaran di 14 Ulu Kota Palembang diketahui bahwa masyarakat yang tinggal di hunian bangunan kumuh tanpa proteksi kebakaran yang memadai mungkin merasa tidak aman dan cemas terhadap potensi bahaya kebakaran.

Mereka menyadari bahwa risiko kebakaran dapat menyebabkan kerugian besar dan bahkan mengancam keselamatan jiwa dan keterbatasan akses terhadap layanan darurat di hunian kumuh, akses terhadap layanan pemadam kebakaran mungkin terbatas atau bahkan tidak ada sama sekali. Masyarakat dapat merasa terisolasi dan khawatir jika terjadi kebakaran, bantuan tidak dapat tiba tepat waktu untuk mengatasi situasi darurat. Persepsi negatif ini tentu sangat penting untuk diperhatikan oleh pemerintah dan otoritas terkait. Diperlukan tindakan nyata untuk meningkatkan kondisi hunian kumuh dan memberikan perlindungan kebakaran yang memadai bagi masyarakat yang tinggal di sana.

Program perbaikan hunian, pengembangan sistem proteksi kebakaran yang efektif, dan perencanaan kota yang berkelanjutan dapat membantu mengatasi masalah ini dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang terpengaruh.

Selain itu, melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan proyek juga dapat membantu menciptakan solusi yang lebih relevan dan berdaya guna bagi masyarakat yang bersangkutan.

Tabel 5.26

Penilaian Keseluruhan Penanganan Permukiman Kumuh

No.	Indikator	Kondisi eksisting	Standard PUPR	Persepsi Masyarakat	Hasil standard PUPR		Evaluasi persepsi masyarakat				
					sesuai	tidak sesuai	ss	s	n	ts	Sts
1.	Bangunan Gedung	Diketahui bahwa kondisi perkumihan warga memiliki fisik bangunan yang tidak beraturan dan	Ketidakteraturan Bangunan: Merujuk pada persetujuan mendirikan bangunan untuk jangka waktu.	Berdasarkan hasil tersebut diketahui bahwa persepsi warga tentang evaluasi bangunan hunian di 14 Ulu Kota Palembang hal umum yang mungkin dimiliki oleh masyarakat frustrasi dan keputusasaan dimana masyarakat yang tinggal dalam hunian kumuh tanpa perbaikan yang memadai mungkin merasa frustrasi dan putus asa karena merasa terjebak dalam kondisi yang sulit dan tidak ada perbaikan yang terlihat dalam jangka pendek maupun panjang serta ketidakpercayaan terhadap pemerintah dan otoritas.		√	0	0	0	0	100 %
		Untuk tingkat kepadatan bangunan masih berdekatan.	Tingkat kepadatan bangunan: Tingkat kepadatan bangunan yang tinggi yang tidak sesuai.								

2.	Jalan Lingkungan	Kondisi semua jalan lingkungan sudah memiliki lebar jalan 1,5 meter,	Memiliki lebar jalan 1,5 meter.	Berdasarkan hasil tersebut diketahui bahwa persepsi masyarakat tentang evaluasi jalan di 14 Ulu Kota Palembang. Pada umumnya masyarakat mungkin merasa kecewa terhadap pemerintah karena merasa bahwa upaya pembangunan jalan tidak mencapai hasil yang diharapkan. jalan yang masih buruk setelah pembangunan dapat dianggap sebagai tanda ketidakefisienan atau kurangnya tanggung jawab dari pihak pemerintah. dan warga mengharapkan permintaan untuk perbaikan lanjutan masyarakat mungkin meminta perbaikan lanjutan atau pemeliharaan rutin untuk memastikan jalan tetap dalam kondisi yang baik setelah pembangunan awal. jika perbaikan tidak dilakukan secara berkala, kondisi jalan dapat memburuk seiring waktu.	√		0	0	25 %	75 %	0
		Untuk saluran tepi jalan ada.	Memiliki saluran tepi jalan.		√						
		permukaan jalan sudah semua rata.	Memiliki permukaan jalan yang rata.		√						

3.	Air Bersih	Penyediaan Air Bersih sudah terlayani jaringan Air Bersih perpipaan atau non perpipaan.	Air tidak berasa, tidak berwarna, tidak berbau.	Berdasarkan hasil tersebut diketahui bahwa persepsi masyarakat tentang evaluasi air bersih di 14 Ulu Kota Palembang. Pada umumnya Masyarakat yang masih menghadapi masalah air bersih setelah adanya pembangunan infrastruktur mungkin merasa frustrasi dan kecewa. Mereka mungkin berharap bahwa pembangunan akan memperbaiki masalah akses terhadap air bersih, namun jika kondisi tetap buruk, mereka mungkin merasa bahwa usaha pemerintah tidak mencapai hasil yang diharapkan dan Ketidakberfungsian infrastruktur air bersih dapat menyebabkan gangguan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.	√							
		sudah terpenuhi kebutuhan minimal 60liter/org/hari (Mandi, Minum, Cuci).	Dan mencukupi minimal 60liter/hari/orang		√		0	0	15 %	23 %	62 %	
4.	Drainase	Kawasan permukiman sudah tidak ada genangan/banjir.	Tidak terjadi genangan lebih 30 cm selama 2 jam	Berdasarkan hasil tersebut diketahui bahwa persepsi masyarakat tentang evaluasi	√		0	26 %	51 %	23 %	0	

		Ada beberapa titik aliran air yang masih tersumbat	Adanya pelengkap prasarana drainase, misal gorong-gorong.	drainase di 14 Ulu Kota Palembang. Pada umumnya Drainase yang buruk dapat menyebabkan banjir atau genangan air, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi kualitas hidup masyarakat. Dampak ini bisa berupa kerusakan properti, gangguan transportasi, kesulitan dalam mobilitas, dan masalah kesehatan akibat paparan air yang tercemar.	√						
			Adanya pemeliharaan.		√						
5.	Air limbah	Saluran drainase masih minim dan belum terkoneksi ke tempat pembuangan akhir .	Kakus/kloset terhubung dengan septitank individu/komunal/terpusat	Berdasarkan hasil tersebut diketahui bahwa persepsi warga tentang evaluasi air limbah di 14 Ulu Kota Palembang. Hasil yang masih buruk setelah pembangunan dapat menyebabkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap kualitas pekerjaan konstruksi dan teknologi yang digunakan dalam proyek air limbah.	√	0	0	19 %	26 %	55 %	
		Belum tersedianya tempat pembuangan limbah rumah tangga.	Memiliki sistem setempat atau terpusat.		√						

6.	Persampahan	Belum ada sistem pengolahan sampah terpadu.	Tersedianya tempat pemilahan sampah skala RT	Berdasarkan hasil tersebut diketahui bahwa persepsi masyarakat tentang evaluasi pengelolaan persampahan di 14 Ulu Kota Palembang diketahui bahwa ketidakpuasan terhadap penggunaan dana publik jika perbaikan infrastruktur pengelolaan sampah tidak memberikan hasil yang memuaskan, masyarakat dapat merasa tidak puas dengan penggunaan dana publik untuk pembangunan tersebut.	√	0	0	23 %	26 %	51 %
		Tidak adanya fasilitas tempat sampah.	Tersedianya TPS.		√					
		Belum ada kesadaran warga untuk membuang sampah pada tempatnya	Adanya pengumpulan sampah		√					
7.	Proteksi Kebakaran	Untuk kawasan permukiman tidak memiliki ketersediaan prasarana/sarana proteksi kebakaran.	Kondisi keamanan kebakaran. - prasarana proteksi kebakaran - sarana proteksi kebakaran	Berdasarkan hasil tersebut diketahui bahwa persepsi warga tentang evaluasi proteksi kebakaran di 14 Ulu Kota Palembang diketahui bahwa masyarakat yang tinggal di hunian bangunan kumuh tanpa proteksi kebakaran yang memadai mungkin merasa tidak aman dan cemas terhadap potensi bahaya kebakaran.	√	0	0	0	0	100 %

Sumber: olah data peneliti, 2023

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan sasaran penelitian yaitu; untuk kondisi eksisting kelurahan 14 ulu Kota Palembang setelah dilaksanakannya program KOTAKU bisa dilihat langsung dari kondisi lapangannya hasil penelitian didapati sasaran dari ke tujuh (7) yang terdiri dari: (1) Hunian Bangunan; diketahui bahwa kondisi permukiman warga memiliki fisik bangunan yang tidak beraturan dan untuk tingkat kepadatan bangunan masih berdekatan. (2) Jalan Lingkungan; untuk kondisi semua jalan lingkungan sudah memiliki lebar jalan 1,5 meter, sudah memiliki saluran tepi jalan dan permukaan jalan sudah rata. (3) Air Bersih; Penyediaan Air Bersih sudah terlayani jaringan Air Bersih perpipaan atau non perpipaan dan sudah terpenuhinya kebutuhan minimal 60 liter/org/hari (Mandi, Minum, Cuci). (4) Drainase Lingkungan; Kawasan permukiman sudah tidak ada genangan/banjir dan ada beberapa titik aliran air yang masih tersumbat yang disebabkan oleh sampah. (5) Air Limbah; Saluran drainase masih minim dan belum terkoneksi ke tempat pembuangan akhir dan belum tersedianya tempat pembuangan limbah rumah tangga. (6) Pengelolaan Persampahan; belum ada sistem pengelolaan sampah terpadu, tidak adanya fasilitas tempat sampah dan tidak ada kesadaran warga untuk membuang sampah pada tempatnya. Dan (7) Proteksi Kebakaran; Untuk kawasan permukiman tidak memiliki ketersediaan prasarana/sarana proteksi kebakaran. Perubahan setelah adanya program KOTAKU di Kelurahan 14 Ulu untuk kondisi eksisting sudah tergolong cukup dalam pemenuhan sasaran walaupun belum semuanya.

Berdasarkan standar PUPR No.2 Tahun 2016 dari ke tujuh (7) indikator tersebut (1). Bangunan Gedung/ Hunian Ketidakteraturan Bangunan: Merujuk pada persetujuan mendirikan bangunan untuk jangka waktu dan tingkat kepadatan bangunan yang tinggi yang tidak sesuai, (2). Jalan Lingkungan ; harus memiliki

lebar jalan 1,5 meter, memiliki saluran tepi jalan dan memiliki permukaan jalan yang rata, (3) Air Bersih ; Air seharusnya tidak berasa, tidak berwarna, tidak berbau dan mencukupi minimal 60liter/hari/orang, (4). Drainase Lingkungan; seharusnya tidak terjadi genangan lebih 30 cm selama 2 jam dan harus ada pelengkap prasarana drainase, misal gorong-gorong, (5). Air Limbah; Kakus/kloset terhubung dengan septitank individu/komunal/terpusat dan memiliki sistem setempat atau terpusat, (6). Pengolahan Persampahan; Tersedianya tempat pemilahan sampah skala RT, tersedianya TPS dan adanya pengumpulan sampah, (7). Proteksi kebakaran; Kondisi keamanan kebakaran (prasarana proteksi kebakaran dan sarana proteksi kebakaran). Berdasarkan hasil sasaran tersebut diketahui untuk dimensi hunian bangunan dan proteksi kebakaran tidak menunjukkan perubahan dan bahkan dalam rencana RPL tahun selanjutnya tidak membahas hal tersebut hal ini disebabkan untuk hunian bangunan yang terkendala biaya serta permasalahan lahan dan permasalahan proteksi juga demikian.

Menurut persepsi masyarakat penanganan permukiman kumuh di kelurahan 14 ulu masih termasuk kedalam kumuh ringan, bisa terjadinya kekumuhan karena disebabkan oleh masyarakatnya yang tidak bertanggung jawab dan tidak ada kesadaran masyarakatnya itu sendiri dengan lingkungan sekitar bahkan masih banyaknya masyarakat membuang sampah tidak pada tempatnya, maka dari itu terjadinya permukiman kumuh kembali.

5.2 Saran

Berdasarkan data yang diperoleh maka peneliti mensarankan untuk:

➤ Pemerintah;

- 1) Memberikan edukasi tentang lingkungan permukiman yang sehat bagi masyarakat permukiman kumuh khususnya di kawasan Kelurahan 14 Ulu Palembang.
- 2) Menyediakan lahan permukiman yang sehat dan terjangkau bagi masyarakat, jika revitalisasi dilaksanakan.

➤ **Warga Di Kelurahan 14 Ulu Palembang;**

- 1) Menjaga fasilitas dan memanfaatkan fasilitas yang telah diberikan oleh pemerintah sesuai kebutuhan.

➤ **Lokasi Penelitian;**

- 1) Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi bahan masukan bagi lokasi penelitian ini sebagai alat pertimbangan dan harapan dapat mengoptimalkan kondisi bangunan dan pengelolaan persampahan di Kelurahan 14 Ulu Kota Palembang.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal:

- Aisyah, A. (2022). Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) Di Kelurahan Tallo Kecamatan Tallo Makassar *Implementation Of The Slum-Free City Program (Kotaku) In Tallo Sub-District, Tallo Sub-District, Makassar City*. Universitas Hasanuddin.
- Asnani, A., Purnama, D. H., & Priadi, D. P. (2018). Penataan Permukiman Kumuh di Kelurahan Talang Putri Palembang. *Demography Journal of Sriwijaya (DeJoS)*, 1(2), 24–35.
- Creswell, J. W. (2016). *Research design: pendekatan metode kualitatif, kuantitatif, dan campuran*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 5.
- Ervianto, W. I., & Felasari, S. (2019). Pengelolaan permukiman kumuh berkelanjutan di perkotaan. *Jurnal Spektran*, 7(2).
- Hamdani, H. (2020). Pelaksanaan Kebijakan Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) Oleh Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pencegahan Dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Handika, V., & Yusran, R. (2020). Implementasi Program Kotaku dalam Upaya Mengatasi Pemukiman Kumuh di Kabupaten Lima Puluh Kota. *Journal of Civic Education*, 3(3), 277–286.
- Irma. (2019). Evaluasi Tata Kelola Program Kota Tanpa Kumuh “Kotaku” Di Kota Makassar (Studi Kasus Kelurahan Parang Tambung).
- Jannah, R., & Mardiyanto, M. (2019). Implementasi Program Kota tanpa Kumuh (Kotaku) di Kelurahan Kemang Agung Kecamatan Kertapati Kota Palembang Tahun 2017. *Demography Journal of Sriwijaya (DeJoS)*, 3(1), 13–27.
- Joni, R. P. (2019). Evaluasi Pelaksanaan Program Kotaku (Kota Tanpa Kumuh) Di Kota Pekanbaru (Studi Kasus: Kelurahan Pesisir Kecamatan Limapuluh Kota Pekanbaru). Universitas Islam Riau.

- Kamil, I. (2018). Peran Komunikasi Pemerintahan dalam Penanganan Lingkungan Kumuh. *Mediator: Jurnal Komunikasi*, 11(1), 129–139.
- Kementerian pekerjaan Umum. (2019). Penuntasan Kawasan Permukiman Kumuh. *Buletin Cipta Karya*, 12.
- Liandri, B. (2019). Evaluasi Program Kotaku (Kota Tanpa Kumuh) Kelurahan Lebakgee Kecamatan Coblong Kota Bandung. Universitas Komputer Indonesia.
- Putro, J. D. (2011). Penataan Kawasan Kumuh Pinggiran Sungai Di Kecamatan Sungai Raya. *11(1)*.
- Ramadhan, I. (2021). Fungsi Perencanaan Partisipatif Dalam Efektivitas Pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh Di Kota Binjai.
- Ridwan, R., Rusli, B., Saefullah, A. D., & Nurasa, H. (2019). Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh di Kota Cilegon. *Jurnal Administrasi Publik*, 10(2).
- Saleh, D. (2021). Evaluasi Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) Di Kota Sukabumi. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2(5), 1557–1564.
- Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. CV
- Surtiani, E. E. (2006). Faktor-faktor yang mempengaruhi terciptanya kawasan permukiman kumuh di kawasan pusat kota (studi kasus: kawasan pancuran, salatiga). program Pascasarjana Universitas Diponegoro.
- Syamsiar, N. R., Surya, B., & Tato, S. (2020). Evaluasi Penanganan Permukiman Kumuh: Studi Pada Penanganan Program Kotaku Kelurahan Banggae Kabupaten Majene. *Urban and Regional Studies Journal*, 2(2), 54–65.
- Violeta, P. O. (2019). Implementasi Strategi Penanganan Kawasan Pemukiman Kumuh Kota Palembang Di Kecamatan Seberang Ulu I. Institut Pemerintahan Dalam Negeri.
- Wijaya, D. W. (2016). Perencanaan Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh (Studi Penentuan Kawasan Prioritas untuk Peningkatan Kualitas Infrastruktur pada Kawasan Pemukiman Kumuh di Kota Malang). *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 2(1), 1–10.
- Wimardana, A. S. (2016). Faktor Prioritas Penyebab Kumuh Kawasan

Permukiman Kumuh Di Kelurahan Belitung Selatan Kota Banjarmasin.
Sepuluh November Institute of Technology.

Zulkhah, S., & Garside, A. K. (2022). Penanganan Permukiman Kumuh pada Kawasan Blimbing, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan.

Zulyanti, D. (2017). Implementasi Program Kotaku (Kota Tanpa Kumuh) Sebagai Model Pembangunan Infrastruktur Berbasis Masyarakat Di Kelurahan Negeri Olok Gading Kecamatan Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung. UIN Raden Intan Lampung.

Website :

https://kotaku.pu.go.id/view/7879/percepat-tuntaskan-sisa-luasan-kumuh_kotaku-gelar-rakor, 14 febuari 2023.

<https://palembangkota.bps.go.id/publication/2021/09/24/9f812d56c86018e5e38bbdb0/kecamatan-seberang-ulu-dua-dalam-angka-2022>. 23 mei 2023

<http://lib.unnes.ac.id/42133/1/3312416055.pdf>, 8 juli 2023.

Undang-Undang:

UU Nomor 01 Tahun 2011 *Tentang Perumahan dan kawasan Permukiman.*

UU Nomor 02 Tahun 2022 *Tentang peningkatan kualitas terhadap permukiman kumuh dan perumahan kumuh.*

PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) No. 02 tahun 2016.

RPLP Kelurahan 14 Ulu Kota Palembang tahun 2019.

LAMPIRAN

1

Kuesioner Untuk Masyarakat Kelurahan 14 Ulu Kota Palembang

❖ Identitas Responden (Masyarakat)

1. Nama :
2. Jenis Kelamin :
3. Usia :

❖ KONDISI SESUDAH PELAKSANAAN PROGRAM KOTAKU KELURAHAN 14 ULU KOTA PALEMBANG

1. Kondisi Bangunan Gedung

No	DAFTAR PERTANYAAN	Alternatif jawaban				
		SS	S	N	TS	STS
		5	4	3	2	1
1.	Apakah dengan adanya Program KOTAKU sudah tertata dengan baik?					
2.	Apakah ada persyaratan teknis mengenai sanitasi?					
3.	Apakah ada persyaratan teknis mengenai pengamanan petir?					
4.	Apakah ada persyaratan teknis mengenai pencahayaan?					

2. Kondisi Jalan Lingkungan

No	DAFTAR PERTANYAAN	Alternatif jawaban				
		SS	S	N	TS	STS
		5	4	3	2	1
1.	Apakah kondisi jalan dikelurahan ini sebelum adanya program KOTAKU, sudah baik?					

2.	Apakah lebar jalan sudah memadai?					
3.	Apakah ada saluran tepian jalan lingkungan?					
4.	Apakah jalan lingkungan memiliki permukaan jalan yang rata?					

3. Kondisi Air Bersih

No	DAFTAR PERTANYAAN	Alternatif jawaban				
		SS	S	N	TS	STS
		5	4	3	2	1
1.	Bagaimana kondisi air bersih dikelurahan ini setelah adanya program kotaku, sudah baik ?					
2.	Apakah masyarakat di kelurahan ini kesulitan untuk mendapatkan air bersih ?					
3.	Ketersediaan dan kebutuhan air bersih sudah terpenuhi?					
4.	Apakah kualitas air minum di wilayah ini sesuai standar yang berlaku?					

4. Kondisi Drainase Lingkungan

No	DAFTAR PERTANYAAN	Alternatif jawaban				
		SS	S	N	TS	STS
		5	4	3	2	1
1.	Bagaimana kondisi drainase dikelurahan ini sesudah adanya program KOTAKU, apakah sudah baik?					
2.	Apakah ada resapan air mengalir untuk limpasan air hujan?					

3.	Apakah saluran sistem drainase di wilayah ini menuju kepusat?					
4.	Apakah sekitar wilayah daerah ini drainase lingkungannya menimbulkan bau?					

5. Kondisi Air Limbah

No	DAFTAR PERTANYAAN	Alternatif jawaban				
		SS	S	N	TS	STS
		5	4	3	2	1
1.	Apakah kondisi air limbah dikelurahan ini sesudah adanya program KOTAKU, sudah baik?					
2.	Apakah setiap rumah memiliki septi tank?					
3.	Apakah kualitas pembuangan pengelolaan air limbah sudah sesuai standar yang berlaku?					
4.	Apakah Pengelolaan air limbah mencemari lingkungan?					

6. Kondisi Persampahan

No	DAFTAR PERTANYAAN	Alternatif jawaban				
		SS	S	N	TS	STS
		5	4	3	2	1
1.	Bagaimana kondisi persampahan dikelurahan ini sesudah adanya program KOTAKU, apakah sudah baik?					
2.	Apakah ketersediaan persampahan dikelurahan ini sudah terpenuhi?					

3.	Apakah sampah mencemari lingkungan?					
4.	Apakah ketersediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan sudah sesuai standar yang berlaku?					

7. Proteksi Kebakaran

No	DAFTAR PERTANYAAN	Alternatif jawaban				
		SS	S	N	TS	STS
		5	4	3	2	1
1.	Bagaimana kondisi Proteksi Kebakaran dikelurahan ini sesudah adanya program KOTAKU, apakah sudah tersedia?					
2.	Apakah dengan Ketersediaan sistem pengamanan kebakaran dilakukan secara aktif?					
3.	Apakah pasokan air untuk pemadam kebakaran sudah memadai?					
4.	Apakah akses mobil pemadam kebakaran dapat dilalui di wilayah ini?					

TABEL TABULASI KUESIONER MASYARAKAT 14 ULU KOTA PALEMBANG

Responden	Bangunan Gedung	Jalan Lingkungan	Air Bersih	Drainase	Air Limbah	Persampahan	Proteksi Kebakaran
1	1	3	1	4	1	3	1
2	1	3	1	3	1	1	1
3	1	3	3	4	1	3	1
4	1	2	3	3	1	1	1
5	1	2	1	4	2	3	1
6	1	2	1	3	1	1	1
7	1	3	1	4	1	1	1
8	1	3	1	4	1	3	1
9	1	3	3	3	2	1	1
10	1	3	1	3	1	1	1
11	1	3	1	4	2	3	1
12	1	3	1	3	2	3	1
13	1	2	3	3	1	1	1
14	1	2	1	4	2	1	1
15	1	2	1	4	1	1	1
16	1	2	1	3	2	1	1
17	1	2	3	3	2	3	1
18	1	2	3	4	1	3	1

19	1	2	1	4	2	3	1
20	1	2	1	4	2	1	1
21	1	2	1	3	1	1	1
22	1	3	1	2	1	3	1
23	1	2	3	4	2	2	1
24	1	3	1	3	1	1	1
25	1	2	1	3	1	3	1
26	1	2	3	3	2	1	1
27	1	2	1	2	1	2	1
28	1	2	3	3	2	3	1
29	1	2	1	3	1	1	1
30	1	2	1	2	2	2	1
31	1	2	1	2	1	1	1
32	1	2	3	3	1	1	1
33	1	2	1	3	2	2	1
34	1	2	1	3	2	3	1
35	1	2	1	2	1	1	1
36	1	2	1	2	1	3	1
37	1	2	1	2	2	1	1
38	1	2	1	3	1	2	1
39	1	2	1	3	2	1	1
40	1	2	3	3	1	1	1
41	1	2	2	3	2	3	1
42	1	2	1	4	1	2	1
43	1	2	2	2	1	1	1

44	1	2	1	4	2	2	1
45	1	2	1	3	1	3	1
46	1	2	1	3	1	1	1
47	1	2	1	4	2	2	1
48	1	2	1	3	1	1	1
49	1	2	1	2	2	3	1
50	1	2	1	2	1	1	1
51	1	2	2	2	2	2	1
52	1	2	1	4	3	2	1
53	1	2	2	2	1	2	1
54	1	2	1	4	1	1	1
55	1	2	3	3	3	3	1
56	1	2	2	3	2	2	1
57	1	2	1	3	1	1	1
58	1	2	1	4	3	1	1
59	1	2	1	2	1	1	1
60	1	2	1	2	3	3	1
61	1	2	2	2	3	1	1
62	1	2	2	4	1	1	1
63	1	2	2	2	3	1	1
64	1	2	1	3	1	2	1
65	1	2	1	3	3	2	1
66	1	2	2	4	1	2	1
67	1	2	1	3	3	1	1
68	1	2	1	3	1	2	1

69	1	2	1	3	1	1	1
70	1	3	1	4	3	1	1
71	1	2	3	2	1	2	1
72	1	2	1	3	2	1	1
73	1	2	1	3	2	1	1
74	1	2	1	3	1	1	1
75	1	2	2	2	1	1	1
76	1	2	1	4	1	1	1
77	1	2	2	3	1	3	1
78	1	2	1	3	2	2	1
79	1	3	1	3	1	3	1
80	1	3	2	2	1	1	1
81	1	3	2	4	3	1	1
82	1	3	2	2	3	1	1
83	1	2	1	3	1	1	1
84	1	2	2	3	3	1	1
85	1	3	1	3	3	2	1
86	1	2	1	2	1	1	1
87	1	3	2	3	3	1	1
88	1	3	2	4	1	1	1
89	1	2	1	4	3	1	1
90	1	3	1	3	3	2	1
91	1	3	1	3	1	2	1
92	1	2	2	4	1	1	1
93	1	3	3	3	1	2	1

94	1	2	2	3	3	2	1
95	1	3	2	2	1	3	1
96	1	2	2	2	3	2	1
97	1	2	3	3	1	3	1
98	1	3	2	3	1	2	1
99	1	3	2	3	3	2	1
100	1	3	3	3	1	1	1
Total	100	226	155	303	164	172	100

LAMPIRAN

II

Surat Izin Penelitian

1 dari 1



UNIVERSITAS INDO GLOBAL MANDIRI
FAKULTAS TEKNIK

Jalan Jenderal Sudirman No. 629 Palembang 30113
Telp. 0711-322705, 322706 Fax. 0711-357754

FAKULTAS TEKNIK

Website : www.uigm.ac.id

E-mail : info@uigm.ac.id

Nomor : 386/T/PL/VI/2022
Lampiran : -
Prihal : Permohonan Izin Penelitian

Palembang, 23 Juni 2022

Kepada Yth,
Kepala Kelurahan 24 Ilir
Kepala Dinas PUPR
BAPPEDA Kota Palembang
Di
Tempat

Dengan hormat,

Disampaikan bahwa untuk keperluan pengambilan data dalam rangka penulisan tugas akhir skripsi, kami mohon berkenan Bapak/Ibu/Saudara untuk memberikan izin Penelitian bagi mahasiswa Fakultas Teknik:

Nama : Heri Susanti
NPM : 2018280013
Program Studi : Perencanaan Wilayah dan Kota

Penelitian akan dilaksanakan pada :

Waktu : 25 Juni s/d 25 Agustus 2022
Judul Skripsi : Evaluasi Penanganan Permukiman Kumuh (Kasus Program KOTAKU di Kelurahan 24 Ilir Kota Palembang)

Adapun data yang diperlukan terlampir.

Demikian surat izin penelitian ini dibuat agar yang berkepentingan maklum, serta dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Dekan,

Anta Sastika, ST., MT
NIDN : 0214047401

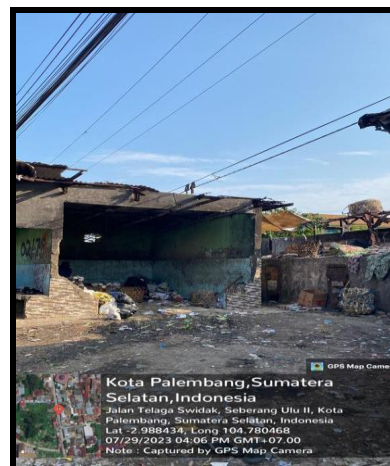
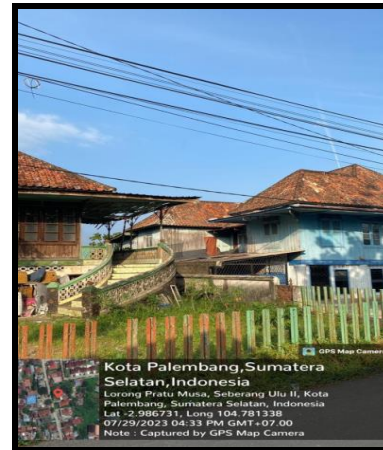
Tembusan :
1. Wakil Rektor I Universitas Indo Global Mandiri
2. Ketua Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota

Scanned by TapScanner

LAMPIRAN

III




Dokumentasi Lapangan






LAMPIRAN




IV

From Bimbingan

	FORMULIR BIMBINGAN TUGAS AKHIR FAKULTAS TEKNIK FM-PM-09.3/12-01/R0		
Program Studi	: Perencanaan Wilayah Dan Kota		
Nama	: Heri Susanti		
NPM	: 2018280013		
Judul	: Evaluasi Penanganan Permukiman Kumuh (Kasus Program Kotaku Di kelurahan 14 Ulu Kota Palembang).		
Pembimbing pertama	: Endy Agustian, S.T., M.Eng		
No	Tanggal Konsultasi	Materi	Tandatangan Pembimbing
1.	Rabu, 05 April 2023	- Bab 5 pembahasan setiap sasaran penelitian harus dijelaskan secara deskriptif meskipun metodenya kuantitatif, karena di bab 5 hasil penelitian belum ada landasan yang kuat. - Setiap hasil pengukuran(persentase) itu punya makna dijelaskan secara jelas. - Kuisisioner dibuat persasaran; a. apa saja yang dibutuhkan untuk mencari sasaran, b. indikator/variabel disesuaikan dengan focus.	
2.	Rabu, 23 mei 2023	- Perbaikan konteks dari buk hala - Tgl 24-30 sebar kuisisioner, tgl 31-05 juni menyusun bab 5, tgl 7 juni bimbingan kembali. - Perbaiki daftar isi. - Tata letak peta dibuat 1 halaman	

Scanned by TapScanner

3.	Jumat, 23 juni 2023	<ul style="list-style-type: none"> - Untuk tabel sebelum KOTAKU dipindah ke evaluasi. - Bab 5 dikasih keterangan dari tahun berapa program KOTAKU dilaksanakan. - Sumber diperbaiki 	
4.	Jumat, 07 juli 2023	<ul style="list-style-type: none"> - Untuk sasaran di hilangkan bagian sebelum program kotak. - Untuk bangunan gedung/hunian bab 5 diperjelas lagi. - Ditambahkan foto-foto untuk bab 5. - Sumber diperbaiki. - Dikasih penjelasan untuk tabel persepsi masyarakatnya. - Kesimpulan dibuat paragraph. - Perbaiki daftar isi. - Perbaiki daftar pustaka 	
5.	Kamis, 27 juli 2023	<ul style="list-style-type: none"> - Perbaiki sasaran - Jelaskan persisi 10% - Table observasi pindahkan ke observasi - Perbaiki peta bab 4 - Dijabarkan ciri2 bangunan foto didalam bangunan. - Masukkan peta+foto di bab 5. - Dinarasikan dibagian evaluasi program kotak menurut standar PUPR. - Untuk analisa persepsi masyarakat dijelaskan lebih detail. 	

6.	Jumat, 28 juli 2023	<ul style="list-style-type: none"> - 10% persisi karakteristiknya apa dilihat dari jumlah populasi. - Prosedur seperti apa yang digunakan teknik sampling. - Untuk kebituhan data penelitian ditambah standar PUPR. - Perbarui total kuesioner. - Gambar di bab 4 sesuaikan sama yang lainnya untuk lebar/besarnya. - Di bab 5 ditambahkan foto2 untuk semua indicator. - Untuk peta titik x,y jangan ngasal. - Diberi keterangan dilegenda keterangan - Ditambahkan standar PUPR apa trus nomor berapa. - Ditambahkan ditabel bab 5 hasil evaluasi sesuaikan dengan dilapangan sudah sesuai apa belum. 	
7	Senin, 31 Juli 2023	<ul style="list-style-type: none"> • Revisi kesimpulan + saran • Revisi / tambahkan tabel evaluasi berdasarkan Standar PU + perlebaran 	
8	Selasa, 1 Agustus 23	ACC	



FORMULIR BIMBINGAN TUGAS AKHIR
FAKULTAS TEKNIK
FM-PM-09.3/12-01/R0

Program Studi : Perencanaan Wilayah Dan Kota
Nama : Heri Susanti
NPM : 2018280013
Judul : Evaluasi Penanganan Permukiman Kumuh
(Kasus Program KOTAKU Di kelurahan 14 Ulu Kota Palembang).
Pembimbing kedua : Hala Haidir,S.T.,M.P.W.K

No.	Tanggal Konsultasi	Materi	Tanda Tangan Pembimbing
1	Sabtu, 23 Maret 2023	- Sumber ditabel - Spasi 1 untuk judul tabel - Tata letak sumber di gambar. - Identifikasi di ubah menjadi kondisi	
2	Rabu, 21 juni 2023	- Perbaiki rumusan masalah - Tabel di bab 5 untuk standar di perjelas. - Perbaiki indikator diubah menjadi standar PUPR. - Parameter diubah menjadi evaluasi. - Ditambahkan ditabel tersebut kondisi eksisting.	
3	Kamis, 13 juli 2023	- Eksisting jalan lingkungan di buat per ruas jalan lingkungan utama - Spasi 1,5 bukan 2,0	
4	Jumat, 21 juli 2023	- Diperjelas untuk evaluasi persepsi masyarakat. - Dibuat cerita/analisis seperti bahasa PWK.	
5.	Selasa, 25 Juli 2023	Tambah analisis akhir yaitu menggabungkan semua variabelnya biar sinkron dengan judul.	